

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA YOGYAKARTA
2018 - 2035



Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Bekerjasama dengan Bappeda Kota Yogyakarta
Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan “Penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan” Kota Yogyakarta. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Yogyakarta merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi kependudukan saat ini dan kondisi kependudukan yang dicita-citakan di masa mendatang yaitu periode tahun 2018-2035. Dalam konteks pelaksanaannya diperlukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kependudukan dengan kebijakan pembangunan yang lain.

Dokumen ini meliputi Lima Strategi GDPK yaitu pengendalian penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan migrasi, dan manajemen data kependudukan. Laporan Antara ini menjelaskan tentang pentingnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam pendahuluan dan tujuan kegiatan. Gambaran umum penduduk Kota Yogyakarta diuraikan secara deskriptif, sebelum menjelaskan roadmap pembangunan kependudukan. Perhitungan-perhitungan secara teknis tertuang dalam metode.

Dokumen ini tersusun atas kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Dukungan Organisasi Pemerintah Daerah terkait dalam penyediaan data-data sekunder membantu kelancaran penyusunan dokumen ini. Atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak, diucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018

Dekan Fakultas Geografi UGM




Prof. Dr. Muh. Ans. Marfal, M.Sc.
NIP. 197601131999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sasaran.....	7
BAB II GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	9
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	15
3.1 Lokasi	15
3.2 Sasaran.....	15
3.3 Metode Pelaksanaan.....	15
3.4 Lingkup Pekerjaan.....	16
3.4.1 Lingkup Wilayah.....	16
3.4.2 Lingkup Materi	16
3.5 Data yang Dibutuhkan	19
3.6 Hasil yang Diharapkan.....	20
3.7 Metode	20
3.8 Rencana Kerja	21

BAB IV KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA YOGYAKARTA.....	23
4.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	24
4.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	24
4.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin.....	30
4.1.3 Determinan Fertilitas	35
4.2 Peningkatan Kualitas Penduduk.....	39
4.2.1 Peningkatan Bidang Kesehatan	40
4.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Pendidikan	52
4.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi.....	56
4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kondisi serta Kualitas Gender	66
4.3 Pembangunan Keluarga	70
4.3.1 Tingkat Perceraian	70
4.3.2 Perkawinan.....	72
4.3.3 Wawasan Nasional.....	74
4.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Bina Keluarga	75
4.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	83
4.4.1 Kepadatan Penduduk.....	83
4.4.2 Migrasi.....	86
4.4.3 Kerjasama Daerah.....	90
4.5 Data dan Informasi Kependudukan.....	91
4.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan	92
4.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	93
BAB V KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN	105
5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	105
5.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	105
5.3 Fertilitas	107
5.4 Mortalitas.....	109

5.5	Pengarahannya Mobilitas Penduduk.....	111
5.6	Peningkatan Kualitas Penduduk.....	112
5.6.1	Bidang Kesehatan.....	112
5.6.2	Bidang Pendidikan.....	114
5.6.2	Bidang Ekonomi.....	114
5.7	Pembangunan Keluarga	115
5.8	Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	117
5.9	Data dan Informasi Kependudukan.....	118
BAB VI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN		121
6.1	Kuantitas Penduduk	121
6.2	Kualitas Penduduk	122
6.3	Pembangunan Keluarga	127
6.4	Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	129
6.5	Data dan Informasi Kependudukan.....	129
BAB VII POKOK POKOK KEPENDUDUKAN.....		131
7.1	Kuantitas Penduduk	131
7.2	Kualitas Penduduk	131
7.3	Pembangunan Keluarga	132
7.4	Persebaran dan Mobilitas Penduduk.....	133
7.5	Data dan Informasi Kependudukan.....	134
BAB VIII ROADMAP		135
8.1	Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk ..	135
8.2	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk.....	137
8.2.1	Bidang Ekonomi.....	137
8.2.2	Bidang Pendidikan.....	138
8.2.2	Kesehatan.....	140
8.3	Roadmap Pembangunan Keluarga.....	143
8.4	Road Map Pengarahannya Mobilitas Penduduk	144
8.5	Data dan Informasi Kependudukan.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1	Data yang Dibutuhkan	19
Tabel 3 2	Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Pekerjaan Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta.....	21
Tabel 4. 1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2017	25
Tabel 4. 2	Pertumbuhan Penduduk Alami Tahun 2015-2017	26
Tabel 4. 3	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelahiran, Kematian dan Migrasi Tahun 2015-2017.....	28
Tabel 4. 4	Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta menurut Kecamatan Tahun 2016.....	29
Tabel 4. 5	Distribusi Penduduk menurut Umur dan Kecamatan Tahun 2017	31
Tabel 4. 6	Ratio Ketergantungan Tahun 2015-2017	32
Tabel 4. 7	Jumlah Kelahiran dan CBR Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	36
Tabel 4. 8	Tren Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012	36
Tabel 4. 9	PUS yang istrinya Berusia Dibawah 20 Tahun	37
Tabel 4. 10	Persentase Istri yang Menikah pada Usia <21 Tahun dan Suami yang Menikah pada Usia < 25 tahun	38
Tabel 4. 11	PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	38
Tabel 4. 12	Unmet Need di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	39

Tabel 4. 13	Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi Tahun 2015-2017	41
Tabel 4. 14	Rasio jumlah posyandu dengan jumlah balita.....	42
Tabel 4. 15	Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	43
Tabel 4. 16	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	43
Tabel 4. 17	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	44
Tabel 4. 18	Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	45
Tabel 4. 19	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	45
Tabel 4. 20	Status Gizi Balita (PSG) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017	46
Tabel 4. 21	Kasus Penyakit Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017	48
Tabel 4. 22	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	49
Tabel 4. 23	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	51
Tabel 4. 24	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	52
Tabel 4. 25	Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2016	53
Tabel 4. 26	Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016	54
Tabel 4. 27	APM, APK, Angka Mengulang, dan Angka Putus Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017	55
Tabel 4. 28	Rasio Siswa di Kota Yogyakarta Tahun 2017	55
Tabel 4. 29	Presentase Akses Pendidikan Gender Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	56

Tabel 4. 30	PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota	58
Tabel 4. 31	Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha	59
Tabel 4. 32	PDRB ADHK per Kapita menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016	60
Tabel 4. 33	Presentase Penduduk Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2017	61
Tabel 4. 34	Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016.....	62
Tabel 4. 35	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta.....	64
Tabel 4. 36	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016	64
Tabel 4. 37	Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	66
Tabel 4. 38	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai 2017	67
Tabel 4. 39	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	67
Tabel 4. 40	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	69
Tabel 4. 41	Jumlah Pernikahan dan Perceraian Kota Yogya tahun 2015-2017	71
Tabel 4. 42	Data Jumlah Penduduk Sudah Kawin 2014-2017	72
Tabel 4. 43	Jumlah Kepemilikan Akta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2014–2017	73
Tabel 4. 44	Jumlah Lansia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018.....	76
Tabel 4. 45	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).....	78
Tabel 4. 46	Jumlah Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ..	79
Tabel 4. 47	Jumlah Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ..	79
Tabel 4. 48	Jumlah Kelompok BKR dan Partisipasi Kehadiran dalam Pertemuan	80
Tabel 4. 49	Jumlah PIK-Remaja Kota Yogyakarta.....	81

Tabel 4. 50	Jumlah Kelompok UPPKS.....	82
Tabel 4. 51	Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017 (jiwa/km ²).....	83
Tabel 4. 52	Jumlah Migrasi Keluar, Migrasi Masuk, dan Migrasi Neto Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017.....	87
Tabel 4. 53	Jumlah Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKN) Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017	88
Tabel 4. 54	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Melakukan Transmigrasi Tahun 2014–2016	89
Tabel 4. 55	Jumlah Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asal Negara	90
Tabel 4. 56	Persentase Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki KTP-El Menurut Kecamatan, 2014-2018.....	95
Tabel 4. 57	Persentase Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kecamatan, 2014-2018.....	97
Tabel 4. 58	Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta, 2014-2018	99
Tabel 4. 59	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki Akta Kematian Menurut Kecamatan, 2014-2018	101
Tabel 4. 60	Jumlah Kepemilikan KIA di Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan, 2016-2018	102
Tabel 5. 1	Proyeksi TFR dan CBR 2015-2035.....	107
Tabel 5. 2	Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi	108
Tabel 5. 3	Keluarga Pra KS dan KS I yang mengikuti Program KB	108
Tabel 5. 4	Perempuan Lulusan Perguruan Tinggi.....	109
Tabel 5. 5	Perkiraan CDR, IMR dan Usia Harapan Hidup.....	110
Tabel 5. 6	Penduduk Datang dan Pindah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015	111
Tabel 6. 1	Data Stunting di DIY.....	123

Tabel 6. 2	Rasio Jumlah Penduduk dengan Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta tahun 2016	123
Tabel 6. 3	Beberapa Kasus Kenakalan Remaja.....	128
Tabel 6. 4	Matriks Permasalahan dan Tantangan Pilar Data dan Informasi Kependudukan di Kota Yogyakarta	130
Tabel 7. 1	Strategi Pembangunan Kependudukan.....	131
Tabel 8. 1	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Yogyakarta, Tahun 2015-2035*)	135
Tabel 8. 2	Usulan Kegiatan Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	136
Tabel 8. 3	Road Map Peningkatan Pendapatan Per Kapita di Kota Yogyakarta.....	137
Tabel 8. 4	Road Map Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Angka Ketimpangan di Kota Yogyakarta	137
Tabel 8. 5	Road Map Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta	138
Tabel 8. 6	Road Map Peningkatan Angka Harapan Hidup dan IPM Kota Yogyakarta.....	138
Tabel 8. 7	Road Map Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta	139
Tabel 8. 8	Road Map Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta	140
Tabel 8. 9	Road Map Peningkatan Usia Harapan Hidup Sehat.....	141
Tabel 8. 10	Road Map Penurunan Kematian Ibu dan Anak	142
Tabel 8. 11	Roadmap Pembangunan Keluarga 2018-2035	143
Tabel 8. 12	Skema Perhitungan Kebutuhan Lahan Horizontal Kota Yogyakarta Tahun 2017	145
Tabel 8. 13	Skema Perhitungan Jumlah Kebutuhan Unit Rumah Susun Di Kota Yogyakarta	146
Tabel 8. 14	<i>Roadmap</i> Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2018-2035	147
Tabel 8. 15	Roadmap Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2035	148

Tabel 8. 16	Roadmap Penataan dan Pengelolaan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2035	150
-------------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta ...	6
Gambar 4. 1	Piramida Penduduk 2010-2020.....	34
Gambar 4. 2	Jumlah Balita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2017.....	47
Gambar 4. 3	Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta.....	65
Gambar 4. 4	Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta.....	68
Gambar 4. 5	Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015.....	69
Gambar 4. 6	Diagram Data Jumlah Lansia Tahun 2014-2018	77
Gambar 4. 7	Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017	85
Gambar 4. 8	Negara Tujuan TKI Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017	89
Gambar 4. 9	Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016	91
Gambar 4. 10	Posisi Data Informasi Kependudukan dalam Kerangka GDPK	92
Gambar 4. 11	Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-El di Kota Yogyakarta.....	94
Gambar 4. 12	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Yogyakarta.....	96
Gambar 4. 13	Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kematian di Kota Yogyakarta.....	100
Gambar 4. 14	Jumlah KIA yang Diterbitkan di Kota Yogyakarta	101

Gambar 5. 1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2015-2035	106
Gambar 5. 2	Tren Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta 2015-2035.	106
Gambar 5. 3	Kondisi yang diinginkan dalam penataan dan pengelolaan database kependudukan DIY.....	119
Gambar 6. 1	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha di Tahun 2016 dan Perbandingannya dengan UMR Kota Yogyakarta.....	126
Gambar 8. 1	Diagram Alur AHLS, IPM, dan RRLS.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kependudukan Yogyakarta merupakan aspek yang menarik untuk dibahas. Yogyakarta sebagai Kota Pelajar, Kota Pariwisata, Kota Jasa, Kota Budaya, dan Kota dengan biaya hidup rendah menjadi daya tarik bagi penduduk luar daerah untuk mengadu nasib disini. Kondisi ini tentu saja berdampak pada kondisi kependudukannya. Berbagai parameter determinan kependudukan seperti fertilitas, mortalitas, migrasi, dan kondisi sosialekonomi yang saling bertentangan menambah keunikan atau keistimewaan Yogyakarta.

Yogyakarta merupakan barometer fertilitas Indonesia, artinya jika tingkat fertilitas Yogyakarta terganggu akan berdampak pada kondisi fertilitas secara makro. Yogyakarta merupakan provinsi yang berhasil menekan angka kelahiran dari 4,76 pada tahun 1971 menjadi 2,2 pada tahun 2018. Akan tetapi, selama kurun waktu 2007-2018, angka TFR menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan karena terjadi peningkatan dari 1,8 menjadi 2,1 pada tahun 2012, dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi 2,2.

Kenaikan angka kelahiran total ini tidak seiring dengan peningkatan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi. Sementara itu menurut Davis dan Blake, penggunaan kontrasepsi merupakan variable antara sosialekonomi dalam mempengaruhi fertilitas. Pertanyaan selanjutnya adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenaikan fertilitas. Dalam kebijakan kependudukan fertilitas merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam upaya pengendalian jumlah penduduk disamping aspek lain yaitu peningkatan derajat kesehatan.

Jumlah penduduk ibarat mata pedang yang memiliki sisi yang saling berlawanan. Bagi sebagian pengambil kebijakan, pertumbuhan penduduk tidak dipandang sebagai suatu hal yang mengganggu, namun sebagian yang lain beranggapan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai salah satu hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Salah satu hal penting terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk adalah perubahan komposisi penduduk menurut umur yang dikaitkan dengan bonus demografi. Tahap *the windows of opportunity* yang ditandai dengan

angka beban ketergantungan harus disikapi untuk memaksimalkan bonus demografi agar tidak berubah menjadi *disaster*. Pemikiran tersebut sebagai upaya pencapaian pembangunan kuantitas dan kualitas penduduk yang optimal.

Persoalan kependudukan menjadi kompleks jika dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk terutama dari pilar ekonomi. Kebijakan untuk dua pilar yang lain yaitu pendidikan dan kesehatan ditekankan pada mempertahankan kondisi dengan tingkat capaian yang baik. Persoalan ini tidak hanya menjelaskan hubungan antara persoalan kualitas dengan kuantitas penduduk, namun inilah persoalan pembangunan yang dihadapi saat ini. Secara teoritis hubungan antara kependudukan dengan pembangunan sosial dan ekonomi bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi. Dengan kata lain, intervensi untuk menyelesaikan persoalan kependudukan akan memberikan kontribusi untuk menggarasi persoalan pembangunan yang lain, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu, perubahan lingkungan strategis yang diawali dari konferensi internasional Kairo 1994, MDG's dan kesepakatan internasional telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan. Contoh hasil kesepakatan MDG's 2000 telah berpengaruh sangat penting dalam mengarahkan pembangunan kependudukan saat ini. Arah kebijakan pembangunan secara umum diwarnai dan dipengaruhi MDG's. Sementara itu, dalam skala nasional, kebijakan otonomi daerah cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan keluarga berencana. Penurunan komitmen politik dalam penyusunan kebijakan pembangunan terlihat dari stagnasinya indikator-indikator kependudukan seperti angka fertilitas total dan laju pertumbuhan penduduk.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dengan payung hukum Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, masing-masing provinsi hingga kabupaten/kota menyusun target atau sasaran dalam bentuk roadmap Pembangunan Kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan penyusunan GDPK Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, pasal 34);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK).
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;
31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
33. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;
34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
35. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 21/DPA.SKPD/I/2018 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

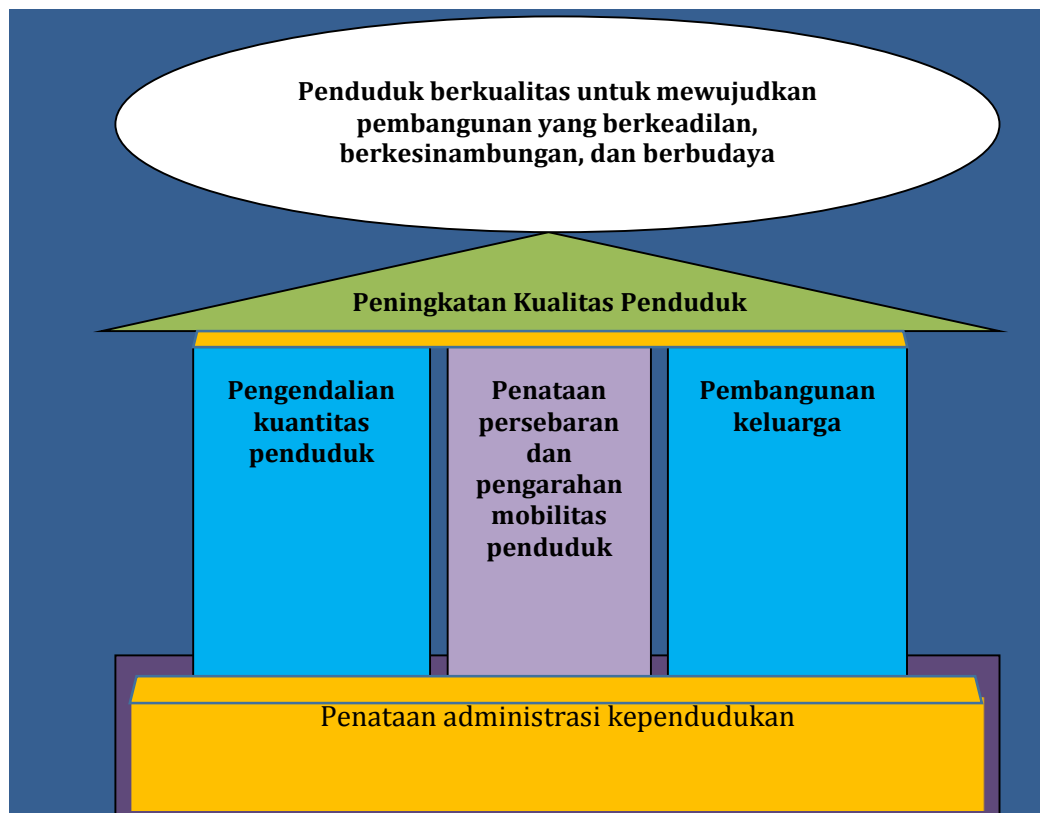
Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta.

1.3.2 Tujuan

Kajian *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kondisi penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk
2. Mewujudkan penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumberdaya manusia yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya
3. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
4. Mewujudkan pencapaian persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
5. Mewujudkan administrasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta

1.4 Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai *the window of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk
3. Keluarga berkualitas dengan mengoptimalkan fungsi keluarga dalam mencapai ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya serta mengoptimalkan sumberdaya keluarga
4. Pembangunan database kependudukan dengan system informasi data

BAB II

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan.

Arah kebijakan GDPK adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan
2. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat
3. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan
4. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
5. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:

1. penduduk tumbuh seimbang
2. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi
3. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni

4. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
5. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan beberapa strategi-strategi sebagai berikut:

1. pengendalian kuantitas penduduk;
2. peningkatan kualitas penduduk;
3. pembangunan keluarga;
4. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
5. penataan administrasi kependudukan.

Pilar pertama adalah pengendalian kuantitas penduduk yang dilakukan melalui pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas. Untuk itu maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan:

1. pengaturan fertilitas melalui program keluarga berencana seperti
 - a. pendewasaan usia perkawinan
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga
 - e. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita
2. penurunan mortalitas dilakukan melalui:
 - a. Penurunan angka kematian ibu hamil
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak

Pilar kedua adalah peningkatan kualitas penduduk yang dilakukan melalui:

1. bidang kesehatan dilakukan melalui
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara:
 - meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan
 - meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta
 - memberdayakan keluarga dan masyarakat
 - b. peningkatan status gizi dengan cara
 - melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat
 - meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan penduduk
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - d. peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak
 - e. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
2. bidang pendidikan dilakukan melalui
 - a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik
 - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
3. bidang ekonomi dilakukan melalui
 - a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan

Pilar ketiga adalah pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni yang dilakukan melalui:

1. pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah

3. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara
4. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga yang dilakukan melalui

1. penataan struktur keluarga
2. penguatan relasi sosial keluarga
3. pengembangan transformasi sosial keluarga
4. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pilar keempat adalah penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

1. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan
2. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
3. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah
4. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa
5. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
2. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar

Pilar kelima adalah penataan administrasi kependudukan dilakukan melalui

1. penataan dan pengelolaan database kependudukan
2. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan GDPK didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan GDPK yang terdiri atas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional untuk pusat, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi untuk provinsi, dan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota dibentuk oleh bupati/walikota. Tim ini mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah kabupaten/kota. Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di wilayah kabupaten/kota. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota harus memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten/kota dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi

Lokasi kegiatan penyusunan dokumen GDPK mencakup wilayah Kota Yogyakarta.

3.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan penyusunan dokumen GDPK adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta

3.3 Metode Pelaksanaan

Untuk melaksanakan pekerjaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta tersebut tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk mempelajari beberapa landasan teori dan penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan dalam analisis ini.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Penggalian data dan informasi berupa data sekunder antara lain pencarian dari beberapa, buku, jurnal, *website* yang berhubungan langsung dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta serta sumber-sumber dari instansi pemerintahan yang menyediakan berbagai data dan informasi untuk mengukur ketercapaian target serta indikator dari setiap tujuan tersebut. Instansi pemerintah yang membantu penyediaan data adalah:

Instansi pemerintah yang dilibatkan dalam penyusunan GDPK ini adalah

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Badan Pemberdayaan Perempuan
7. BPS

3. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari pengumpul data. Data yang didapatkan berasal dari wawancara *keyperson* secara mendalam (*indept interview*) kepada para stakeholder dari instansi pemerintah yang terkait dalam pembuatan Dokumen Grand Desain Kependudukan Kota Yogyakarta.

4. *Focus Group Discussion* (FGD)

Penggalian data dan informasi dengan mengumpulkan *stakeholders* dalam suatu grup diskusi (FGD) untuk menemukan beberapa data dan informasi yang tidak ada di dalam data sekunder (*website*, buku, atau jurnal).

5. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir, yang berupa penyusunan atau penulisan laporan, yang dilengkapi dengan peta-peta tematik jika dianggap perlu. Tahap ini juga diselingi oleh kegiatan presentasi draft laporan.

3.4 Lingkup Pekerjaan

3.4.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pekerjaan penyusunan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

3.4.2 Lingkup Materi

Dalam mewujudkan kondisi yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik

daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.

Strategi pelaksanaan penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian tumbuh seimbang dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- b. Peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui peningkatan:
 - 1) kesehatan;
 - 2) pendidikan;
 - 3) nilai agama;
 - 4) perekonomian (pendapatan per kapita);
 - 5) indeks pembangunan manusia;
 - 6) kondisi dan kualitas gender; dan
 - 7) nilai sosial budaya.

Kualitas penduduk dalam penyusunan GDPK dimaksud adalah menganalisis kondisi eksisting, identifikasi potensi dan kondisi kualitas penduduk ke depan dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

- c. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, dilakukan:
 - 1) pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;

- 3) pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- 4) pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pembangunan keluarga dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga, yaitu dilakukan melalui:

- 1) penataan struktur keluarga;
- 2) penguatan relasi sosial keluarga;
- 3) pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
- 4) perluasan jaringan sosial keluarga.

d. Pengarahan mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan melalui:

- 1) pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
- 2) pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- 3) pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- 4) pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
- 5) pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan melalui:

- 1) mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan

- 2) mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.
- e. Penataan administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan dengan:
- 1) penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
 - 2) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Penyusunan GDPK dilakukan tahapan, yaitu:

- a. Penilaian situasi dan kondisi kependudukan. Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan kependudukan, khususnya dari lembaga pemerintahan, sehingga diharapkan terpetakan permasalahan kependudukan Kota Yogyakarta.
- b. Analisis terhadap situasi dan kondisi kependudukan dalam rangka mengidentifikasi kecenderungan di masa mendatang. Teknis yang digunakan adalah memproyeksi usia harapan hidup.
- c. Merumuskan arah kebijakan kependudukan terkait dengan kuantitas, kualitas penduduk, penataan kependudukan melalui pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan sistem informasi kependudukan.
- d. Penyusunan *road map* kependudukan.

3.5 Data yang Dibutuhkan

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan GDPK pada masing-masing pilar meliputi (Tabel 3.1).

Tabel 3 1 Data yang Dibutuhkan

Jenis data	Instansi
Jumlah dan komposisi penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; BPS
Fertilitas dan Keluarga Berencana	BKKBN; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan
Kesehatan, morbiditas, dan mortalitas	Dinas Kesehatan dan BPS
Tingkat Pendidikan	Dinas Pendidikan dan BPS
Ekonomi	BPS
Mobilitas penduduk	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Hasil Analisis, 2018

3.6 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pekerjaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah tersusunnya Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan antara lain memuat pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

3.7 Metode

Penyusunan *Grand Design* Pengendalian Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2035 menggunakan pendekatan *population responsive*, yaitu memperhatikan dan memperhitungkan data serta informasi kependudukan secara lengkap. Data dan informasi penduduk seperti dalam table 3.1. menjadi informasi penting dalam menyusun kebijakan dan strategi di masa mendatang.

Penyusunan GDPK ini dilakukan melalui tiga tahap atau langkah, yaitu.

1. Penilaian situasi dan kondisi kependudukan. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan kependudukan, khususnya dari lembaga pemerintah. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah terpetakannya permasalahan kependudukan di Kota Yogyakarta
2. Analisis permasalahan kependudukan dari lima pilar GDPK
3. Analisis terhadap situasi dan kondisi kependudukan dalam rangka mengidentifikasi kecenderungan di masa mendatang. Teknik yang digunakan adalah proyeksi dengan memperhatikan histori.
4. Merumuskan kebijakan dengan didahului oleh (i) identifikasi dan analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh semua stakeholder serta (ii) analisis permasalahan kependudukan yang ada

Grand Design Pengendalian Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2035 menggunakan data-data utama sebagai berikut:

1. Data jumlah dan struktur penduduk diperoleh dari hasil sensus penduduk BPS, tahun 1971, 1980, 1990, 2000, 2010. Data penduduk tahun 2015 diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta. Hasil pencatatan Disdukcapil tidak berbeda jauh dengan hasil proyeksi penduduk 2015 yang dilakukan oleh BPS, sehingga data tersebut dapat dikatakan memiliki akurasi yang tinggi. Terlebih data Disdukcapil merupakan hasil registrasi penduduk yang diperbarui.

2. Data pengendalian penduduk yang mencakup pengguna kontrasepsi (prevalensi kontrasepsi), usia kawin pertama diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Data-data tersebut bersumber dari hasil pendataan penduduk
3. Data kelahiran dan kematian diperoleh dari BPS yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

3.8 Rencana Kerja

Jangka waktu pekerjaan penyusunan Dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender yaitu dimulai dari tanggal 24 April 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018 sesuai dengan tata kala sebagai berikut (Tabel 3.2).

Tabel 3 2 Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Pekerjaan Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta

Kegiatan	Bulan ke-1 (April) Minggu ke					Bulan ke-2 (Mei) Minggu ke					Bulan ke-3 (Juni) Minggu ke					Bulan ke-4 (Juli) Minggu ke					Bulan ke-5 (Agustus) Minggu ke				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Penyamaan persepsi teknis operasional pelaksanaan pekerjaan	■	■	■	■																					
Studi literatur			■	■																					
Penyusunan rencana kegiatan				■																					
Laporan bulan ke-1					■																				
Laporan pendahuluan dan paparan					■																				
FGD Kondisi kependudukan Kota Yogyakarta								■																	
FGD pokok-pokok pembangunan kependudukan									■																
Laporan bulan ke-2										■															
Laporan antara dan paparan														■											
Laporan bulan ke-3															■										
FGD penyusunan road map kependudukan																			■						
Laporan bulan ke-4																				■					
Paparan laporan akhir																						■			
Perumusan Draft SK Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK																							■		
Laporan final																								■	

BAB IV

KONDISI KEPENDUDUKAN KOTA YOGYAKARTA

Kondisi kependudukan saat ini dan kondisi kependudukan masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan kependudukan dimasa yang akan datang. Berdasarkan dua titik waktu inilah terhitung laju pertumbuhan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan asumsi untuk menentukan kondisi di masa depan yang diharapkan. Angka pertumbuhan inilah yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan asumsi-asumsi kebijakan dengan memperhatikan kondisi sosialekonomi dan kebijakan yang sudah ada.

Pembahasan kondisi kependudukan diawali dari kuantitas penduduk dengan berbagai determinannya seperti pengaturan fertilitas dan peningkatan derajat kesehatan. Kuantitas penduduk tidak hanya membahas jumlah, persebaran, pertumbuhan dan kepadatan penduduk saja, namun juga membahas karakteristik penduduk yang berhubungan dengan pengaturan fertilitas seperti umur, pendidikan, status perkawinan, dan partisipasi kerja. Indikator mortalitas juga menjadi salah satu point pembahasan kuantitas penduduk karena merupakan aspek penting dalam mempengaruhi kuantitas penduduk.

Sub pokok bahasan selanjutnya adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kuantitas penduduk. Dimensi kualitas penduduk adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenagakerjaan. Masing-masing dimensi diukur dengan indikator-indikator penting.

Sub pokok bahasan yang ketiga adalah pengarahannya mobilitas. Pembahasan ini menekankan pada aspek arus migrasi masuk dan keluar pada suatu wilayah. Jumlah migran dan karakteristiknya menjadi rangkaian cerita penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kependudukan. Migrasi merupakan aspek penting namun sangat susah untuk diintervensi.

Pembahasan keempat adalah ketahanan keluarga. Berbagai persoalan sosialseperti tawuran antar pelajar, seks pra nikah, dan berbagai persoalan sosialsebagai akibat kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsinya. Keluarga tidak bisa berfungsi sebagai tempat yang nyaman bagi anggotanya, keluarga tidak mampu memberikan pendidikan yang benar, keluarga tidak

bisa ini dan keluarga tidak bisa itu. Pembahasan dalam sub bab ini lebih banyak bersumber dari studi literature dan catatan wawancara mendalam.

Pembahasan kelima adalah system informasi administrasi kependudukan. Indikator yang disajikan adalah berbagai kebijakan dan dokumen yang menjadi hak penduduk Kota Yogyakarta dan sebagai kewajiban pemerintah menyediakannya. Capaian kinerja dan target yang ditentukan menjadi salah satu pembahasannya. Pembahasan dalam sub bab ini dilengkapi dengan berbagai kisah baik good dan bad practice yang dilakukan di daerah lain.

4.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk yang dimaksud dalam kajian ini adalah struktur penduduk dalam ilmu demografi yang membahas jumlah, laju atau pertumbuhan, persebaran, dan komposisi penduduk. Diantara variable struktur penduduk ini memiliki hubungan resiprokal atau saling mempengaruhi, contoh komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting diketahui menentukan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Karakteristik penduduk menurut pendidikan juga variable penting dalam pengaruhnya terhadap jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui tingkat fertilitas dan mortalitas.

Pembahasan kuantitas penduduk akan diawali dari jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Analisis deskriptif dilakukan untuk tingkat Kota maupun berdasarkan distribusi keruangan yaitu kecamatan. Asumsi yang dibangun kondisi kependudukan berbeda menurut kecamatan. Pada beberapa data dilakukan analisis pertumbuhan atau tren dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan suatu parameter dan sebagai acuan estimasi untuk kondisi yang akan datang.

4.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta setiap tahun mengalami perubahan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta pada periode 2014-2017 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, menggambarkan bahwa pada periode waktu 2014-2015 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan hingga mencapai -9,82. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini sangat besar, dan apabila dibiarkan tidak mustahil, Kota Yogyakarta akan mengalami kekurangan penduduk. Disinilah pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan KB berperan penting mengatur atau mengendalikan jumlah penduduk, ditambah atau dikurangi.

Banyak pandangan yang mengartikan laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kelangsungan hidup penduduk selanjutnya. Jumlah penduduk

yang terlalu banyak akan berdampak pada penurunan tingkat kenyamanan untuk tinggal di suatu wilayah. Di sisi lain, penurunan jumlah penduduk yang terlalu besar pun juga dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk pada suatu wilayah sehingga akan mengganggu roda ekonomi makro.

Rendahnya laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta apakah sebuah prestasi atau sebagai keberhasilan kebijakan menekan tingkat kelahiran. Atau sebagai indikator pamor Kota Yogyakarta yang memudar sehingga jumlah migran masuk berkurang? Atau data dasar perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang kurang tepat. Kondisi ini cukup ironis karena faktanya hampir setiap ruas jalan di Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Banyak ungkapan yang dilontarkan bahwa Yogyakarta sudah tidak “Berhati Nyaman”. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi perbedaan antara data dengan kondisi lapangan atau dengan kata lain data menunjukkan laju pertumbuhan penduduk kota negatif yang artinya terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara itu dari sisi tingkat kepadatan jalan dirasakan terjadi peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 4. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2014-2017

Jenis Data	Tahun		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Laju Pertumbuhan Penduduk	-9.82	0.86	-0.34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Laju pertumbuhan mulai meningkat pada tahun 2015-2016 bahkan mencapai nilai positif pada angka 0,86. Dinamika proses demografi di Kota Yogyakarta cukup kuat yang ditunjukkan oleh penurunan laju pertumbuhan penduduk pada periode waktu 2016-2017 yang menyentuh angka -0,34. Peningkatan jumlah penduduk selalu disebabkan karena fertilitas, mortalitas dan migrasi. Pertumbuhan penduduk positif manakala angka fertilitas dan migrasi masuk lebih tinggi dibandingkan dengan angka mortalitas dan migrasi keluar. Pertanyaannya adalah apakah laju pertumbuhan penduduk positif atau negatif yang tepat di Kota Yogyakarta.

Pertumbuhan penduduk alami di Kota Yogyakarta memiliki tren pertumbuhan yang terus menurun. Tahun 2015 pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta sebesar 3.929 jiwa. Pertumbuhan penduduk terus menurun pada tahun 2016 menjadi 2.217 dan terus menurun menjadi 1.865 jiwa pada tahun 2016. Kondisi yang seperti ini tentu tidak akan berdampak baik terhadap kondisi pertumbuhan Kota Yogyakarta. Apabila pertumbuhan penduduk terus menurun maka Kota Yogyakarta akan mengalami kekurangan penduduk asli. Sesuai dengan prediksi sebelumnya, apabila pertumbuhan penduduk terus berkurang maka Kota Yogyakarta bisa mengalami defisit penduduk. Tabel 4.2 memperlihatkan apabila pada tiga tahun terakhir terdapat beberapa

Kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Perubahan paling menonjol terjadi pada Kecamatan Ngampilan. Pada Tahun 2015 jumlah pertumbuhan penduduk masih berjumlah 174. Tahun 2016 turun menjadi -23 dan tahun 2017 turun menjadi -55. Kecamatan Gedongtengen sudah 3 tahun terakhir mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif. Tahun 2015 pertumbuhan penduduknya -95. Penurunan pertumbuhan tersebut terjadi pula di tahun 2016 -82 dan pada tahun 2017 mencapai -119. Meskipun hampir seluruh kecamatan mengalami penurunan jumlah penduduk masih terdapat kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk yaitu Kecamatan Kraton yang pada tahun 2015 dengan pertumbuhan penduduk dari 66 menjadi 79 di tahun 2016. Tahun 2017 pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 89.

Tabel 4. 2 Pertumbuhan Penduduk Alami Tahun 2015-2017

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk 2015	Pertumbuhan Penduduk 2016	Pertumbuhan Penduduk 2017
Tegalrejo	439	138	300
Jetis	-16	211	25
Gondokusuman	403	86	183
Danurejan	149	-25	-23
Gedongtengen	-95	-82	-119
Ngampilan	174	-23	-55
Wirobrajan	387	194	51
Mantrijeron	273	270	126
Kraton	66	79	89
Gondomanan	40	4	14
Pakualaman	86	63	67
Mergangsan	333	92	129
Umbulharjo	1.143	816	765
Kotagede	547	394	363
Kota Yogyakarta	3.929	2.217	1.865

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Pertumbuhan penduduk di pengaruhi oleh jumlah kelahiran kematian dan migrasi. Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta telah mencatat sejumlah perubahan dari tahun 2015-2017. Kelahiran yang tercatat pada Tahun 2015 sejumlah 4.449 jiwa. Jumlahnya menurun di tahun 2016 menjadi 4.488 jiwa. Tahun 2017 jumlah kelahiran kembali menurun menjadi 4.301 jiwa. Kematian di Kota Yogyakarta yang terjadi tahun 2015 sejumlah 1.718 jiwa. Tahun 2016

jumlahnya meningkat menjadi 3.338 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 3.237 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka kejadian kelahiran di kota Yogyakarta terus mengalami penurunan, sedangkan kematian mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kejadian kelahiran dan kematian di kota Yogyakarta cenderung seimbang sehingga pertumbuhan penduduk lebih banyak disebabkan oleh jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Migrasi penduduk pertahun di Kota Yogyakarta mencapai angka diatas 10.000 jiwa pertahun. Jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk ke Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sejumlah 12.466 jiwa. Tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 12.739 jiwa. Penurunan jumlah migrasi masuk terjadi pada tahun 2017 menjadi 10.538 jiwa. Jumlah penduduk yang mengalami migrasi keluar pada tahun 2015 sejumlah 11.268 jiwa. Tahun 2016 jumlahnya menjadi 11.672 jiwa. Penurunan yang cukup banyak terjadi pada tahun 2017 yang hanya mencapai 9.737 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui apabila Kota Yogyakarta masih memiliki daya tarik bagi penduduk luar kota untuk tinggal di Kota Yogyakarta. Beberapa alasan yang menjadi penyebab banyaknya penduduk dari luar Kota Yogyakarta untuk tinggal di kota Yogyakarta adalah akses pendidikan. Penduduk yang datang ke Kota Yogyakarta bertujuan untuk memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit yang ada di Kota Yogyakarta. *Tag line* Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan adanya system kuota bagi penduduk asli Kota Yogyakarta untuk dapat mengenyam pendidikan yang ada di kota Yogyakarta menjadi salah satu penyebab tingginya migrasi masuk yang ada di Kota Yogyakarta. Meskipun begitu, jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang melakukan migrasi keluar juga tidak sedikit. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya migrasi keluar di Kota Yogyakarta seperti berpindah karena pekerjaan. Tingginya jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar akan mengakibatkan berkurangnya penduduk asli Kota Yogyakarta yang digantikan dengan penduduk pendatang yang bukan merupakan penduduk asli Kota Yogyakarta. Kondisi ini yang menjadi problem bagi Kota Yogyakarta karena apabila kondisi ini terus terjadi maka Kota Yogyakarta akan ditinggali penduduk yang bukan asli Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk alami Kota Yogyakarta, Kecamatan Gedongtengen yang memiliki pertumbuhan penduduk tiga tahun terakhir selalu negatif pada Tabel 4.3 terlihat memiliki jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar lebih banyak daripada jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk. Meskipun pada pertumbuhan alaminya jumlah kelahiran lebih tinggi dari kematian, namun migrasi keluar di Kecamatan Gedongtengen tinggi sehingga hasilnya negatif. Kecamatan Kraton yang memiliki pertumbuhan penduduk yang terus meningkat disebabkan oleh pertumbuhan alaminya yang tinggi. Kecamatan Kraton memiliki jumlah kelahiran yang tinggi bila dibandingkan angka kematiannya. Migrasi masuk kecamatan Kraton juga memiliki jumlah yang tinggi dibandingkan dengan migrasi keluarnya sehingga penambahan jumlah penduduk di kecamatan Kraton dipengaruhi oleh kelahiran yang tinggi dan migrasi masuk.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelahiran, Kematian dan Migrasi Tahun 2015-2017

Kecamatan	Kelahiran			Kematian			Masuk			Keluar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Tegalrejo	402	433	420	153	272	266	1270	1136	1043	1080	1159	897
Jetis	297	280	253	100	221	214	615	852	628	828	700	692
Gondokusuman	438	431	388	183	326	325	1362	1367	1187	1214	1386	1067
Danurejan	220	209	200	97	197	173	614	671	486	588	708	536
Gedongtengen	185	180	196	96	164	177	492	507	361	676	605	499
Ngampilan	224	202	194	71	164	177	560	529	408	539	590	480
Wirobrajan	335	301	301	113	237	225	890	858	647	725	728	672
Mantrijeron	345	401	343	169	286	298	971	1161	854	874	1006	773
Kraton	215	217	219	92	231	174	539	653	562	596	560	518
Gondomanan	159	141	157	70	127	122	359	384	333	408	394	354
Pakualaman	100	109	110	48	79	109	270	333	274	236	300	208
Mergangsan	317	345	342	159	281	263	1018	918	736	843	890	686
Umbulharjo	797	832	767	247	496	502	2381	2402	2095	1788	1922	1595
Kotagede	415	407	411	120	257	212	1125	968	924	873	724	760
Kota Yogyakarta	4449	4488	4301	1718	3338	3237	12466	12739	10538	11268	11672	9737

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah akan berpengaruh terhadap banyak hal mulai dari sosial, politik, bahkan ekonomi. Jumlah penduduk memiliki fungsi strategis dan politis karena akan berdampak pada banyak hal seperti sebagai persyaratan untuk membangun layanan publik tertentu seperti rumah sakit ataupun kantor pertahanan dan keamanan.

Tabel 4.4 menggambarkan persebaran jumlah penduduk antar kecamatan tidaklah sama. Terdapat dua kecamatan yang dihuni lebih dari 10 persen penduduk Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman. Sebaliknya untuk Kecamatan Godomanan dan Pakualaman jumlah penduduknya relatif sedikit dibandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu dibawah 5 persen. Tabel tersebut selain menjelaskan tentang sebaran penduduk menurut kecamatan juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk di tiap kecamatan mengalami penambahan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun demikian untuk kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman menunjukkan hal yang berbeda karena justru mengalami penurunan. Apakah hal tersebut terkait dengan daya tampung wilayah ataupun karena factor yang lain.

Terdapat dua kecamatan lain dengan jumlah penduduk tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Tegalrejo. Ketiga kecamatan tersebut dalam tahun 2017 mengalami penambahan jumlah penduduk. lain dibandingkan dengan tahun sebelumnya memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif. Sementara itu, wilayah kecamatan yang lain mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2017.

Tabel 4. 4 Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	2016		2017	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Tegalrejo	37,757	9.04	36,853	8.97
Jetis	23,911	5.72	27,235	6.63
Gondokusuman	47,160	11.29	42,042	10.23
Danurejan	19,019	4.55	21,121	5.14
Gedongtengen	18,216	4.36	20,210	4.92
Ngampilan	16,932	4.05	18,561	4.52
Wirobrajan	25,831	6.18	27,746	6.75
Mantrijeron	33,103	7.92	35,207	8.57
Kraton	17,564	4.20	21,939	5.34
Gondomanan	13,603	3.26	15,010	3.65
Pakualaman	9,341	2.24	10,716	2.61
Mergangsan	30,475	7.30	31,986	7.78
Umbulharjo	88,667	21.23	68,760	16.73
Kotagede	36,165	8.66	33,535	8.16
Kota Yogyakarta	417,744	100	410,921	100

Sumber: BPS (Kota Yogyakarta dalam Angka), 2017

Persebaran jumlah penduduk dipengaruhi oleh luas wilayah disamping variable proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Besarnya jumlah penduduk di Kecamatan Umbulharjo terkait dengan luas wilayah Umbulharjo di bandingkan dengan kecamatan lain. Luas wilayah Kecamatan Umbulharjo adalah 25 persen dari luas Kota Yogyakarta yang memiliki luas 32,50 Km² (BPS, 2017). Luas wilayah yang lebih besar mampu menampung jumlah penduduk yang lebih besar. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan lahan Kecamatan Umbulharjo yang 63,88 persen dimanfaatkan untuk perumahan. Tidak berbeda dengan Kecamatan Pakualaman memiliki jumlah penduduk paling rendah karena luas wilayah yang dimiliki sekitar 1,94 persen

dari luas wilayah Kota Yogyakarta atau luas wilayah Kecamatan Umbulharjo lima belas kali luas wilayah Kecamatan Pakualaman.

4.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan tiga aspek yaitu penduduk belum produktif (berumur kurang dari 15 tahun), penduduk sudah tidak produktif (berumur lebih dari 60 tahun) dan penduduk produktif atau berumur antara 15-60 tahun. Perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif dan penduduk usia produktif disebut dengan beban ketergantungan atau *dependency ratio (DR)*. Angka beban ketergantungan mendekati 0 berarti jumlah penduduk usia tidak produktif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Sebaliknya ketika angka beban ketergantungan mendekati angka 100 berarti jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif memiliki jumlah yang sama. Ketika angka beban ketergantungan lebih besar dari 100 berarti jumlah penduduk tidak produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Rumus perhitungan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) adalah sebagai berikut:

$$\text{RBK} = \frac{\text{Penduduk tidak produktif (P<15 dan P>65+)}}{\text{Penduduk usia produktif (15-65 tahun)}} \times 100 \%$$

Tabel 4.5 menunjukkan jumlah penduduk usia produktif di Kota Yogyakarta sebesar 71 persen. Sementara itu penduduk yang belum produktif sebesar 21 persen dan selebihnya adalah penduduk sudah tidak produktif. Jumlah penduduk usia produktif sudah dua kali penduduk usia non produktif. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah untuk saat ini jumlah penduduk belum produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang sudah tidak produktif. Namun demikian dalam perjalanan kedepan, bias terjadi yang sebaliknya seiring dengan peningkatan derajat kesehatan penduduk dan keberhasilan program pengaturan kelahiran.

Tabel 4.5 menunjukkan variasi jumlah penduduk usia produktif di tiap kecamatan tidak menunjukkan perbedaan, yaitu sekitar 70 persen. Namun jumlah penduduk usia lanjut di Kecamatan Kraton menunjukkan angka tertinggi hampir menyentuh 9 persen, sementara itu di Kecamatan Kotagede jumlah penduduk lansia sekitar 6,41 persen. Jumlah penduduk lanjut usia di Yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk lansia di Indonesia atau dengan kata lain angka harapan hidup penduduk Kota lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain. Pertanyaan yang perlu diperdalam adalah bagaimana kualitas lanjut usianya? Harapan untuk fisik, psikis, dan finansial merupakan cita-cita ditengah maraknya penyakit non degenerative.

Tabel 4.5 menggambarkan angka beban ketergantungan menurut kecamatan dan waktu. Ratio ketergantungan ini akan mempengaruhi tingkat

kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Apabila jumlah penduduk kelompok umur produktif memiliki beban tanggungan yang semakin rendah maka produktifitas penduduk diharapkan meningkat. Kondisi dimana jumlah penduduk kelompok umur produktif lebih banyak dari pada kelompok umur belum atau tidak produktif dikenal dengan istilah Bonus Demografi. Ketika jumlah penduduk umur produktif semakin tinggi maka beban tanggungan terhadap penduduk umur belum atau tidak produktif semakin rendah sehingga pengeluaran dari pendapatan kelompok usia produktif untuk menanggung kelompok usia belum atau tidak produktif akan berkurang. Dengan kata lain pendapatan yang dimiliki dapat digunakan untuk investasi maupun peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 4. 5 Distribusi Penduduk menurut Umur dan Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	0-14		15-64		65+	
	F	%	f	%	F	%
Tegalrejo	7,956	21.59	26,152	70.96	2,745	7.45
Jetis	5,693	20.90	19,383	71.17	2,159	7.93
Gondokusuman	8,470	20.15	30,306	72.09	3,266	7.77
Danurejan	4,468	21.15	15,082	71.41	1,571	7.44
Gedongtengen	4,051	20.04	14,473	71.61	1,686	8.34
Ngampilan	3,947	21.27	13,220	71.22	1,394	7.51
Wirobrajan	6,069	21.87	19,499	70.28	2,178	7.85
Mantrijeron	7,433	21.11	25,006	71.03	2,768	7.86
Kraton	4,250	19.37	15,743	71.76	1,946	8.87
Gondomanan	2,974	19.81	10,754	71.65	1,282	8.54
Pakualaman	2,183	20.37	7,638	71.28	895	8.35
Mergangsan	6,817	21.31	22,727	71.05	2,442	7.63
Umbulharjo	15,579	22.66	48,680	70.80	4,501	6.55
Kotagede	7,636	22.77	23,750	70.82	2,149	6.41
Kota Yogyakarta	87,526	21.30	292,413	71.16	309,82	7.54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Ratio ketergantungan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan penurunan, artinya jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif mengalami penurunan. Dalam Bahasa ekonomi, Kota Yogyakarta memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik. Tahun 2017 sebesar 40,53 persen, artinya, 100 jiwa penduduk usia produktif di Kota Yogyakarta memiliki beban penduduk belum atau tidak

produktif sekitar 41 jiwa. Ratio ketergantungan pada tahun 2017 ini lebih rendah.

Perbedaan angka beban ketergantungan antar kecamatan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Kecamatan Gondokusuman memiliki beban ketergantungan sebesar 38,73 persen dan yang tertinggi berada di Kecamatan Wirobrajan sebesar 42,29 persen. Meskipun demikian angka beban ketergantungan di Kecamatan Wirobrajan pun masih di bawah angka 50 artinya jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang non produktif atau dapat pula diartikan semua kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki potensi yang sama dalam pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. 6 Ratio Ketergantungan Tahun 2015-2017

Kecamatan	Ratio Ketergantungan		
	2015	2016	2017
Tegalrejo	41.51	40.91	40.92
Jetis	40.29	39.83	40.51
Gondokusuman	38.89	38.94	38.73
Danurejan	40.49	39.62	40.04
Gedongtengen	40.10	39.37	39.64
Ngampilan	40.38	40.23	40.40
Wirobrajan	42.96	42.25	42.29
Mantrijeron	40.90	40.68	40.79
Kraton	40.24	39.56	39.36
Gondomanan	39.96	39.63	39.58
Pakualaman	40.71	40.72	40.30
Mergangsan	40.90	40.32	40.74
Umbulharjo	40.95	40.89	41.25
Kotagede	41.19	40.84	41.20
Kota Yogyakarta	40.71	40.35	40.53

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Ratio ketergantungan Kota Yogyakarta dalam rentang tahun 2015-2017 mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan atau dapat diartikan bahwa ratio ketergantungan Kota Yogyakarta cenderung Konstan. Tahun 2015 ratio ketergantungan Kota Yogyakarta Sebesar 40,71%. Tahun 2016 ratio ketergantungan mengalami perubahan menjadi 40,35%. Ratio Ketergantungan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berubah menjadi 40,53%. Ratio Ketergantungan yang cenderung konstan menunjukkan bahwa dalam

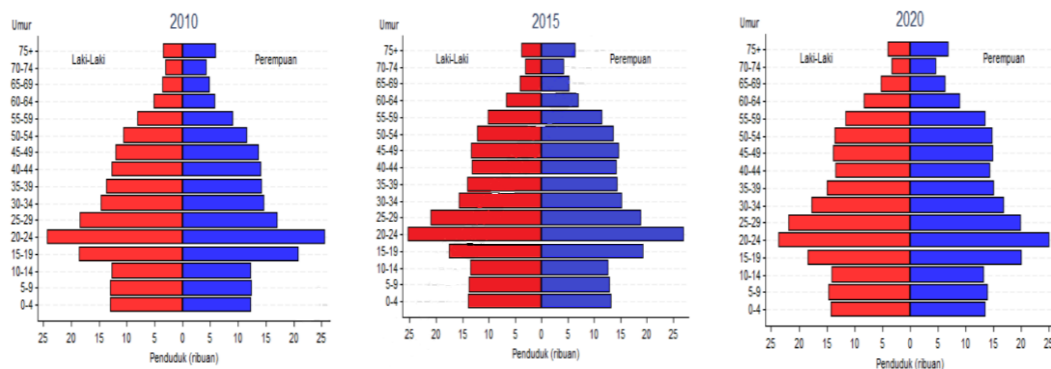
kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk umur produktif Kota Yogyakarta masih lebih besar dari umur tidak atau belum produktif.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir kecamatan yang memiliki Ratio Ketergantungan terendah adalah Kecamatan Gondokusuman. Kecamatan Gondokusuman memiliki jumlah penduduk umur produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk umur belum atau tidak produktif dari seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut menjadi faktor yang menyebabkan ratio ketergantungan Kecamatan Gondokusuman menjadi yang paling rendah. Dilihat dari data tiga tahun terakhir, persentase ratio ketergantungan penduduk Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap tingkat ketergantungan penduduk terhadap kelompok umur produktif di masing-masing kecamatan. Perubahan ratio ketergantungan yang cenderung konstan ini diperkirakan tidak akan mengalami banyak perubahan di tahun-tahun berikutnya. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun kedepan ratio ketergantungan Kota Yogyakarta diprediksi masih berada dibawah 50% dan Kota Yogyakarta masih memiliki jumlah penduduk pada kelompok umur produktif yang lebih banyak dibandingkan penduduk umur belum atau tidak produktif. Ratio Ketergantungan dibawah 50% dinilai ideal untuk memprediksi bahwa tingkat kesejahteraan penduduk lima tahun kedepan masih baik dan Kota Yogyakarta masih memiliki peluang menerima bonus demografi.

Secara umum penduduk Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah ini tidak berbeda dengan kondisi penduduk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan jumlah penduduk dalam rentang waktu tiga tahun terakhir masih didominasi oleh penduduk perempuan. Tahun 2015 persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,81% dan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 51,19% dari seluruh jumlah penduduk kota Yogyakarta sejumlah 408.823 jiwa. Tahun 2016 jumlah penduduk kota Yogyakarta sejumlah 412.331 dengan persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,78% dan jumlah penduduk perempuan sebesar 51,22%. Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,77% dan persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 51,23% dari 410.921 jumlah penduduk tahun 2017. Berdasarkan data tersebut maka tren proporsi jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan diprediksi tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dan masih akan terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta menurut kelompok umur dan jenis kelamin oleh BPS telah diproyeksikan ke dalam bentuk piramida sejak tahun tahun 2010 hingga 2020. Berdasarkan piramida tahun 2010, 2015, hingga 2020 diketahui apabila Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan struktur kependudukan yang signifikan. Hal tersebut dapat di lihat dari piramida penduduk dalam kurun waktu 5 tahunan tidak mengalami perubahan bentuk

piramida. Hingga saat ini bentuk piramida penduduk kota Yogyakarta termasuk dalam piramida konstruktif.



Gambar 4. 1 Piramida Penduduk 2010-2020

Sumber: BPS, 2015

Piramida penduduk kota Yogyakarta memiliki tren yang sama tiap tahun. Meskipun jumlah penduduk Kota Yogyakarta terus meningkat, namun dalam komposisi tidak mengalami banyak perubahan. Bentuk piramida konstruktif diidentifikasi dari lebar bawah piramida yang merupakan kelompok umur 0-4 tahun yang tidak terlalu lebar. Hal tersebut dapat diartikan tingkat kelahiran Kota Yogyakarta tidak terlalu tinggi. Puncak piramida yang merupakan kelompok umur 75 tahun keatas melebar dari batas kelompok umur tidak produktif sejak umur 65 tahun. Puncak yang melebar menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Hal tersebut sesuai dengan data BPS yang menunjukkan IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah 85,49. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 78,89. Bentuk piramida konstruktif memiliki penduduk dengan umur dewasa yang cukup tinggi hal ini sesuai dengan bentuk piramida Kota Yogyakarta yang didominasi oleh penduduk umur produktif terutama kelompok umur 20-24 tahun. Penduduk yang memiliki bentuk piramida konstruktif memiliki potensi mengalami penurunan jumlah penduduk karena tingkat kelahirannya tidak terlalu tinggi. Oleh sebab itu perlu adanya upaya pengendalian penduduk agar tidak mengalami defisit penduduk.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jumlah penduduk Kota Yogyakarta sudah memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Perbedaan jumlah penduduk antar wilayah kecamatan lebih disebabkan karena pengaruh luas wilayah. Jumlah penduduk yang sudah cukup besar ini terkendali dengan laju pertumbuhan penduduk yang rendah bahkan negatif. Artinya dari sisi jumlah penduduk, variable yang mempengaruhi yaitu angka kelahiran dan peningkatan derajat kesehatan sudah cukup memadai. Satu hal yang perlu dipertahankan adalah mengatur angka kelahiran namun tidak sampai titik nol bahkan negatif. Upaya mempertahankan jumlah penduduk dengan tetap menjaga kepemilikan anak (minimal 2) tetap harus disosialisasikan. Kebijakan kependudukan tidak

hanya diarahkan untuk membatasi kelahiran namun diarahkan untuk mengatur jumlah anak dan meningkatkan kualitasnya.

4.1.3 Determinan Fertilitas

Pengaturan fertilitas di wilayah Yogyakarta dilakukan melalui program keluarga berencana. Program keluarga berencana merupakan upaya untuk mengendalikan dan mengontrol kelahiran pada pasangan usia subur melalui pemakaian alat kontrasepsi. Pemerintah mengambil langkah kongkrit, yaitu menerapkan kebijakan pengendalian kelahiran melalui keluarga berencana setelah memahami persoalan-persoalan kependudukan pada konferensi di Bukarest tahun 1974. Ada keyakinan bahwa jumlah penduduk yang besar akan menyulitkan upaya pencapaian tujuan pembangunan, termasuk meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karenanya laju pertumbuhan penduduk harus dikendalikan.

Kebijakan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana sendiri tidak dimulai secara serempak di seluruh wilayah di Indonesia, Yogyakarta tergolong awal dalam menerima program keluarga berencana karena termasuk dalam kategori wilayah Jawa-Bali I. Nampaknya program yang telah dilaksanakan sejak tahun 1970 an itu membawa pengaruh signifikan terhadap tingkat kelahiran. *Crude Birth Rate* (CBR) atau angka kelahiran kasar yang menggambarkan banyaknya kelahiran per jumlah penduduk nampak menurun secara konsisten sejak tahun 2013-2016. Pada 2013 CBR Yogyakarta adalah 11,45, kemudian menurun menjadi 10,55 di tahun 2014 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 9,67 hingga mencapai 9,34 di tahun 2016. Penurunan jumlah kelahiran tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk melalui pengendalian kelahiran.

Angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) mengalami penurunan dari 4,75 di tahun 1971 menjadi 3,42 di tahun 1980. Angka TFR terus mengalami penurunan menjadi 2,08 di tahun 1990 dan menjadi 1,44 di tahun 2000. Tahun 2010 angka TFR sedikit mengalami kenaikan menjadi 1,93. Meskipun demikian, TFR Yogyakarta lebih rendah dibandingkan dengan TFR nasional yang mencapai 2,6¹. Dari sisi target demografi, yaitu *replacement level* TFR sama dengan 2,1 per perempuan atau *NRR* (*Net Reproduction Rate*) sama dengan satu per perempuan sudah tidak menjadi masalah lagi untuk Kota Yogyakarta. Tantangannya adalah mempertahankan angka kelahiran yang ada agar TFR tidak meningkat dari 1,93. Hal ini berarti program KB tetap harus dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pembangunan kependudukan lainnya.

¹ Angka kelahiran yang direpresentasikan oleh angka TFR dihitung berdasarkan estimasi data sensus atau SDKI. Pada survei sampel seperti SDKI, TFR hanya dihitung pada tingkat provinsi dan tidak memungkinkan untuk dihitung pada tingkat yang lebih rendah lagi seperti kabupaten/kota karena pertimbangan sampel.

Tabel 4. 7 Jumlah Kelahiran dan CBR Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Kelahiran	CBR
2012	4.774	10,67
2013	4.658	11,45
2014	4.369	10,55
2015	3.972	9,67
2016	3.841	9,34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Di Kota Yogyakarta sendiri, meski dalam beberapa diskusi publik selalu disebutkan sebagai daerah yang berhasil dalam pendewasaan usia kawin pertama karena angkanya lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY, tetapi kasus pernikahan dini tetap ada. Menurut data BPS, pernikahan dini di Yogyakarta terjadi pada umur 17 hingga 18 tahun. Pernikahan juga ditemukan remaja umur kurang dari 16 tahun. Persentase pernikahan dini yang terjadi pada umur kurang dari 16 tahun trennya cenderung menurun, yaitu dari 5,17 persen di tahun 2009 menjadi 4,57 persen di tahun 2012. Tren positif juga terlihat pada pernikahan dini yang terjadi antara umur 17-18 tahun. Pada 2010 tercatat sebanyak 15,79 persen kemudian menurun menjadi 12,39 persen di tahun 2012.

Tabel 4. 8 Tren Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012

Tahun	<16 tahun	17-18 tahun
2009	5,17	11,33
2010	8,77	15,79
2011	5,99	14,30
2012	4,57	12,39

Sumber: BPS-Indikator Kesejahteraan Rakyat DIY, 2009,2010,2011,2012

Masih ditemukannya kasus pernikahan dini di Kota Yogyakarta, mendorong pemerintah kota untuk terus menggalakkan program keluarga berencana dengan membudayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang norma tersebut disampaikan secara luas melalui berbagai media cetak, elektronik dan juga melalui forum diskusi formal serta informal. Budaya norma keluarga kecil diawali dengan menanamkan pengetahuan pentingnya merencanakan sebuah keluarga. Pandangan-pandangan di masa dulu bahwa banyak anak banyak rezeki tidak sepenuhnya benar, sehingga harus dirubah. Memiliki banyak anak tentu membutuhkan curahan energi dan sumberdaya yang tidak sedikit. Biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak dalam jumlah besar juga tidak sedikit. Keluarga yang tidak memiliki kemampuan cukup, baik dari sisi ekonomi, sosial dan moril, tetapi memiliki anak banyak

berisiko menghadapi persoalan, utamanya pemenuhan hak-hak dasar anak. Anak menjadi rentan menghadapi persoalan kesehatan karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi serta mengakses layanan kesehatan ketika sakit. Anak juga rentan putus sekolah karena orang tua tidak memiliki cukup biaya untuk mendidik putra-putrinya. Secara moril, anak juga berisiko menjadi korban kekerasan yang diakibatkan oleh stress dan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya. Hal-hal tersebut penting untuk dihindari dalam rangka menciptakan generasi yang berkualitas di masa depan. Implikasinya merencanakan keluarga sejak dini merupakan sebuah keharusan. Hal itulah yang terus dikampanyekan dan dibudayakan melalui program keluarga berencana.

Komunikasi informasi dan edukasi norma keluarga kecil pada program keluarga berencana nampaknya juga berpengaruh signifikan pada jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menikah pada umur kurang dari 20 tahun. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kelahiran dari PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun. Apabila dibandingkan dengan PUS yang istrinya pada kelompok umur yang lebih tinggi, jumlah kelahiran dari PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun memang lebih rendah. Namun tren jumlah kelahiran dari PUS muda ini menunjukkan adanya peningkatan. Tren peningkatan jumlah kelahiran dari PUS muda ini bertolak belakang dengan tren penurunan jumlah kelahiran maupun CBR. Tren peningkatan jumlah kelahiran dari PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun di Kota Yogyakarta menjadi evaluasi yang cukup penting bagi Kota Yogyakarta, khususnya dalam hal kesehatan reproduksi dan maupun keluarga berencana.

Tabel 4. 9 PUS yang istrinya Berusia Dibawah 20 Tahun

Tahun	Jumlah Kelahiran PUS yang Istrinya Berusia Dibawah 20 Tahun
2012	0,07
2013	0,04
2014	0,16
2015	0,26
2016	0,27

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta, 2017

Istri yang menikah pada usia kurang dari 21 tahun di Kota Yogyakarta ada sekitar 24 persen. Berdasarkan distribusinya istri yang menikah pada usia kurang dari 21 tahun banyak ditemukan di Kecamatan Gedongtengan yaitu mencapai 29,31 persen. Untuk kecamatan lainnya termasuk Mergangsan, Umburharjo dan Kota Gede persentase istri yang menikah pada usia kurang dari 21 tahun relatif sama yaitu sekitar 23 persen. Distribusi istri yang menikah pada usia kurang dari 21 tahun di masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Persentase Istri yang Menikah pada Usia <21 Tahun dan Suami yang Menikah pada Usia < 25 tahun

Kecamatan	Istri (<21 tahun)	Suami (<25 tahun)
Tegalrejo	26,55%	7,63%
Jetis	27,77%	8,82%
Gondokusuman	22,44%	5,71%
Danurejan	27,89%	6,29%
Gedongtengen	29,31%	11,38%
Ngampilan	25,92%	6,13%
Wirobrajan	24,60%	6,96%
Mantrijeron	22,28%	5,75%
Kraton	17,71%	4,61%
Gondomanan	26,33%	6,29%
Pakualaman	20,35%	4,62%
Mergangsan	23,34%	6,10%
Umuburharjp	23,33%	5,97%
Kotagede	23,27%	4,90%
Kota Yogyakarta	24,16%	6,38%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Yogyakarta, 2017

Pengaturan fertilitas juga tidak terlepas dari penggunaan alat/cara dan obat untuk mengatur atau menjarangkan kelahiran. Program keluarga berencana selain mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia kawin pertama, juga mendorong PUS menggunakan alat/cara dan obat kontrasepsi untuk mengatur dan menjarangkan kelahiran. Dari sisi pemakaian alat kontrasepsi, nampak jumlah peserta KB aktif di Kota Yogyakarta cukup banyak. Pada 2015, jumlah PUS KB aktif tercatat sebanyak 75,34 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2012 yang hanya mencapai 73,29 persen.

Tabel 4. 11 PUS yang menjadi Peserta KB Aktif

	Persen
2012	73,29
2013	74,34
2014	76,30
2015	75,34

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2016

Peningkatan jumlah PUS KB aktif sejak tahun 2012 hingga 2015 ternyata juga diikuti oleh peningkatan jumlah *unmet need*. *Unmet need* adalah kebutuhan alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Kondisi ini merujuk pada PUS yang ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi, baik karena faktor pemberi layanan (*provider*) maupun pengguna layanan (*user*) yang fluktuatif. Tahun 2014 angka *unmet need* Kota Yogyakarta sebesar 9,25 persen, kemudian meningkat menjadi 11,40 persen di tahun 2016. Pada tahun-tahun sebelumnya *unmet need* sempat mengalami penurunan, yaitu dari 12,09 persen di tahun 2012 menjadi 10,67 persen di tahun 2013 dan turun menjadi 9,25 persen di tahun 2014. Meski sempat mengalami penurunan, namun dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan, sehingga hal itu perlu menjadi perhatian yang serius. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa *unmet need* yang tinggi berisiko terhadap peningkatan angka kelahiran. Meski untuk negara-negara maju dan di Kota Yogyakarta, *unmet need* yang terjadi pada kelompok terdidik tidak selalu berakhir pada kelahiran². Oleh karenanya penting untuk melihat lebih jauh kelompok-kelompok yang terkategori sebagai *unmet need* ini, baik dari sisi pendidikan maupun umur.

Tabel 4. 12 Unmet Need di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Tahun	Unmet Need
2012	12,09
2013	10,67
2014	9,25
2015	10,38
2016	11,40

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2017

4.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas hidup di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Presiden No. 153 Tahun 2014 pasal 6 bahwa dalam meningkatkan kualitas penduduk Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Di dalam dokumen GDPK Kota Yogyakarta ini pembahasan mengenai peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan secara umum berisi pembahasan tentang akses penduduk terhadap pendidikan dan akses pendidikan menurut gender. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas penduduk dari sisi pendidikan, semakin tinggi kualitas pendidikan maka semakin baik pula kualitas sumber

² Listyaningsing, dkk. 2016. *unmet need: konsep yang masih perlu diperdebatkan*

daya manusia atau penduduknya. Kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta dapat dianalisis melalui rata-rata lama sekolah (MYS), angka harapan lamanya sekolah (EYS), APS, APK, APM, dan Presentase Akses Pendidikan menurut Gender. Peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan dalam GDPK Kota Yogyakarta ini dianalisis melalui cakupan pelayanan kesehatan, kesehatan ibu dan anak, peningkatan status gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta akses penduduk terhadap air bersih dan sanitasi. Semakin tinggi derajat kesehatan penduduk di Kota Yogyakarta maka diharapkan semakin baik pula kualitas hidup penduduknya.

Peningkatan kualitas hidup di bidang ekonomi Kota Yogyakarta dikaji melalui pendekatan ekonomi wilayah dan ekonomi masyarakat. Indikator ekonomi wilayah didekati dengan PDRB Kota Yogyakarta, sedangkan indikator ekonomi masyarakat didekati dengan PDRB Per Kapita yang dipertajam dengan analisis penduduk yang bekerja (angka partisipasi angkatan kerja). Perekonomian menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, baik pertumbuhan ekonomi wilayah maupun ekonomi masyarakatnya. Agar analisis terkait kualitas hidup lebih mendalam, maka peningkatan kualitas hidup dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tentunya semakin baik IPM, IPG, dan IDG maka akan memberikan dampak positif juga bah kualitas hidup Kota Yogyakarta.

4.2.1 Peningkatan Bidang Kesehatan

Indikator peningkatan kualitas penduduk berikutnya adalah peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan dapat ditandai dengan cakupan pelayanan kesehatan, penurunan kematian terutama pada ibu dan anak, peningkatan status gizi, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta akses penduduk terhadap air bersih dan sanitasi.

4.2.1.1 Penurunan Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Tabel 4.13), angka kematian ibu di Kota Yogyakarta cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran sebesar 125 di tahun 2015, pada tahun 2016 turun menjadi 104, akan tetapi pada tahun 2017 naik menjadi 110 per 100.000 kelahiran. Kenaikan AKI pada tahun 2015 yang cukup tinggi, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian. Selain itu, ditemukan pula penyebab

kematian Ibu pada tahun 2015, yaitu terdapatnya penyakit TBC Milier, TBC HIV, pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebut dominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta.

Tabel 4. 13 Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi Tahun 2015-2017

Keterangan	2015	2016	2017
Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran)	125	104	110
Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran)	8.2	7.8	9.1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Hal yang sama juga terjadi pada angka kematian bayi pada tahun 2015 angka kematian bayi per 1000 kelahiran berada di angka 8.2. Angka ini turun ditahun 2016 dengan nilai 7,8 kemudian naik lagi tahun 2017 dengan nilai 9.1. Banyaknya jumlah kematian pada ibu dan bayi disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tertinggi penyebab hampir 32% kasus kematian adalah bayi premature.

Angka kematian ibu (AKI) di Kota Yogyakarta masih tinggi atau di atas target MDGS nasional yang seharusnya pada tahun 2015 sudah mencapai AKI kurang dari 102 per 100.000 kelahiran hidup. Hingga tahun 2017 AKI di Kota Yogyakarta belum menunjukkan pencapaian target (< 102), sehingga perlu adanya upaya penanganan angka kematian ibu yang masih tinggi di Kota Yogyakarta. Kesehatan ibu merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal yang sama untuk diperhatikan adalah angka kematian bayi yang masih tinggi, yaitu sebesar 9,1 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Padahal target angka kematian bayi di Kota Yogyakarta sebesar 7,52 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat, dan seluruh pihak secara sinergi harus bekerja keras untuk menangani kejadian/fenomena ini. Pencegahan dan penanganan kasus-kasus kesehatan yang menimpa Ibu dan Bayi perlu direspon dengan cepat tanggap, karena hal ini akan menjadi tolak ukur terhadap derajat kesehatan penduduk Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, indikator untuk penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup (terutama bagi ibu dan anak), dapat dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.

A. Pelayanan Kesehatan

- **Posyandu**

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi warga kota (terutama ibu dan anak), sehingga

diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh, posyandu yang disajikan adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Keberadaan posyandu bermanfaat bagi pemantauan balita sebagai salah satu sarana kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Di bawah ini disajikan data rasio jumlah posyandu dengan jumlah balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Tabel 4. 14 Rasio jumlah posyandu dengan jumlah balita

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Posyandu	Unit	622	625	625	625	625
Jumlah Balita	Anak	27.701	26.671	27.209	15.832	18.713
Rasio posyandu per satuan balita	Anak/Unit	44,54	42,67	43,53	25,33	29,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Tabel 4.14 menunjukkan rasio jumlah posyandu dengan jumlah balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016. Rasio tersebut dihitung dari jumlah balita (anak) dibandingkan dengan jumlah posyandu yang tersedia. Rasio posyandu per satuan balita menunjukkan beban pelayanan yang harus dilakukan oleh Posyandu. Berdasarkan data, diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2015, rasio jumlah posyandu dengan jumlah balita sebesar 44,54; artinya 1 posyandu melayani kurang lebih 45 balita. Jumlah tersebut turun menjadi kurang lebih 25 balita di tahun 2015. Kecenderungan rasio yang semakin kecil ini menunjukkan peningkatan layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di 45 kelurahan. Selain itu, peningkatan rasio posyandu juga dikarenakan menurunnya jumlah balita mulai tahun 2015 hingga hampir 10.000 balita dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah posyandu yang tersebar di Kota Yogyakarta masih konsisten sebanyak 625 unit sejak tahun 2013 hingga 2016.

- **Puskesmas, Klinik, dan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan, maka semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses/menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta ditampilkan pada Tabel 4.15.

Tabel 4. 15 Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18
Puskesmas Pembantu	Unit	11	10	9	9	9
Klinik	Unit	23	65	56	74	86
Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik	Unit	52	93	72	101	113
Jumlah penduduk	Jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk	Jiwa/Unit	8223	4373	5749	4054	3640

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Data di atas menunjukkan bahwa rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan data diketahui bahwa rasio fasilitas kesehatan tersebut mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, satu faskes melayani kurang lebih 8223 penduduk. Jumlah tersebut menurun ke angka 4373 di tahun 2013. Di tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi 5749 jiwa per faskes. Rasio tersebut selanjutnya konstan menurun dan diakhir tahun 2016, satu fasilitas kesehatan melayani kurang lebih 3640 penduduk.

- **Rumah Sakit**

Salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien adalah rumah sakit. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, diharapkan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Sama halnya dengan puskesmas, rumah sakit juga memiliki standar pelayanan minimum dalam melayani masyarakat. Untuk mengetahui efektivitas keberadaan rumah sakit di Kota Yogyakarta, maka diperlukan data jumlah penduduk. Data rasio rumah sakit per dan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 4.16.

Tabel 4. 16 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Rumah Sakit	unit	22	21	18	17	20
Jumlah penduduk	jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
Rasio Rumah Sakit per Penduduk	Jiwa/unit	19435,95	19364,76	22996,44	24087,47	20564,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan Tabel 4.10, rasio jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang dilayani dalam satu rumah sakit meningkat. Pada tahun 2012, satu rumah sakit melayani kurang lebih 19435 jiwa. Jumlah tersebut cenderung stagnan di tahun 2013. Di tahun 2014, jumlah tersebut meningkat menjadi 22996 jiwa dalam satu rumah sakit. Jumlah tersebut kembali naik di tahun 2015 menjadi 24087 jiwa. Di tahun 2016, jumlah penduduk yang dilayani di satu rumah sakit turun menjadi 20564 jiwa per rumah sakit.

B. Tenaga Medis

• Dokter

Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta akan menghasilkan rasio. Tabel 4.17 menunjukkan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 dapat dilihat di bawah ini.

Rasio dokter terhadap penduduk dalam kurun waktu 2012-2016 cukup fluktuatif. Pada tahun 2012, satu dokter melayani kurang lebih 436 jiwa. Jumlah tersebut naik drastis di tahun 2013 menjadi kurang lebih 656 jiwa. Selanjutnya menurun menjadi 286 jiwa di tahun 2014 dan 225 di tahun 2015. Penurunan rasio ini disebabkan karena meningkatnya jumlah dokter yang ada di Kota Yogyakarta. Di tahun 2016, rasio tersebut kembali naik dimana satu dokter melayani 510 orang seiring dengan menurunnya jumlah dokter di Kota Yogyakarta.

Tabel 4.17 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Dokter	dokter	980	619	1.444	1.815	806
Jumlah penduduk	jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
Rasio dokter per satuan penduduk	jiwa/dokter	436,31	656,96	286,65	225,61	510,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

- **Rasio Perawat dan Bidan Per Satuan Penduduk**

Perawat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Berdasarkan proses penghitungan, dalam kurun waktu 2012-2016, rasio perawat per satuan penduduk bersifat fluktuatif Pada tahun 2012, satu perawat melayani kurang lebih 506,62 jiwa. Di tahun 2013, beban pelayanan tersebut menurun menjadi 419,24 jiwa. Namun di tahun 2014, rasio tersebut kembali naik menjadi 679,70 orang per satu perawat. Seiring dengan meningkatnya jumlah perawat, rasio tersebut turun menjadi 495,15 di tahun 2015. Di tahun 2016, rasio perawat turun signifikan menjadi 187,63 jiwa per satu perawat.

Tabel 4. 18 Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perawat	perawat	844	970	609	827	2.192
Jumlah Penduduk	jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
Rasio perawat per satuan penduduk	Jiwa/perawat	506,62	419,24	679,70	495,15	187,63

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Merujuk pada Ikatan Bidan Indonesia (2006), definisi bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat dengan jumlah bidan. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio bidan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 menurun.

Pada tahun 2012, satu bidan melayani 1411,19 jiwa. Jumlah tersebut menurun secara konstan hingga tahun 2016. Di Tahun 2016, rasio bidan terhadap penduduk adalah 1380,14 jiwa per bidan.

Tabel 4. 19 Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Bidan	bidan	303	309	310	307	298
Jumlah Penduduk	jiwa	427.591	406.660	413.936	409.487	411.282
Rasio bidan per satuan penduduk	jiwa/bidan	1411,19	1316,05	1335,28	1333,83	1380,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Keberadaan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta secara umum sudah memadai atau sudah mampu melayani seluruh penduduk Kota Yogyakarta, baik yang pelayanan kesehatan yang langsung pada masyarakat (posyandu, puskesmas, maupun klinik-klinik keluarga) hingga tingkat regional (rumah sakit). Bahkan jika dihitung dari jumlahnya (kuantitas), fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini di Kota Yogyakarta menurut SNI 03-1733-2004 yang berisi kebutuhan sarana/fasilitas pelayanan kesehatan minimum di perkotaan, maka jumlah fasilitas pelayanan di Kota Yogyakarta sudah menunjukkan angka di atas kebutuhan. Dengan kata lain Kota Yogyakarta sudah kelebihan jumlah fasilitas pelayanan, sehingga perlu diperhatikan jika masih akan terjadi penambahan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta. Hal ini tentunya berimplikasi pada jumlah tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta yang bertambah mengikuti jumlah fasilitas kesehatan. Karena setiap fasilitas kesehatan akan membutuhkan tenaga medis maupun non medis untuk kelangsungan pelayanan kesehatan di setiap jenis fasilitas kesehatan. Dengan demikian jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Kota Yogyakarta sudah lebih dari cukup, sehingga hanya perlu mengoptimalkan sumberdaya kesehatan yang ada saat ini.

4.2.1.2 Peningkatan Status Gizi

Prevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Penurunan status gizi buruk Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan pemberian vitamin, makanan pendamping, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian gizi diawali saat hamil sampai usia sekolah. Data status gizi penduduk Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.20. Status

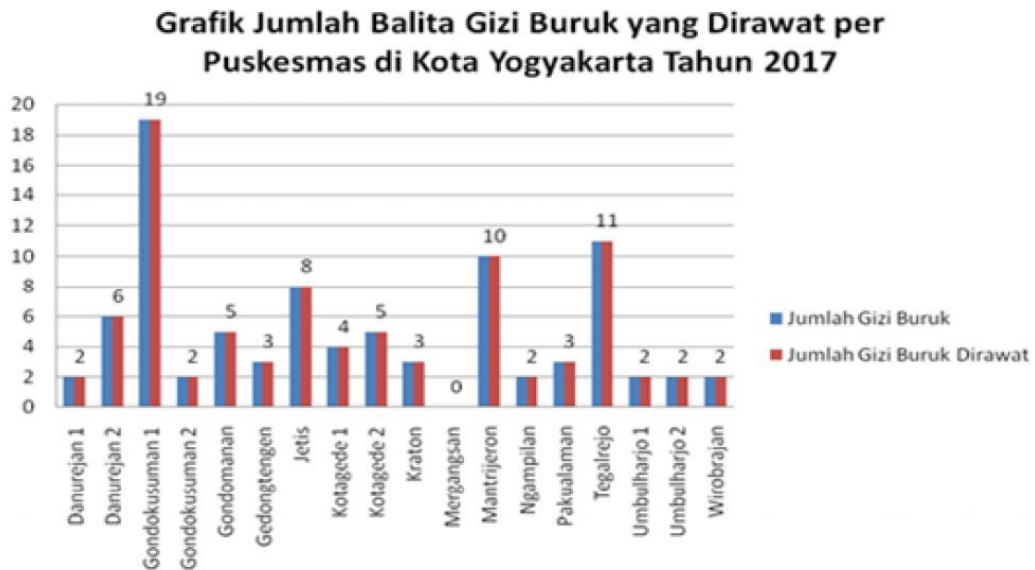
Tabel 4. 20 Status Gizi Balita (PSG) di Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017

Status gizi	Tahun (dalam persen)		
	2015	2016	2017
Gizi lebih	4.08	4.3	4.05
Gizi baik	88.02	86.59	88
Gizi kurang	7.24	8.17	7.6
Gizi buruk	0.69	0.94	0.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

gizi baik di Kota Yogyakarta dari tahun 2015–2017 sudah mencapai angka yang cukup baik sebesar 88 persen. Artinya 88 persen penduduk di Kota Yogyakarta sudah memiliki gizi yang baik. Meskipun sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta berada pada status gizi baik, terdapat penduduk yang masih harus dilakukan penanganan gizi buruk. Tabel 4.20 tersebut menunjukan banyaknya jumlah pasien gizi buruk yang harus dirawat di puskesmas maupun yang tidak pada tahun 2017. Puskesmas Gondokusuman 1 memiliki jumlah gizi buruk yang paling tinggi dibandingkan dengan puskesmas yang lain. Akan tetapi, jumlah ini merupakan jumlah per-kejadian. Sehingga data

yang ditampilkan adalah data penanganan kejadian pada setiap puskesmas terhadap gizi buruk.



Gambar 4. 2 Jumlah Balita Gizi Buruk per Puskesmas Tahun 2017

Sumber: BPS Kota Yogyakarta

Menurut distribusi jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kota Yogyakarta, maka dapat diketahui kecamatan yang memiliki jumlah balita gizi buruk berada di Kecamatan Gondokusuman, dengan jumlah 21 balita. Berdasarkan data tersebut, maka perlu perhatian khusus di Kecamatan Gondokusuman terkait banyaknya jumlah balita yang berstatus gizi buruk paling banyak di Kota Yogyakarta. Sedangkan kecamatan yang tidak memiliki balita dengan status gizi buruk berada di Kecamatan Mergangsan. Capaian ini tentunya perlu dipertahankan agar kasus gizi buruk pada balita bisa terus ditekan. Selain gizi buruk, potensi peningkatan gizi berlebih juga terlihat yang ditunjukkan dari presentase gizi berlebih yang stagnan di nilai empat persen.

Pada tahun 2013-2017 prevalensi balita pendek dan sangat pendek di Kota Yogyakarta cukup fluktuatif, namun prevalensi balita pendek cenderung mengalami kenaikan sehingga perlu adanya peningkatan upaya pencegahan yang dimulai dari penanganan gizi remaja, calon pengantin, dan ibu hamil. Kasus gizi lebih di Kota Yogyakarta juga perlu diperhatikan, hal ini berkaitan pula dengan balita gemuk. Target balita gemuk di tingkat nasional yaitu < 5 %, sedangkan prevalensi balita gemuk di Kota Yogyakarta sudah melebihi ambang batas sehingga balita gemuk termasuk masalah gizi masyarakat di Kota Yogyakarta. Salah satu upaya yang dapat dijadikan perhatian untuk menurunkan angka balita gizi buruk yaitu Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) kepada anak Bawah Dua Tahun (Baduta) dari keluarga miskin. Walaupun pemberian MP-ASI kepada baduta gakin tidak menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program Gizi, upaya

tersebut dapat membantu mengurangi angka kejadian gizi buruk di Kota Yogyakarta.

4.2.1.3 Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

A. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Peningkatan kualitas kesehatan di suatu wilayah dapat ditandai dengan berkurangnya kasus penyebaran penyakit menular. Data Dinas Kesehatan pada tahun 2015–2017 (Tabel 4.21) terdapat kasus diare dengan jumlah masing-masing 11.669 kasus tahun 2015, 10892 kasus ditahun 2016, dan 9299 kasus di tahun 2017. Tren kasus keberadaan penyakit menular dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini disebabkan karena meningkatnya fasilitas kesehatan dan tereduasinya masyarakat mengenai cara hidup sehat. Pola hidup sehat penduduk Kota Yogyakarta dapat tercermin dari tercapainya 100 persen keberadaan sanitasi sehat di semua kecamatan dan 98,16 persen penduduk sudah memiliki akses terhadap air minum layak.

Tabel 4. 21 Kasus Penyakit Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017

Jenis penyakit	Keterangan	2015	2016	2017
TB Paru	TB BTA + (per 100000 penduduk)	52,02	55,68	61,3
	Penemuan kasus baru TB BTA +	213	229	253
	Penemuan kasus semua tipe PWS		594	550
	Pasien TB resisten obat (diobati)		2	4
	Pasien TB resisten obat (belum diobati)		2	
	Pasien TB resisten obat (sembuh/selesai)		2	
	Pasien TB resisten obat (meninggal)	2	2	1
	Angka kesembuhan (target 90)	76,17	77,16	75,63
	Angka keberhasilan pengobatan (target 90)	85,28	84,68	83,51
Pneumonia	Penemuan kasus	396	760	823
Kasus HIV/AIDS	Penemuan kasus HIV	59	168	157
Kasus diare ditangani	Penemuan kasus	11669	10892	9299
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah penderita	943	1690	414
	Penderita meninggal	11	7	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta,2018

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA mencapai 124,37%, tetapi di tahun 2013 turun menjadi 100%. Tahun 2014, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA meningkat menjadi 164,62%, tetapi turun

lagi di tahun 2015 menjadi 133,96%, dan kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 140,84%. Selama tahun 2012-2016, rata-rata pertumbuhan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati yaitu 10,78% per tahun. Selama 5 tahun terakhir, penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati tersebut lebih banyak dari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA per tahunnya.

Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 sudah mampu melampauinya. Akan tetapi, tetap diperlukan penanganan yang maksimal agar jumlah penderita TBC BTA tidak meningkat di masa mendatang. Untuk penanganan sejak dini kasus TBC di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit se-Kota Yogyakarta, dokter praktik dan Kelompok Aisyah. Melalui jaringan tersebut, warga yang ditemukan sakit dengan gejala batuk selama 3 minggu dan tidak sembuh, maka akan didampingi untuk melakukan pemeriksaan BTA (Basil Tahan Asam). Apabila ditemukan kasus TBC positif, maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut.

Tabel 4. 22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	124,37	100	164,62	133,96	140,84
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Profil Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Cara menghitung cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah dengan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi kasus dalam kurun 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan jumlah penderita DBD di Kota Yogyakarta per tahunnya cukup tinggi, yaitu sebesar 45,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan demam berdarah di lingkungan perkotaan belum berjalan dengan optimal.

DBD merupakan penyakit serius yang harus diberantas dan dicegah. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan *surveilans* penyakit dan *surveilans vector*, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metode yang tepat guna mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) dan menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk *Aedes* berkembang biak. Diharapkan dengan rutin melakukan kegiatan tersebut dapat menekan jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan jumlah kejadian kasus penyakit menular dan tidak menular di Kota Yogyakarta yang fluktuatif, maka upaya pencegahan terhadap penyakit menular dan tidak menular perlu dijadikan prioritas. Salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan terhadap penyakit tidak menular (PTM) melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau keluarga. peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Beberapa faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kelompok PTM Utama adalah diabetes melitus (DM), kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Terkait dengan beberapa kasus kesehatan di Kota Yogyakarta yang memerlukan percepatan penanganan salah satunya adalah kejadian luar biasa (KLB) yang bisa berdampak pada morbiditas. Pada tahun 2017 keracunan makanan menjadi kasus yang paling sering menjadi KLB di Kota Yogyakarta. Dalam setahun ini kasus tertinggi selanjutnya adalah HFMD Klinis sebanyak 6 (enam) kali, varicella klinis sebanyak 5 (lima) kali, disusul rubella, campak dan tetanus masing-masing sebanyak 4 (empat) kali. Terdapat pula rubella klinis dan parotitis klinis sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya di urutan terakhir masing-masing dengan frekuensi kejadian 1 (satu) kali dilaporkan KLB campak klinis, mix campak rubella, anthraks klinis, diare, dan penyakit yang belum diketahui. Menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dalam sistem pelaporan KLB di Kota Yogyakarta masih terdapat banyak kekurangan, salah satunya adalah tidak adanya data besarnya populasi beresiko dalam setiap kejadian. Permasalahan lain adalah adanya kejadian yang memenuhi kriteria KLB yang tidak dilaporkan ke Puskesmas sehingga tidak masuk dalam pelaporan STP KLB.

B. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta

Data persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta bersumber dari data PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Indikator ini

merupakan parameter sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, yaitu dengan membandingkan antara jumlah rumah pengguna air bersih (unit) dengan jumlah seluruh rumah (unit) dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 4. 23 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah pengguna air bersih melalui PDAM	Unit	30.349	30.426	30.382	30.463	29.954
Jumlah seluruh rumah	Unit	87.707	94.092	92.965	92.965	92.965
Persentase rumah pengguna PDAM	%	34,60	32,34	32,68	32,77	32,22

Sumber: PDAM Tirtamarta Tahun 2016

Persentase rumah pengguna air bersih dengan sumber PDAM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung fluktuatif. Di tahun 2012, sebanyak 34,60% rumah memperoleh air bersih dari sumber PDAM, sedangkan di tahun 2016 menurun menjadi 32,22%. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa banyak rumah di Kota Yogyakarta yang telah mendapatkan akses air bersih menggunakan sumber lainnya, seperti air tanah dan sumur.

Menurut hasil uji kualitas air dan pemantauan oleh PDAM, saat ini sumber air bersih yang terbaik bersumber dari PDAM, baik untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil sosialisasi survei kualitas air yang dilakukan BPS pada tahun 2015, kondisi air minum di DIY cukup memprihatinkan, di atas 85% sumber air (layak minum dan tidak layak minum) tercemar bakteri E.coli. Tingginya persentase sumber air masyarakat sehari-hari yang tidak memenuhi baku mutu untuk parameter biologi perlu mendapatkan perhatian khusus. Tingginya jumlah bakteri koli baik koli tinja maupun total koli dalam air sumur dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat pengguna sumber air tersebut. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh Eschericia coli adalah diare. Penemuan tingginya kasus diare sebagai kasus penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta (9.299 kasus), bisa jadi dikarenakan oleh konsumsi air bersih yang tercemar bakteri. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh air bersih yang akan dikonsumsi adalah dengan merebus air yang akan digunakan sebagai air minum hingga benar-benar mendidih, sehingga bakteri patogen yang ada di dalamnya mati.

Beredarnya bisnis air bersih dan siap konsumsi di Kota Yogyakarta juga perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini mempertimbangkan banyaknya kasus kesehatan yang disinyalir dari konsumsi air bersih dan bisnis air minum (kemasan atau isi ulang). Oleh karena itu perlu adanya pemantauan terhadap air minum yang beredar (dibisniskan) dan dikonsumsi oleh masyarakat, baik air kemasan maupun peralatan untuk mengolah air bersih. Pengecekan dan

pemantauan kualitas air untuk kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta perlu dilakukan secara periodik dan terjadwal.

C. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kebidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Indikator persentase rumah tinggal bersanitasi memberikan gambaran kondisi sanitasi pada skala individu (rumah tangga). Persentase rumah tinggal bersanitasi dapat dihitung dari jumlah rumah berakses sanitasi dibandingkan dengan jumlah rumah tinggal dalam persen.

Persentase rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Yogyakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,24% per tahun. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat upaya yang cukup baik dalam memberikan pelayanan kebutuhan pokok minimal di Kota Yogyakarta.

Tabel 4. 24 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah rumah berakses sanitasi	Unit	72.350	73.449	75.571	76.534	79.973
Jumlah rumah tinggal	Unit	82.188	82.398	82.411	82.713	83.158
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,03	89,14	91,70	92,53	96,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

4.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Pendidikan

4.2.2.1 Akses Penduduk terhadap Pendidikan

Peningkatan Pendidikan merupakan salah satu indikator tercapainya peningkatan kualitas penduduk. Sistem pendidikan mengatur seluruh komponen yang saling terkait untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompetensi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi daerah. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas sumber daya manusia. Kota Yogyakarta adalah kota pendidikan, kota ini memiliki banyak pilihan untuk menempuh pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Begitu banyaknya

pilihan pendidikan di Kota Yogyakarta menjadikan kota ini sebagai kota tujuan untuk menempuh pendidikan.

Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pendidikan memiliki konsekuensi untuk menyediakan jasa pendidikan yang lebih baik. Pendidikan dapat dimulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan perguruan tinggi. Keberhasilan dan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Jumlah Sekolah, dan ratio antara jumlah murid dan guru.

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui lamanya sekolah anak-anak Kota Yogyakarta. Berdasarkan Tabel 4.25 Rata-Rata Lama Sekolah anak-anak yang pada tahun 2016 berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan selama 16,81 tahun, atau setara dengan pendidikan SLTA. Angka ini naik dibandingkan tahun 2014 selama 15,97 tahun dan 2015 selama 16,32 tahun. Salah satu faktor naiknya angka rata-rata lama sekolah adalah kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan sudah tinggi disamping mudahnya akses masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi. Meskipun demikian, angka rata-rata lama sekolah (MYS) penduduk dalam menjalani pendidikan formal di Kota Yogyakarta masih dibawah angka harapan lamanya sekolah (EYS). Rata-rata lama sekolah (MYS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 masih sebesar 11,42 atau lebih kecil 3,3 dibandingkan harapan lamanya sekolah (EYS). Dengan demikian perlu adanya upaya untuk menselaraskan antara harapan lamanya sekolah dengan rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Yogyakarta. Selain akses yang mudah bagi penduduk di Kota Yogyakarta untuk memperoleh pendidikan yang layak, perlu diberikan juga pemahaman terhadap penduduk akan pentingnya pendidikan guna peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 4. 25 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2014 -2016

Keterangan	2014	2015	2016
EYS	15,97	16,32	16,81
MYS	11,39	11,41	11,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Indikasi baiknya kualitas penduduk salah satunya dapat dilihat dari besarnya angka partisipasi sekolah (APS). APS merupakan proporsi anak yang bersekolah pada kelompok usia sekolah jenjang tertentu. Semakin mendekati angka 100 maka pencapaian partisipasi sekolah semakin baik. Terlihat dalam Tabel

4.20. Anak usia 7–12 tahun berada pada jenjang Sekolah Dasar memiliki nilai 100 persen, artinya pada anak usia 7-12 tahun sudah 100% bersekolah. Sama halnya dengan anak usia 13-15 tahun yang berada pada jejang sekolah menengah pertama, ditahun 2015 dan 2016 sudah mencapai angka 100 persen.

Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 16–18 tahun berada pada jenjang SMA di tahun 2014 berada di angka 88,87 persen, kemudian ditahun 2015 naik menjadi 92,16 persen, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 86,17 persen. Rendahnya nilai APS juga ditunjukkan untuk kelompok umur 19–24 tahun yang berada pada jenjang perguruan tinggi hanya mencapai rata-rata 67 persen dari tahun 2014–2016.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya nilai APS. Nilai APS yang rendah dipengaruhi oleh kualitas sekolah dan psikologi anak. Ada beberapa anak yang memang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja atau menikah. Secara umum, Kota Yogyakarta memiliki nilai APS yang tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat digunakan untuk melihat kondisi pendidikan suatu wilayah. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu.

Kota Yogyakarta memiliki kualitas pendidikan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari tingginya nilai APM dan APK yang melebihi 100 persen pada setiap jenjang sekolah. Pada jenjang SD/MI dan SMA/SMK/MA, APK memiliki kecenderungan menurun meskipun hanya kecil, dengan pertumbuhan negatif 3,39 persen per tahun untuk APK SD/MI dan 0,75 persen per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada APM SD/MI yang cenderung menurun sangat kecil, sebesar 0,02 persen per tahun. Sementara itu, APK SMP/MTs dan APM SMP/MTs serta SMA/SMK/MA mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kota Yogyakarta memiliki angka mengulang dan angka putus sekolah yang rendah dari tahun ke tahun. Adapun keterangan dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4. 26 Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Usia	2014	2015	2016
7-12 Tahun	100,00	100,00	100,00
13-15 Tahun	99,52	100,00	100,00
16-18 Tahun	88,87	92,16	86,17
19–24 Tahun	65,53	69,35	65,38

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Tabel 4. 27 APM, APK, Angka Mengulang, dan Angka Putus Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2016–2017

KETERANGAN	2015/2016			2016/2017		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Angka Mengulang (AU)	1,17%	0,16%	0,17%	1,20%	0.25%	0.26%
Angka Putus Sekolah (APS)	0,004%	0,001%	0,001%	0,01%	0.01%	0.04%
Angka Partisipasi Murni (APM)	129,00%	106,00%	117,00%	128,98%	112.16%	124.02%
Angka Partisipasi Kasar (APK)	146,00%	147,00%	170,00%	142,61%	149.61%	169.25%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari rasio guru dan murid. Rasio guru dan murid digunakan untuk mengetahui beban guru dalam melayani murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru dan murid di Kota Yogyakarta sudah cukup yang berarti sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta tidak kekurangan murid maupun guru. Berdasarkan Tabel 4.28 satu SD dapat menampung 265 siswa, SMP menampung 377 siswa, dan SMA menampung 466 siswa. Perbandingan siswa perkelas untuk SD, SMP, dan SMA masing-masing 1:25, 1:29, dan 1:27. Sedangkan untuk rasio guru dan murid di SD, SMP, dan SMA masing-masing sebesar 1:15, 1:13, dan 1:11.

Tabel 4. 28 Rasio Siswa di Kota Yogyakarta Tahun 2017

Rasio	SD	SMP	SMA
Siswa/sekolah	263.43	377.46	465.87
Siswa/kelas	25.70	29.96	27.65
Siswa/guru	15.79	13.86	11.08

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2017

4.2.2.3 Pendidikan Gender

Kesenjangan pendidikan gender menjadi salah satu isu kesetaraan akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Paradigma lama yang menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh mengakses pendidikan tinggi semakin lama menjadi hilang. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.29. jumlah persentase perempuan yang dapat mengakses pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi tidak jauh berbeda dengan laki-laki, bahkan cenderung lebih banyak. Dengan kata lain, akses perempuan di Kota Yogyakarta dalam memperoleh pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sudah baik. Pada tingkat perguruan tinggi (S1/S2/S3) tingginya jumlah akses perempuan yang bersekolah di Kota Yogyakarta sebesar 15,41 persen, angka tersebut belum menunjukkan banyaknya penduduk asli Kota Yogyakarta yang menempuh tingkat pendidikan perguruan tinggi, karena pada tingkat perguruan tinggi banyak pendatang yang bersekolah di Kota Yogyakarta.

Tabel 4. 29 Presentase Akses Pendidikan Gender Berdasarkan Jenis Pendidikan

Jenis Pendidikan	Total (%)	Laki-laki	Perempuan
		(%)	(%)
Belum Tamat SD	8,23	7,16	9,24
SD/MI/Sederajat	20,02	17,95	21,95
SLTP/MTS/ Sederajat	11,54	12,75	10,41
SLTA/Sederajat	41,63	45,72	37,9
Diploma I/II	1,00	0,4	1,56
Akademi	3,28	2,88	3,64
S1/S2/S3	14,3	13,14	15,41

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2017

Pendidikan di Kota Yogyakarta secara umum sudah baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta adalah:

- a) Perlu sinergisitas antara angka rata-rata lama sekolah (MYS) dan angka harapan lamanya sekolah (EYS). Angka MYS penduduk dalam menjalani pendidikan formal di Kota Yogyakarta masih di bawah EYS. Gap antara MYS dan EYS di Kota Yogyakarta rata-rata sebesar 5 tahun. Hal ini menunjukkan antara harapan lama sekolah dengan kondisi real/kenyataan rata-rata lama sekolah belum sesuai.
- b) Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2016-2017 pada SMA meningkat dari 0,001% menjadi 0,04. Kenaikan ini cukup mengkhawatirkan jika tidak segera ditangani. Naiknya APS di Kota Yogyakarta ini bisa berkaitan dengan minat dan akses penduduk terhadap jenjang pendidikan SMA.
- c) Angka partisipasi sekolah penduduk pada umur 16-18 tahun di Kota Yogyakarta masih berada pada angka 86% - 92%, hal ini cukup bertentangan dengan angka partisipasi murni yang memiliki rata-rata untuk semua penduduk di usia pendidikan SD-SMA di atas 100%.

4.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Ekonomi adalah hal yang sangat vital dalam pembangunan suatu wilayah. perkembangan suatu wilayah tergerak melalui keadaan perekonomian yang diupayakan oleh segenap aktivitas masyarakat. Aktor perkembangan suatu wilayah yang dalam hal ini kependudukan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga seperti apa kualitas kependudukan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan perekonomian suatu wilayah.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, fungsi ketujuh dari delapan fungsi keluarga ialah fungsi ekonomi, yakni serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi

kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Total PDRB Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu pula dengan total PDRB di DIY. Persentase kontribusi PDRB Kota Yogyakarta terhadap PDRB DIY terus meningkat, yaitu sekitar 26 persen. Sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kota Yogyakarta, sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor pertambangan dan penggalian. Tabel 4.24. menunjukkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.

4.2.3.1 PDRB Kota Yogyakarta

Berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2016, sektor informasi dan komunikasi memiliki kontribusi paling tinggi, yaitu 13,57 persen. Selanjutnya disusul sektor industri pengolahan (13,37 persen) serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (11,59 persen). Ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan dalam memberikan kontribusi sumbangan pada nilai PDRB Kota Yogyakarta. Tiga sektor yang memiliki kontribusi paling rendah pada PDRB Kota Yogyakarta yaitu pertambangan dan penggalian (0,004 persen); pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,15 persen); serta pertanian, kehutanan dan perikanan (0,16 persen). Selengkapnya mengenai besaran kontribusi asing-masing sektor terhadap PDRB Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Pertumbuhan rata-rata PDRB Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 menunjukkan nilai yang positif untuk masing-masing sektor, hal ini berarti secara umum terdapat peningkatan nilai PDRB pada masing-masing sektor dari tahun ke tahun. Pertumbuhan rata-rata PDRB per tahun Kota Yogyakarta yaitu 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB per tahun DIY (5,20 persen). Menurut sektor, rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu pengadaan listrik dan gas (7,33 persen); selanjutnya yaitu jasa keuangan dan asuransi (6,95 persen) serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (6,65 persen). Hal tersebut menunjukkan kecenderungan sektor jasa yang semakin meningkat. Sektor informasi dan komunikasi sebagai sektor unggulan juga memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB di atas rata-rata Kota Yogyakarta, yaitu 6,53 persen. Sementara itu, pertumbuhan paling rendah pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,51 persen) serta sektor pertambangan dan penggalian (0,60). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga termasuk memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB yang rendah dibandingkan sektor lainnya (2,78 persen).

Tabel 4. 30 PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)					Kontribusi 2016 (%)
		2012	2013	2014*	2015**	2016	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35.709,06	36.100,01	35.733,80	36.052,73	36.377,25	0,155
B	Pertambangan dan Penggalian	837,12	839,01	850,01	851,20	856,14	0,004
C	Industri Pengolahan	2.630.976,55	2.813.952,74	2.943.904,47	2.996.573,36	3.123.936,80	13,272
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45.056,66	47.598,97	50.700,55	51.794,65	58.012,78	0,246
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.166,76	30.711,95	31.963,43	32.797,84	33.527,34	0,142
F	Konstruksi	1.526.571,76	1.600.097,49	1.674.189,00	1.722.508,07	1.783.818,87	7,578
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.326.260,65	1.407.238,62	1.480.894,06	1.569.644,79	1.656.673,72	7,038
H	Transportasi dan Pergudangan	785.335,19	815.841,32	838.086,92	870.914,46	895.462,92	3,804
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.183.269,65	2.320.365,42	2.444.064,84	2.589.749,81	2.740.135,53	11,641
J	Informasi dan Komunikasi	2.654.507,77	2.779.291,38	2.898.953,30	3.035.921,59	3.280.050,08	13,935
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.077.853,46	1.196.258,93	1.273.749,79	1.374.111,34	1.446.289,76	6,144
L	Real Estate	1.782.655,30	1.848.546,31	1.972.048,79	2.074.601,90	2.167.878,81	9,210
M,N	Jasa Perusahaan	238.288,91	245.485,72	259.521,02	278.211,87	285.922,72	1,215
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.729.732,87	1.813.729,60	1.914.203,73	2.021.480,12	2.139.899,80	9,091
P	Jasa Pendidikan	1.889.249,14	1.960.166,16	2.088.605,79	2.235.519,73	2.313.155,32	9,827
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	721.038,85	766.206,62	818.611,50	879.118,73	920.126,76	3,909
S,T,U	Jasa Lainnya	531.565,10	557.127,40	581.682,55	623.162,34	655.987,18	2,787
	PDRB Kota Yogyakarta ADHK	19.189.074,78	19.189.074,78	20.239.557,65	21.307.763,56	22.393.014,53	
	PDRB Provinsi DIY ADHK	71.702.449,00	71.702.449,00	75.627.450,00	79.536.000,00	83.474.000,00	

Keterangan:

*) sementara

**) sangat sementara

Sumber:

1. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2017
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2017

Berdasarkan pertumbuhan PDRB per tahun, beberapa sektor mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sektor industri pengolahan pada tahun 2012 (-2,87 persen); serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2014 (-1,01 persen). Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika per tahun pada masing-masing sektor. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa mulai mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan dimulai dari tahun 2012. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2012–2016 didominasi oleh sektor-sektor tersier. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, sektor primer menjadi sektor

dengan kontribusi terendah di Kota Yogyakarta disebabkan semakin minimnya lahan pertanian maupun perikanan, yang semakin banyak dikonversi menjadi lahan terbangun. Pertumbuhan PDRB di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 4.31. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa PDRB Kota Yogyakarta semakin meningkat, meskipun dengan pertumbuhan per tahun yang relatif menurun sejak tahun 2013, sementara peningkatan pertumbuhan terjadi dari tahun 2012 ke tahun 2013, serta pada 2015–2016

Tabel 4. 31 Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata Pertum- buan PDRB per Tahun (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,66	1,09	-1,01	0,89	0,90	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,23	1,31	0,14	0,58	0,60
C	Industri Pengolahan	-2,87	6,95	4,62	1,79	4,25	2,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,32	5,64	6,52	2,16	12,01	7,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	1,81	4,07	2,61	2,22	2,78
F	Konstruksi	4,70	4,82	4,63	2,89	3,56	4,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	6,11	5,23	5,99	5,54	5,84
H	Transportasi dan Pergudangan	1,75	3,88	2,73	3,92	2,82	3,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6,28	5,33	5,96	5,81	6,11
J	Informasi dan Komunikasi	10,89	4,70	4,31	4,72	8,04	6,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,16	10,99	6,48	7,88	5,25	6,95
L	Real Estate	7,39	3,70	6,68	5,20	4,50	5,49
M,N	Jasa Perusahaan	8,95	3,02	5,72	7,20	2,77	5,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,27	4,86	5,54	5,60	5,86	5,83
P	Jasa Pendidikan	5,81	3,75	6,55	7,03	3,47	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	6,26	6,84	7,39	4,66	6,65
S,T,U	Jasa Lainnya	5,33	4,81	4,41	7,13	5,27	5,39
	Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta	5,40	5,40	5,47	5,28	5,11	5,27
	Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY	5,37	5,37	5,47	5,17	5,05	5,20

Sumber:

1. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2016
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016

4.2.3.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat dipakai sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Yogyakarta sebesar 56,35 juta rupiah; sementara PDRB per kapita DIY sebesar 23,57 juta rupiah (41,82 persen dari Kota Yogyakarta).

Tabel 4.32 PDRB ADHK per Kapita menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
		2012	2013	2014	2015	2016	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,091	0,090	0,089	0,087	0,087	-0,991
B	Pertambangan dan Penggalian	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-0,881
C	Industri Pengolahan	6,677	6,988	7,351	7,261	7,478	2,903
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,114	0,118	0,127	0,126	0,139	5,064
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,077	0,076	0,080	0,079	0,080	1,206
F	Konstruksi	3,874	3,974	4,181	4,174	4,270	2,479
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,366	3,495	3,698	3,803	3,966	4,190
H	Transportasi dan Pergudangan	1,993	2,026	2,093	2,110	2,144	1,839
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,541	5,762	6,103	6,275	6,559	4,314
J	Informasi dan Komunikasi	6,737	6,902	7,239	7,356	7,852	3,922
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,736	2,971	3,181	3,330	3,462	6,081
L	Real Estate	4,524	4,591	4,924	5,027	5,189	3,513
M,N	Jasa Perusahaan	0,605	0,610	0,648	0,674	0,684	3,165
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,390	4,504	4,780	4,898	5,123	3,944
P	Jasa Pendidikan	4,795	4,868	5,215	5,417	5,537	3,687
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,830	1,903	2,044	2,130	2,203	4,754
S,T,U	Jasa Lainnya	1,349	1,384	1,453	1,510	1,570	3,872
	PDRB per Kapita Kota Yogyakarta ADHK	48,702	50,262	53,207	54,259	56,346	3,722
	PDRB per Kapita Provinsi DIY ADHK	20,184	21,038	21,868	22,688	23,566	3,949

Sumber:

1. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2016
2. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2016

Berdasarkan data tahun 2016, PDRB per kapita Kota Yogyakarta tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi (13,94 persen); selanjutnya yaitu sektor industri pengolahan (13,27 persen), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (11,64 persen). Tiga sektor dengan kontribusi terendah pada PDRB per kapita yaitu sektor pertambangan dan penggalian (0,004 persen); sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (0,142 persen); serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,154 persen).

Tabel 4.33 menunjukkan besaran PDRB per kapita dan pertumbuhan rata-rata per tahun. Secara umum, pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB per kapita Kota Yogyakarta yaitu 3,72 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan DIY yang memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun PDRB per kapita sebesar 3,95 persen. Masing-masing sektor memiliki perkembangan PDRB per kapita yang berbeda-beda. Pertumbuhan rata-rata paling tinggi dimiliki sektor jasa keuangan dan asuransi (6,08 persen); selanjutnya yaitu sektor pengadaan listrik dan gas (5,06 persen) serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (4,75 persen). Pertumbuhan rata-rata paling rendah dimiliki oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (-0,99 persen) serta pertambangan dan penggalian (-0,88 persen). Kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan PDRB per kapita negatif, yang berarti nilai PDRB per kapita terus menurun. Sementara itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain, yaitu sebesar 1,21 persen per tahun. Sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan nilai PDRB per kapita yang rendah menunjukkan pertumbuhan nilai PDRB yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan nilai PDRB yang jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel 4. 33 Presentase Penduduk Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)	Kontribusi Sektor (%)	Pertumbuhan PDRB (%)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	399	0,19	0,155	0,51
Pertambangan dan Penggalian	929	0,44	0,004	0,6
Industri Pengolahan	26864	12,61	13,272	2,95
Listrik, Gas dan Air	792	0,37	0,246	7,33
Bangunan	6391	3,00	7,578	4,12
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel**	92786	43,55	18,679	5,84
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi**	12589	5,91	17,739	9,55
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan**	12635	5,93	15,354	12,44
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan perorangan**	59666	28,01	16,523	17,37

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2018 **) akumulatif dari beberapa sektor PDRB terkait

Tabel 4.27 menunjukkan presentase penduduk menurut pekerjaan utama tahun 2017, kontribusi sektor serta pertumbuhan sektor. Presentase penduduk dan kontribusi sektor merupakan hal yang berkaitan, terutama untuk melihat keefektifan sektor dalam mendukung perekonomian wilayah. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel merupakan sektor dengan kontribusi PDRB terbesar yakni 18,679 %, presentase penduduk yang bekerja di sektor inipun terbesar dibandingkan kelompok lapangan pekerjaan utama lainnya. Hampir 44 % penduduk Kota Yogyakarta beserta di sektor ini. Meskipun memiliki presentase pekerja dan kontribusi sektor terbesar, akan tetapi pertumbuhan sektor ini hanya 5,84 % pertahun. Nilai ini lebih rendah dari pada pertumbuhan sektor listrik gas dan air; sektor angkutan pergudangan dan komunikasi serta sektor jasa.

a. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- a) Indeks Gini < 0,3 = ketimpangan rendah
- b) $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$ = ketimpangan sedang (moderat)
- c) Indeks Gini > 0,5 = ketimpangan tinggi

Tabel 4. 34 Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
Indeks Gini	0,3603	0,4366	0,3959	0,4431	NA	7,14
Kriteria Ketimpangan	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	NA	

Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2013–2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2014–2016)

Tabel 4.34 menunjukkan perkembangan Indeks Gini Kota Yogyakarta tahun 2012–2015. Berdasarkan nilai Indeks Gini, Kota Yogyakarta memiliki kriteria ketimpangan sedang (moderat) pada tahun 2012–2015. Indeks gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012–2015 secara umum mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7, 14 persen per tahun.

Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkatnya Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa semakin terjadi ketimpangan pendapatan penduduk, dimana peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20 persen teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40 persen terbawah. Meskipun demikian, berdasarkan kategori ketimpangan pendapatannya, Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori ketimpangan sedang (moderat).

b. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Yogyakarta yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2012, garis kemiskinan Kota Yogyakarta setara Rp. 333.232/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2013 setara Rp Rp 353.602/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 366.520/kapita/bulan pada tahun 2014. Kota Yogyakarta memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan pada tingkat DIY. Selama rentang tahun 2012–2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan 0,46 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin yang semakin menurun. Pada tahun 2012, penduduk miskin sebesar 9,38 persen, terus berkurang menjadi 8,82 persen pada tahun 2013 dan 8,67 persen pada tahun 2014. Persentase jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2016 menjadi 7,70 persen, sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 8,61 persen. Pada tahun 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 92,30 persen. Tabel 4.35 menunjukkan data garis kemiskinan, penduduk miskin, dan penduduk di atas garis kemiskinan Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tingkat DIY.

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan pada tingkat DIY. Hal tersebut juga mengindikasikan persentase jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan DIY. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan DIY juga menunjukkan tren

yang positif, berarti persentase penduduk miskin semakin menurun. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta sudah banyak berhasil, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang kehendaki. Peningkatan persentase penduduk miskin pada tahun terakhir juga menunjukkan fluktuasi, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta perlu dievaluasi dan dioptimalkan.

Tabel 4. 35 Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Kota Yogyakarta

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Yogyakarta						
Garis Kemiskinan	Rp/kapita/bulan	333.232	353.602	366.520	NA	401.193
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	37,40	35,60	36,60	35,26	32,06
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Persen	9,38	8,82	8,67	8,61	7,70
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	90,62	91,18	91,33	91,39	92,30
Daerah Istimewa Yogyakarta						
Garis Kemiskinan	Rp/kapita/bulan	270.110	303.843	321.056	347.721	360.169
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	565,7	541,9	532,59	485,56	488,83
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	Persen	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	84,12	84,97	85,45	86,84	86,90

Sumber:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka, 2013, 2014 dan 2015
2. Kota Yogyakarta dalam Angka, 2013, 2014 dan 2015
3. Bappeda Kota Yogyakarta, 2017

4.2.3.1 Angkatan Kerja

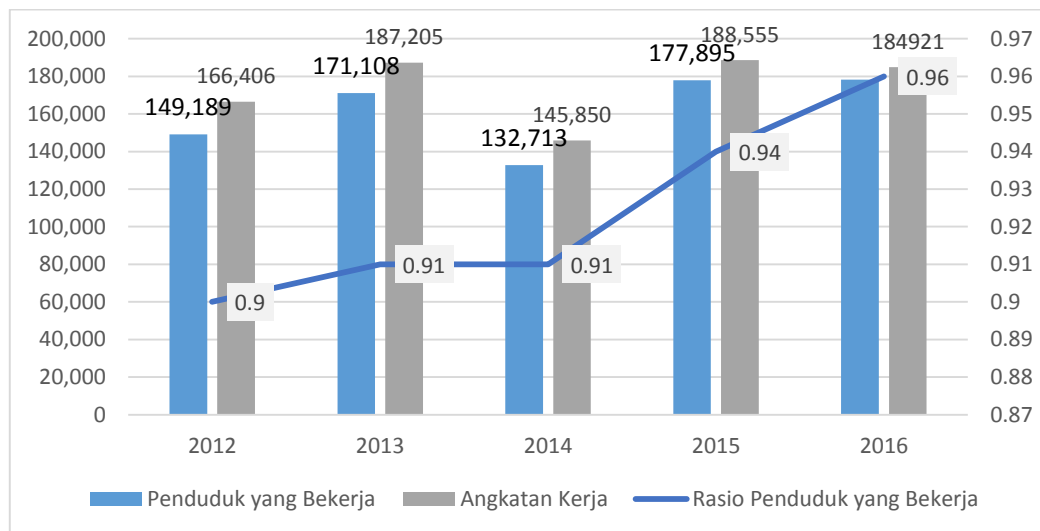
Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta tahun 2012–2016 disajikan pada Tabel 4.36.

Tabel 4. 36 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012–2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk yang Bekerja	Jiwa	149.189	171.108	132.713	177.895	178.200
Angkatan Kerja	Jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921
Rasio Penduduk yang Bekerja		0,90	0,91	0,91	0,94	0,96

Sumber: Profil Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2012–2017

Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan tren positif. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta pada periode 2012–2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,90; meningkat menjadi 0,91 pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2015, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,94. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2016, menjadi 0,96. Hal tersebut berarti 96 persen dari total angkatan kerja di Kota Yogyakarta telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 4 persen yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Rasio penduduk yang bekerja harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Gambar 4.3. yang menunjukkan grafik rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta.



Gambar 4.3 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta, 2017

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai Angka Partisipasi Angkatan Kerja.

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-

masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2012-2016, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan tren terus menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,73% per tahun. Pada tahun 2012, angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar 50,62%, sedangkan pada tahun 2016, angka ini menurun hingga menjadi 39,14%. Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta.

Tabel 4. 37 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas	Jiwa	166.406	187.205	145.850	188.555	184.921
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa	328.737	320.121	323.255	347.403	472.415
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	50,62	58,48	45,12	54,28	39,14

Sumber: Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun, 2013, 2014, dan 2015 (Dinsosnakertrans, 2012-2016); Diskop UKM Nakertrans Kota Yogyakarta, 2017

4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Peningkatan Kondisi serta Kualitas Gender

Selain ukuran-ukuran kuantitatif atas hasil pembangunan, dijumpai pula ukuran yang bersifat kualitatif yaitu Indeks Kualitas Hidup. Pada hakekatnya Indeks Kualitas Hidup merupakan ukuran kualitatif yang menunjukkan mutu penduduk yang ada di suatu wilayah. Guna memperoleh ukuran yang obyektif, kualitas hidup juga dapat ditentukan dengan ukuran kuantitatif melalui banyak faktor, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indeks Pembangunan Manusia ialah parameter yang dapat digunakan untuk melihat dan menilai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender adalah parameter yang dapat digunakan untuk meninjau kualitas pemberdayaan lintas gender baik perempuan maupun laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan keadaan Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Yogyakarta selama 4

tahun sejak tahun 2012 hingga 2016. Selama 4 tahun pula nilai IPM Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan mulai dari 83,29 pada tahun 2012 hingga 85,32 pada tahun 2016. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta terbilang bagus, pasalnya angka ini berada di atas rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia nasional selama 4 tahun berjalan sejak 2012 hingga 2016.

Tabel 4. 38 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai 2017

Wilayah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
DI Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89
Kulon Progo	68.83	69.53	69.74	70.14	70.68	71.52	72.38	73.23
Bantul	75.31	75.79	76.13	76.78	77.11	77.99	78.42	78.67
Gunung Kidul	64.2	64.83	65.69	66.31	67.03	67.41	67.82	68.73
Sleman	79.69	80.04	80.1	80.26	80.73	81.2	82.15	82.85
Kota Yogyakarta	82.72	82.98	83.29	83.61	83.78	84.56	85.32	85.49

Sumber: Data Strategis DIY, 2017

Berdasarkan keadaan Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta apabila dibandingkan dengan kabupaten lain se-provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi diraih oleh Kota Yogyakarta selama 7 tahun sejak tahun 2010 hingga 2017. Selama 7 tahun pula nilai IPM Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan mulai dari 82,72 pada tahun 2010 hingga 85,49 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Yogyakarta, baik umur yang panjang, hidup sehat, pengetahuan dan hidup yang layak. IPM Kota Yogyakarta juga selalu lebih besar dibandingkan rata-rata IPM se- provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4. 39 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pembangunan Gender	98,16	98,48	99,27	99,78	NA
IPG DIY	93,73	94,15	94,31	94,41	
IPG Indonesia	90,07	90,19	90,34	91,03	

Sumber:

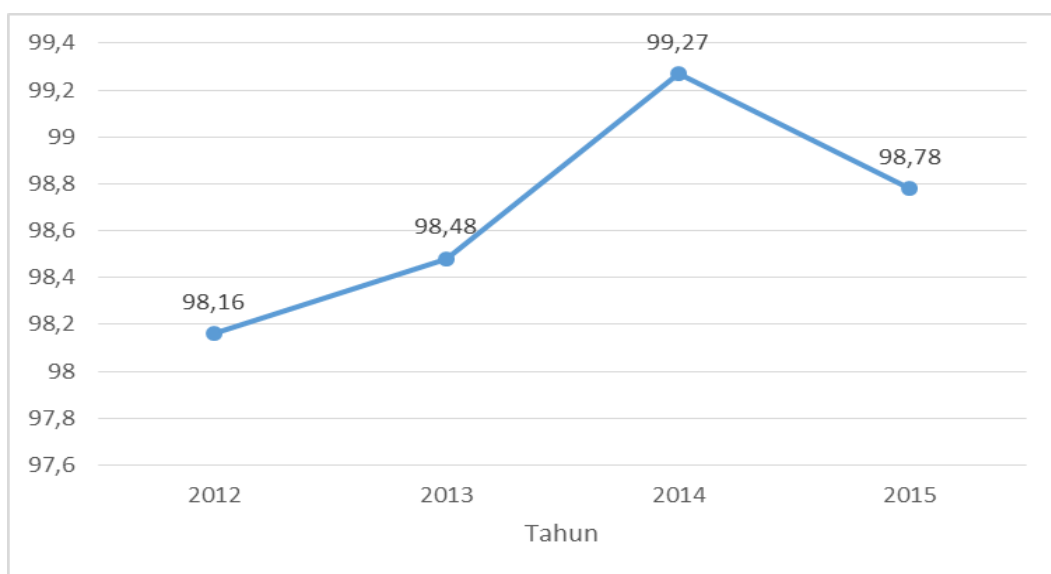
1. Badan Pusat Statistik, 2016
2. Data Strategis DIY, 2017

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam

dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut ini merupakan data IPG di Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2016), IPG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itu belum dilakukan pembaruan perhitungan. IPG di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2012-2015) mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, IPG di Kota Yogyakarta mencapai 98,16 dan mengalami peningkatan menjadi 98,78 pada tahun 2015. Nilai Indeks Pembangunan Gender menurut Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 hingga 2015 untuk Kota Yogyakarta terbilang unggul dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya sejak tahun 2012 hingga 2015, nilai IPG Kota Yogyakarta di atas rata-rata nilai IPG provinsi dan nasional. Sejak tahun 2011, nilai IPG Kota Yogyakarta adalah 97,92, jauh di atas nilai IPG DIY yakni 93,56 dan nasional yang hanya 89,52. Keunggulan IPG Kota Yogyakarta secara konstan bertahan hingga tahun 2015 yakni 98,78 jauh di atas nilai IPG DIY yakni 94,41 dan IPG nasional yang hanya 91,03.

Hal ini mengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kota Yogyakarta sudah semakin tinggi. Pencapaian pembangunan gender di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan nilai IPG diatas 95 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Berikut ini merupakan grafik peningkatan IPG di Kota Yogyakarta.



Gambar 4. 4 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Yogyakarta

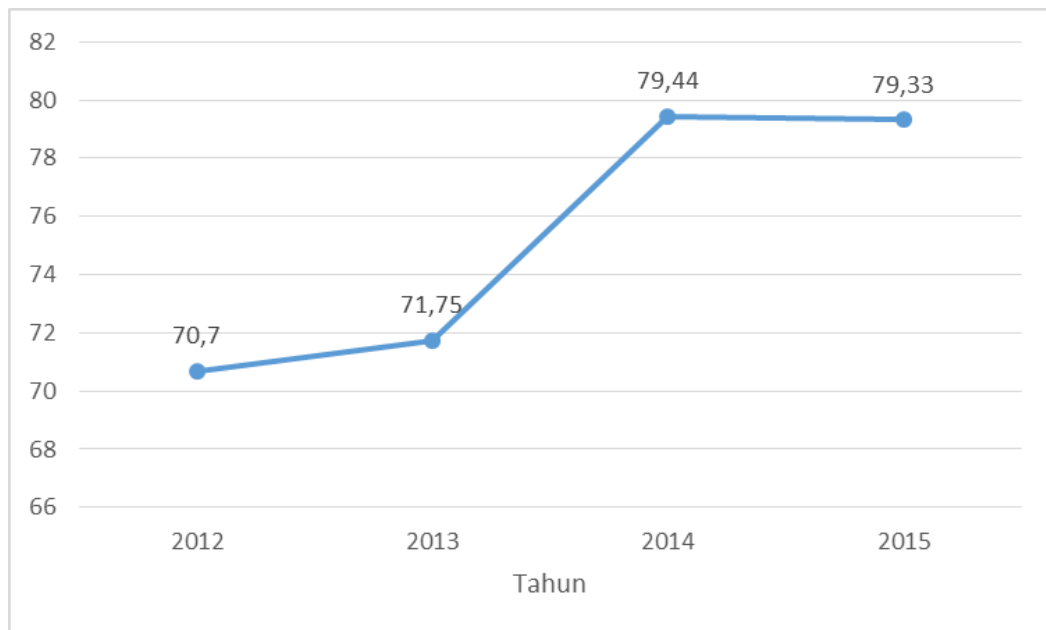
Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta, 2017

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini merupakan data IDG Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.

Tabel 4. 40 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015
Indeks Pemberdayaan Gender	70,70	71,75	79,44	79,33
IDG DIY	75,57	76,36	66,90	68,75
IDG Indonesia	70,07	70,46	70,68	70,83

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016 dan Data Strategis DIY, 2017



Gambar 4. 5 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta, 2017

Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, IDG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IDG di Kota Yogyakarta

dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan, dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang bernilai 3,91%. Pada tahun 2012, IDG Kota Yogyakarta mencapai 70,70 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 79,33 pada tahun 2015. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta berada di bawah provinsi namun di atas nasional pada tahun 2011 hingga 2013. Tahun 2011 nilai IDG Kota Yogyakarta adalah 70,00, di bawah nilai IDG DIY yakni 77,84 dan di atas IDG nasional yakni 69,14. Hal ini kemudian berbalik di tahun 2014 dan 2015 yang mana nilai IDG Kota Yogyakarta jauh melebihi IDG provinsi dan nasional. secara konstan berjalan hingga tahun 2014 yang mana nilai IDG Kota Yogyakarta 79,44, masih di atas DIY yakni 66,9 dan nasional yakni 70,68. Tahun 2015 keadaan yang sama dengan tahun sebelumnya yakni IDG Kota Yogyakarta 79,33 di atas DIY yakni 68,75 dan di atas nasional yakni 70,83. Berdasarkan fluktuasi ini, nilai IDG Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik karena terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga 2015 dari yang semula berada di bawah nilai provinsi hingga jauh mengungguli provinsi di tahun 2015. Artinya, persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta semakin tinggi.

4.3 Pembangunan Keluarga

Tujuan dari pembangunan keluarga yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pembangunan keluarga dimaksud untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, hal-hal yang harus dilakukan antara lain :

1. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan sah
3. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara
4. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga, berketahanan sosial dan kesejahteraan social

Berdasarkan hal tersebut maka data-data yang dibutuhkan adalah data dan informasi terkait dengan tingkat perceraian, perkawinan, wawasan nasional dan data bina keluarga. Meskipun demikian, tidak semua data tersebut dapat ditampilkan dengan baik karena beberapa data tidak dapat terakomodir untuk setiap kecamatan. Oleh karena hal tersebut, terdapat keterbatasan dalam analisis pembangunan keluarga.

4.3.1 Tingkat Perceraian

Tingkat perceraian diperlukan dalam analisis terkait dengan pembangunan keluarga sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa salah satunya ditunjukkan dengan menjaga hubungan rumah tangga tetap harmonis dan bertahan hingga akhir hayat.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Berakhirnya hubungan antara wanita dan pria dalam ikatan rumah tangga disebut dengan perceraian. Perceraian umumnya terjadi akibat kegagalan dalam menjalankan obligasi peran masing-masing baik suami sebagai kepala keluarga maupun istri sebagai pendamping suami. Perceraian kemudian ditandai dengan hidup yang terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian menandakan berhentinya kedua belah pihak baik suami maupun istri dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Yogyakarta, angka pernikahan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi sejak tahun 2015 hingga 2017. Data pernikahan dan perceraian ini merupakan data pencatatan pada tahun berjalan. Pada tahun 2015 total pernikahan di Kota Yogyakarta adalah 2247. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2133 pernikahan. Pada tahun 2017, jumlah pernikahan di Kota Yogya mengalami peningkatan yang melebihi angka pernikahan di tahun 2015 yakni 2273 pernikahan. Adapun kecamatan yang memegang nilai tertinggi untuk pernikahan setiap tahunnya adalah Kecamatan Umbulharjo.

Tabel 4. 41 Jumlah Pernikahan dan Perceraian Kota Yogya tahun 2015-2017

No	Kecamatan	2015		2016		2017	
		Nikah	Cerai	Nikah	Cerai	Nikah	Cerai
1	Mantrijeron	193	10	185	6	189	5
2	Kraton	150	4	149	1	180	4
3	Mergangsan	164	9	184	7	201	11
4	Umbulharjo	405	24	370	22	363	
5	Kotagede	167	16	150	15	149	9
6	Gondokusuman	246	15	234	11	275	
7	Danurejan	111	19	67	3	96	6
8	Pakualaman	54	3	64		71	2
9	Gondomanan	87	2	76		87	5
10	Ngampilan	88	5	104	7	91	3
11	Wirobrajan	148	9	141	10	129	
12	Gedongtengen	101	18	119	3	102	3
13	Jetis	124	19	128	12	130	10
14	Tegalrejo	209	31	162	11	210	13
Total		2247	184	2133	108	2273	71

Sumber: Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 2018

Data pernikahan yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun berbeda dengan angka perceraian yang mengalami penurunan stabil sejak tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015 angka perceraian di Kota Yogyakarta adalah 184 dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 108 perceraian. Angka ini kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 71 perceraian.

Meskipun mengalami penurunan, angka perceraian ini masih ada. Terdapat beberapa kecamatan yang tidak mengalami kejadian cerai seperti Kecamatan Pakualaman dan Gondokusuman tahun 2016 dan Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman serta Wirobrajan pada tahun 2017. Keharmonisan dalam keluarga perlu terus dijaga, peran antara suami dan istri juga harus dilaksanakan dengan baik. Pendidikan agama menjadi sangat penting dalam membangun sebuah keluarga agar selalu harmonis.

4.3.2 Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah diakui dan terdata dan atau tercatat dalam dokumen negara berarti telah sah secara hukum. Perkawinan yang sah menandakan pasangan suami dan istri yang terlibat telah saling memiliki hak dan kewajiban suami istri baik terhadap satu sama lain maupun terhadap negara. Hak yang didapatkan oleh pasangan atas perkawinan yang sah meliputi buku nikah dan sebuah keberhakan untuk menuntut pada pasangannya di mata pengadilan.

Tabel 4. 42 Data Jumlah Penduduk Sudah Kawin 2014-2017

Kecamatan	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)	2016 (jiwa)	2017 (jiwa)
Tegalrejo	19207	17232	17309	17342
Jetis	14210	12584	12590	12414
Gondokusuman	21515	19097	19267	19360
Danurejan	11287	9724	9630	9521
Gedongtengen	10218	9370	9347	9130
Ngampilan	9711	8584	8588	8504
Wirobrajan	13775	12685	12700	12581
Mantrijeron	17536	16117	16294	16266
Kraton	10892	9910	9971	9973
Gondomanan	7737	6899	6912	6833
Pakualaman	5367	4825	4804	4781

Mergangsan	16028	14724	14736	14710
Umbulharjo	33411	31891	32324	32624
Kotagede	16295	15663	15786	15967
Kota Yogyakarta	207189	189305	190258	190006

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Tahun 2018

Dalam pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah maka perlu diketahui data perkawinan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, maka dibutuhkan data penduduk yang sudah kawin. Berdasarkan data Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk sudah kawin di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sejumlah 207.189 jiwa. Kemudian mengalami penurunan ditahun 2015 sejumlah 189.305 jiwa. Tahun 2016 dan 2017 jumlah penduduk yang sudah kawin mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 dengan jumlah 190.258 jiwa dan 190.006 jiwa. Selama tahun 2014–2017, jumlah penduduk terbanyak yang sudah melakukan perkawinan berada di Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan jumlah terendah berada di Kecamatan Gondomanan. Tinggi rendahnya jumlah penduduk kawin dapat dilihat dari komposisi penduduk dan jumlah penduduk di setiap kecamatan.

Tabel 4. 43 Jumlah Kepemilikan Akta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2014–2017

Kecamatan	2014 (dokumen)	2015 (dokumen)	2016 (dokumen)	2017 (dokumen)
Tegalrejo	7766	8633	9113	9583
Jetis	4457	5606	6226	6507
Gondokusuman	5034	6546	7344	7873
Danurejan	3423	4093	4407	4619
Gedongtengen	3308	3980	4226	4397
Ngampilan	2640	3237	3560	3770
Wirobrajan	5183	6158	6536	6790
Mantrijeron	6852	8028	8701	9144
Kraton	5134	5499	5804	6087
Gondomanan	2964	3428	3742	3909
Pakualaman	1719	2057	2207	2351
Mergangsan	5292	6470	7094	7603
Umbulharjo	17842	20213	21283	22140
Kotagede	5500	6821	7363	7805
Kota Yogyakarta	77114	90769	97606	102578

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Tahun 2018

Menurut UU No 1 tahun 1974, perkawinan yang telah diakui dan terdata dan atau tercatat dalam dokumen negara berarti telah sah secara hukum. Jumlah kepemilikan akta nikah di Kota Yogyakarta menunjukkan kenaikan selama tahun 2014–tahun 2017 (Tabel 4.43). Tingginya kepemilikan akta nikah menunjukkan kesadaran penduduk untuk melakukan pencatatan nikah sudah cukup baik. Lonjakan jumlah kepemilikan dokumen terjadi pada tahun 2015, dari yang semula hanya 77.114 dokumen, di tahun 2015 menjadi 90.769 dokumen. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah kepemilikan dokumen naik secara signifikan dari 97.606 dokumen menjadi 102.578 dokumen. Kepemilikan akta nikah terbanyak adalah Kecamatan Umbulharjo. Banyaknya jumlah kepemilikan dokumen akta nikah di Kecamatan Umbulharjo karena jumlah penduduk tertinggi berada di kecamatan ini. Sedangkan untuk jumlah terendah berada di Kecamatan Pakualaman. Rendahnya jumlah kepemilikan akta nikah ini dipengaruhi banyak faktor. Selain jumlah penduduk yang sedikit, kemungkinan melakukan pencatatan dokumen akta nikah dilakukan di luar wilayah domisili atau bisa melakukan pencatatan di wilayah domisili pasangan. Oleh karena itu, jumlah kepemilikan akta nikah relatif kecil. Data kepemilikan akta nikah ini untuk mengetahui jumlah perkawinan yang sah yang tercatat dan diakui Negara.

4.3.3 Wawasan Nasional

Wawasan nasional ialah tingkat pemahaman individu terhadap hal-hal berbau wawasan nasional yang melibatkan informasi-informasi seluas mungkin. Wawasan nasional dapat dipahami kepada individu sedini mungkin oleh pihak keluarga sebagai pihak pembangun karakter utama dan pertama di kalangan paling dasar seorang individu. Wawasan nasional tidak dapat secara instan dimiliki oleh seseorang. Perlu yang namanya penanaman sedini mungkin terkait dengan wawasan nasional. Oleh sebab itu keluarga memegang peran yang sangat vital dalam penanaman wawasan nasional pada individu, utamanya keluarga dengan pernikahan yang sah dan berkualitas.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggotakeluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan.

Penerapan wawasan nasional dalam setiap keluarga di Kota Yogyakarta cukup susah untuk dikuantitatifkan. Beberapa indikator keluarga sejahtera sebenarnya bisa diterapkan untuk melihat sejauh mana penerapan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, indikator tersebut sejak tahun 2015 sudah tidak digunakan lagi. Dengan demikian untuk mengidentifikasi penerapan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga cukup susah untuk dianalisis

4.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Bina Keluarga

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kegiatan pembinaan keluarga baik itu kepada balita, remaja, lansia, pembinaan remaja dan mahasiswa serta pembinaan kepada masyarakat untuk peningkatan ekonomi melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

Program Bina keluarga ini, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin bulanan
2. Memberikan rujukan kepada anggota, apabila memiliki permasalahan kesehatan bisa dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan atau Puskesmas
3. Pelatihan kepada kelompok bina keluarga dan UPPKS
4. Mengadakan gebyar kegiatan
5. Melaksanakan workshop kegiatan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kepada kelompok bina keluarga dan UPPKS

Program bina keluarga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak. Dalam kasus Bina Keluarga Balita dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktriyanto (2016) menunjukkan bahwa partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun dari semua aspek (aspek pertumbuhan fisik, aspek perkembangan jiwa, dan aspek perkembangan sosial) keluarga anggota BKB lebih baik daripada keluarga yang tidak ikut BKB. Survey ini dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia. Program ini sangat baik dan perlu dilanjutkan.

Kesejahteraan sosial harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan sosial akan sangat mempengaruhi pembangunan keluarga. Kesejahteraan sosial tidak hanya bagi masyarakat yang produktif tetapi juga untuk penduduk lanjut usia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia adalah proses penyuluhan sosial, bimbingan, konseling, bantuan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia atas dasar pendekatan pekerjaan sosial.

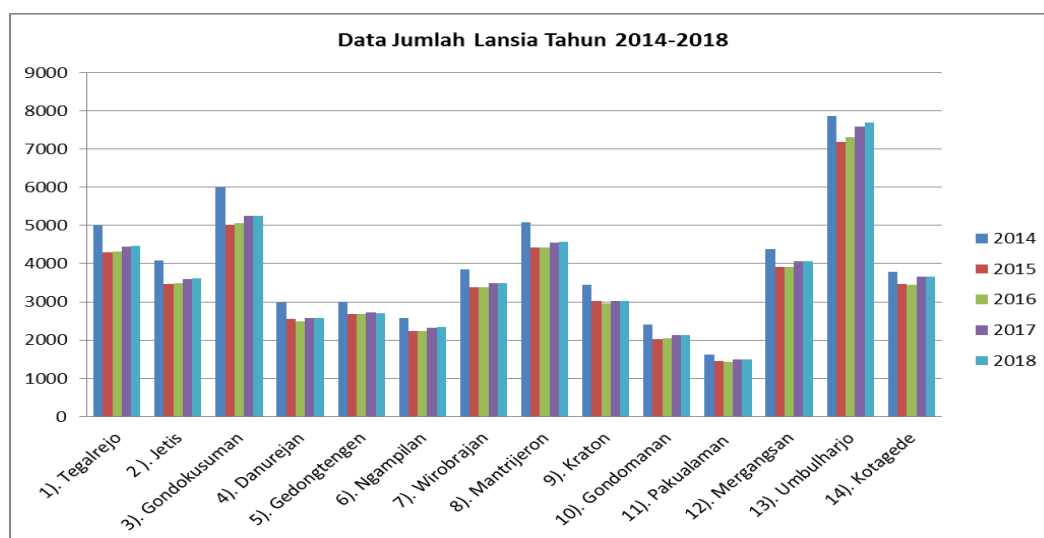
Di Kota Yogyakarta, jumlah penduduk yang lanjut usia cukup tinggi. Jumlah lansia pada tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan jumlah lansia pada tahun 2018. Dalam pembangunan keluarga, kesejahteraan lansia menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena apabila kesejahteraan mereka tercapai maka keluarga menjadi lebih ideal dan sehat.

Tabel 4. 44 Jumlah Lansia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

Kecamatan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tegalrejo	4999	4299	4321	4451	4456
Jetis	4079	3478	3489	3597	3616
Gondokusuman	5985	5028	5055	5244	5262
Danurejan	2985	2553	2495	2581	2579
Gedongtengen	3007	2676	2688	2716	2699
Ngampilan	2581	2245	2232	2325	2334

Wirobrajan	3842	3375	3384	3486	3488
Mantrijeron	5073	4431	4414	4541	4576
Kraton	3449	3015	2956	3033	3029
Gondomanan	2414	2029	2048	2123	2135
Pakualaman	1630	1444	1439	1495	1495
Mergangsan	4376	3922	3924	4073	4072
Umbulharjo	7853	7177	7304	7592	7694
Kotagede	3798	3471	3457	3651	3662
Kota Yogyakarta	56071	49143	49206	50908	51097

Sumber Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Tahun 2018



Gambar 4. 6 Diagram Data Jumlah Lansia Tahun 2014-2018

Sumber Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan olahan penulis, Tahun 2018

Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2017 juga membentuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Keluarga lansia ini dibina dan diarahkan untuk menjadi lebih produktif. Jumlah keluarga yang menjadi anggota dalam BKL di Kota Yogyakarta sebanyak 3264 kk dimana yang terbanyak di Kecamatan Umbulharjo sebanyak 430 kk dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Danurejan. Persentase kehadiran dalam penyuluhan yang diadakan cukup tinggi yaitu sebesar 83,76%. Partisipasi mereka harus terus ditingkatkan, lansia harus didampingi agar mereka bisa lebih produktif. Berikut disajikan Tabel 4.45 menunjukkan Jumlah BKL dan banyaknya kegiatan penyukuhan yang diadakan untuk BKL.

Tabel 4. 45 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

Kecamatan	Keluarga Menjadi Anggota BKL	Jumlah Keluarga Per Kelompok BKL	Jumlah Pertemuan /penyuluhan	Keluarga Hadir Dalam Pertemuan		
	Jumlah			Jumlah	%	Rata-rata
Tegalrejo	141	28	5	141	100.00%	28
Jetis	117	23	5	89	76.07%	18
Gondokusuman	360	51	7	305	84.72%	44
Danurejan	75	25	3	68	90.67%	23
Gedongtengen	127	32	8	110	86.61%	14
Ngampilan	95	14	11	80	84.21%	7
Wirobrajan	427	39	10	368	86.18%	37
Mantrijeron	388	26	13	318	81.96%	24
Kraton	250	36	7	221	88.40%	32
Gondomanan	178	30	6	119	66.85%	20
Pakualaman	104	17	7	79	75.96%	11
Mergangsan	262	29	10	230	87.79%	23
Umbulharjo	430	43	10	326	75.81%	33
Kotagede	310	26	14	280	90.32%	20
Jumlah	3264	31	116	2734	83.76%	24

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, 2017

Program Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kegiatan pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar. Kegiatan ini tidak hanya untuk melihat tumbuh kembang anak tetapi juga untuk mendeteksi dini kelainan atau kecacatan anak dan selanjutnya anak-anak siap untuk sekolah bersama anak-anak yang lain. Sepanjang tahun 2017 terdapat sebanyak 253 kelompok dan tersebar diseluruh wilayah Kota Yogyakarta atau sebanyak 6564 keluarga (92,93%). Jumlah keluarga terbanyak berada di Kecamatan Umbulharjo. Dalam program tersebut juga terdapat kegiatan penyuluhan. Berdasarkan banyaknya penyuluhan yang diadakan tidak semua keluarga yang menjadi anggota BKB hadir dalam penyuluhan yang diadakan. Partisipasi kehadiran keluarga terendah ada di Kecamatan Pakualaman sebesar 47,15% dan partisipasi tertinggi berada di Kecamatan Danurejan yaitu sebesar 97,33%. Data pembinaan keluarga balita dan jumlah penyuluhan yang diadakan disajikan dalam Tabel 4.46.

Tabel 4. 46 Jumlah Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Kecamatan	Kelompok BKB			Jumlah Keluarga Sasaran BKB	Keluarga Menjadi Anggota BKB	
	Yang Ada	Yang Lapor	%		Jumlah	%
Tegalrejo	19	19	100.00%	293	266	90.78%
Jetis	15	15	100.00%	343	323	94.17%
Gondokusuman	17	17	100.00%	485	437	90.10%
Danurejan	13	14	107.69%	388	374	96.39%
Gedongtengen	14	14	100.00%	412	412	100.00%
Ngampilan	18	20	111.11%	726	580	79.89%
Wirobrajan	22	22	100.00%	702	702	100.00%
Mantrijeron	27	21	77.78%	518	510	98.46%
Kraton	12	12	100.00%	209	192	91.87%
Gondomanan	16	16	100.00%	313	302	96.49%
Pakualaman	13	14	107.69%	350	263	75.14%
Mergangsan	25	25	100.00%	534	497	93.07%
Umbulharjo	28	30	107.14%	1302	1181	90.71%
Kotagede	14	14	100.00%	530	525	99.06%
Jumlah	253	253	100.00%	7105	6564	92.39%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, 2017

Tabel 4. 47 Jumlah Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Kecamatan	Jumlah Pertemuan /penyuluhan	Keluarga Hadir Dalam Pertemuan		
		Jumlah	%	Rata-rata
Tegalrejo	19	258	96.99%	13.58
Jetis	15	180	55.73%	12.00
Gondokusuman	17	392	89.70%	23.06
Danurejan	14	364	97.33%	26.00
Gedongtengen	17	385	93.45%	22.65
Ngampilan	20	361	62.24%	18.05

Wirobrajan	22	541	77.07%	24.59
Mantrijeron	21	408	80.00%	19.43
Kraton	12	162	84.38%	13.50
Gondomanan	16	285	94.37%	17.81
Pakualaman	14	124	47.15%	8.86
Mergangsan	25	437	87.93%	17.48
Umbulharjo	31	997	84.42%	32.16
Kotagede	14	490	93.33%	35.00
Jumlah	257	5384	82.02%	20.95

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, 2017

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan sebuah program sebagai upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga yang lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan orang tua dapat mendidik anak remaha dengan benar.

Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 84 Kelompok BKR yang terdiri dari 2875 keluarga. Kelompok BKR terbanyak terdapat di Kecamatan Mantrijeron yaitu sebanyak 11 kelompok yang terdiri dari 360 keluarga. Kedepan jumlah ini perlu terus ditingkatkan. Permasalahan kenakalan remaja banyak terjadi di beberapa daerah di Kota Yogyakarta, salah satunya tawuran remaja, kasus klitih dan sex bebas. Kasus tersebut cukup membuat resah masyarakat. Anggota keluarga sangat perlu dibina sehingga mereka paham tata cara mendidik anak remaja mereka dengan benar. Kelompok BKR ini diharapkan dapat mampu mengurangi kasus-kasus kenakalan remaja sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Berikut disajikan data jumlah kelompok BKR dan partisipasi kehadiran dalam pertemuan yang diadakan pada Tabel 4.48

Tabel 4. 48 Jumlah Kelompok BKR dan Partisipasi Kehadiran dalam Pertemuan

Kecamatan	Kelompok BKR			Jumlah Keluarga sasaran BKR	Keluarga Menjadi Anggota BKR		Jumlah Keluarga Per Kelompok BKR	Jml. Pertemuan/ penyuluhan	Keluarga Hadir Dalam Pertemuan		
	Yang Ada	Yang Laport	%		Jumlah	%			Jumlah	%	Rata-Rata
Tegalrejo	4	4	100.00	99	92	92.93	23	4	92	100.00	23
Jetis	4	4	100.00	232	128	55.17	32	4	91	71.09	23
Gondokusuman	6	6	100.00	265	226	85.28	38	6	151	66.81	25
Danurejan	3	3	100.00	100	91	91.00	30	3	83	91.21	28

Gedongtengen	4	4	100.00	108	108	100.00	27	5	100	92.59	20
Ngampilan	5	7	140.00	120	111	92.50	22	7	78	70.27	11
Wirobrajan	8	8	100.00	225	225	100.00	28	8	174	77.33	22
Mantrijeron	10	11	110.00	360	321	89.17	32	11	285	88.79	26
Kraton	5	5	100.00	84	78	92.86	16	5	67	85.90	13
Gondomanan	5	5	100.00	170	98	57.65	20	5	68	69.39	14
Pakualaman	5	6	120.00	94	92	97.87	18	6	47	51.09	8
Mergangsan	5	5	100.00	249	187	75.10	37	5	156	83.42	31
Umbulharjo	9	9	100.00	614	444	72.31	49	9	285	64.19	32
Kotagede	7	7	100.00	155	155	100.00	22	10	145	93.55	15
JUMLAH	80	84	105.00	2875	2356	81.95	29	88	1822	77.33	21

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, 2017

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Tujuan dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (*Life Skills*) dan pelayanan konseling. Kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat remaja juga dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kota Yogyakarta yang merupakan kota pendidikan banyak didatangi penduduk dari luar Kota Yogyakarta untuk menempuh pendidikan disana. Dengan demikian, keberadaan PIK-Remaja di Kota Yogyakarta menjadi sangat penting. Meskipun demikian, jumlah PIK-Remaja ini masih belum banyak. Terdapat 53 PIK-remaja antara lain yang terdapat disekolah/agama sebanyak 4, di perguruan tinggi 3 dan di LSM/Organisasi kepemudaan sebanyak 46. Jumlah PIK-Remaja disajikan dalam Tabel 4.49.

Tabel 4. 49 Jumlah PIK-Remaja Kota Yogyakarta

Kecamatan	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja)								
	Yang Ada	Sekolah Umum/Agama		Perguruan Tinggi		Organisasi Keagamaan		LSM/Organisasi Kepemudaan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tegalrejo	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%
Jetis	1	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%
Gondokusuman	3	0	0.00%	1	33.33%	0	0.00%	2	66.67%
Danurejan	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	100.00%
Gedongtengen	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%
Ngampilan	4	1	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	75.00%

Wirobrajan	4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	100.00%
Mantrijeron	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%
Kraton	2	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%
Gondomanan	4	2	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	50.00%
Pakualaman	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%
Mergangsan	3	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	100.00%
Umbulharjo	13	0	0.00%	2	15.38%	0	0.00%	11	84.62%
Kotagede	3	1	33.33%	0	0.00%	0	0.00%	2	66.67%
JUMLAH	53	4	7.55%	3	5.66%	0	0.00%	46	86.79%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, 2017

UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB. UPPKS bertujuan mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif, mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga, meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga dan mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Terdapat sebanyak 216 kelompok UPPKS di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Partisipasi anggota UPPKS yang hadir dalam pertemuan yang diadakan cukup tinggi yaitu sebanyak 97,6%. Untuk melihat jumlah kelompok UPPKS dan jumlah pertemuan yang diadakan dapat dilihat pada Tabel 4.50.

Tabel 4. 50 Jumlah Kelompok UPPKS

Kecamatan	Jumlah Kelompok UPPKS			Pertemuan Kelompok UPPKS	
	Yang Ada	Yang Lapor	%	Jumlah	%
Tegalrejo	8	8	100.00%	9	112.50%
Jetis	16	16	100.00%	16	100.00%
Gondokusuman	21	21	100.00%	21	100.00%
Danurejan	23	13	56.52%	13	100.00%
Gedongtengen	14	14	100.00%	18	128.57%
Ngampilan	17	17	100.00%	16	94.12%
Wirobrajan	20	20	100.00%	13	65.00%
Mantrijeron	17	14	82.35%	14	100.00%
Kraton	11	11	100.00%	11	100.00%

Gondomanan	8	8	100.00%	8	100.00%
Pakualaman	13	13	100.00%	13	100.00%
Mergangsan	17	17	100.00%	16	94.12%
Umbulharjo	30	30	100.00%	29	96.67%
Kotagede	14	14	100.00%	14	100.00%
Jumlah	229	216	94.32%	211	97.69%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, 2018

4.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi permasalahan terkait mobilitas penduduk. Sebagai kota rujukan dan pusat kota, Kota Yogyakarta mengalami kesenjangan antara jumlah penduduk bukan warga Kota Yogyakarta dengan penduduk yang memiliki KTP Kota Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Kota Yogyakarta perlu memiliki pengarahannya mobilitas penduduk. Pengarahannya mobilitas penduduk Kota Yogyakarta dapat dilihat dari kepadatan penduduk, migrasi masuk maupun migrasi keluar.

4.4.1 Kepadatan Penduduk

Merujuk pada Perpres No.153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. Berdasarkan Tabel 4.51, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta memiliki nilai yang bervariasi. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dari tahun 2015 sampai 2017 berada di Kecamatan Ngampilan dengan tingkat kepadatan masing-masing 22.790 jiwa/km² ditahun 2015, 22.870 jiwa /km² ditahun 2016, dan 22.635 jiwa/km² ditahun 2017. Jika dilihat dari trennya, kepadatan penduduk di Kecamatan

Tabel 4. 51 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017 (jiwa/km²)

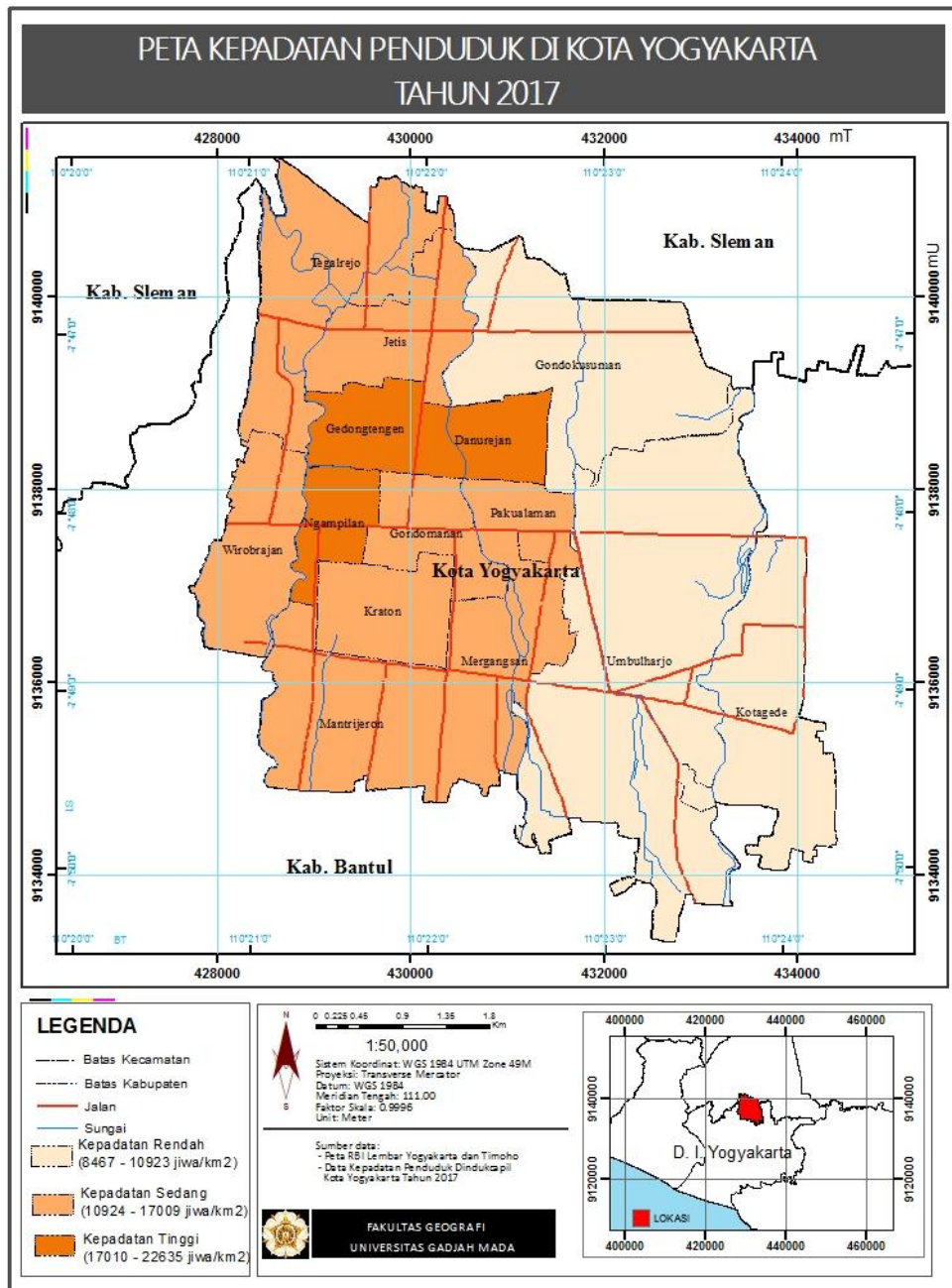
Kecamatan	Tahun		
	2015	2016	2017
Tegalrejo	12554	12656	12664
Jetis	16211	16257	16021
Gondokusuman	10431	10554	10537
Danurejan	19472	19402	19201
Gedongtengen	21452	21441	21052
Ngampilan	22790	22870	22635
Wirobrajan	15707	15822	15765
Mantrijeron	13365	13539	13489
Kraton	15734	15764	15671

Ngampilan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Umbulharjo. Meskipun jumlah penduduknya terbanyak, namun dengan luas wilayah yang luas menjadikan Kecamatan Umbulharjo memiliki kepadatan penduduk terendah dengan 8.299 jiwa/km² ditahun 2015, 8.449 jiwa/km² ditahun 2016, dan 8.468 jiwa/km² ditahun 2017.

Gondomanan	13499	13524	13402
Pakualaman	16925	17032	17010
Mergangsan	13778	13855	13847
Umbulharjo	8299	8449	8468
Kotagede	10704	10858	10923
Kota Yogyakarta	19451	19618	19551

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun 2015–2017 bersifat fluktuatif, pada tahun 2016 kepadatan penduduk mencapai 19.618 jiwa/km² dan turun di Tahun 2017 menjadi 19.551 jiwa/km². Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, salah satu penyebab tingginya kepadatan adalah tingginya jumlah migrasi masuk (Tabel 4.45). Masuknya jumlah pendatang ke Kota Yogyakarta ditarik oleh ketersediaan fasilitas pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. *Tagline* Kota Pendidikan menyebabkan sebagian besar pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Disisi lain, banyaknya pelajar dan mahasiswa yang datang ke Kota Yogyakarta menyebabkan terbukanya sektor ekonomi baru. Peluang-peluang dari sektor ekonomi inilah menarik para pekerja bidang non formal (jasa dan perdagangan) dari sekitar wilayah Kota Yogyakarta untuk melakukan migrasi masuk. Dampak yang dihasilkan dari masuknya pendatang baik pekerja, pelajar, dan mahasiswa adalah tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta. Adapun tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Peta Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017

Sumber: Hasil Olahan Data, 2018

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Gedongtengen. Tingginya tingkat kepadatan pada tiga kecamatan tersebut dipengaruhi oleh luas wilayah yang kecil dan tingginya jumlah penduduk. Letak Kecamatan Danurejan, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Gedongtengen yang berada di dekat pusat kota menyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan untuk hunian sehingga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Jika dilihat dari letaknya,

kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi hingga sedang berada di sisi sebelah barat Kota Yogyakarta. Pertumbuhan pusat kota dan pemusatan kegiatan menjadi faktor lain kecenderungan penduduk untuk bermukim. Hal ini terkait dengan keterjangkauan dan aksesibilitas penduduk ke pusat kota untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Sedangkan tingkat kepadatan rendah berada di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Kotagede. Tingkat kepadatan penduduk yang rendah pada di Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Kotagede dipengaruhi oleh luas wilayah yang luas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada Kecamatan Umbulharjo meskipun memiliki jumlah penduduk yang terbanyak, jika luas wilayah yang dimiliki luas maka kepadatan penduduk akan rendah.

Kedudukan Kota Yogyakarta sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata telah menjadi daya tarik pelaku mobilitas menuju ke Kota Yogyakarta, baik dengan melakukan mobilitas ulang alik, sirkuler, dan bahkan menetap. Kondisi ini menjadikan Kota Yogyakarta utamanya di siang hari menjadi lebih padat dan terkesan semrawut. Upaya penataan kota telah dilakukan misalnya pembangunan kawasan pedestrian yang lebih asri dan tertata di Malioboro. Selain itu, pembangunan kota diarahkan tidak di pusat kota namun di wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan agar para pendatang tidak bertempat tinggal di Kota Yogyakarta tetapi menuju di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Upaya yang sudah dilakukan antara lain menempatkan beberapa fasilitas publik seperti hotel, terminal terpadu Giwawang, pembangunan XT Square, dan kawasan super market di wilayah pinggiran.

4.4.2 Migrasi

Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi. Mobilisasi penduduk Kota Yogyakarta dapat terlihat dari jumlah penduduk masuk dan jumlah penduduk keluar. Adapun migrasi terbagi mejadi migrasi permanen maupun migrasi non permanen. Migrasi permanen mencerminkan jumlah penduduk yang melakukan registrasi perpindahan administrasi menjadi penduduk Kota Yogyakarta maupun keluar dari Kota Yogyakarta. Berdasarkan Tabel 4.52 tren migrasi neto di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2017 lebih banyak penduduk yang melakukan migrasi masuk daripada migrasi keluar.

Tabel 4. 52 Jumlah Migrasi Keluar, Migrasi Masuk, dan Migrasi Neto Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017

Kecamatan	2015			2016			2017		
	Keluar	Masuk	Netto	Keluar	Masuk	Netto	Keluar	Masuk	Netto
Tegalrejo	1080	1270	5.200777	1159	1136	-0.62449	897	1043	3.961686
Jetis	828	615	-7.72915	700	852	5.499873	692	628	-2.34992
Gondokusuman	1214	1362	3.555897	1386	1367	-0.45121	1067	1187	2.854289
Danurejan	588	614	1.213876	708	671	-1.73367	536	486	-2.36731
Gedongtengen	676	492	-8.93464	605	507	-4.76121	499	361	-6.8283
Ngampilan	539	560	1.123716	590	529	-3.25281	480	408	-3.8791
Wirobrajan	725	890	5.96853	728	858	4.668366	672	647	-0.90103
Mantrijeron	874	971	2.780724	1006	1161	4.386461	773	854	2.300679
Kraton	596	539	-2.58762	560	653	4.214056	518	562	2.005561
Gondomanan	408	359	-3.24096	394	384	-0.6602	354	333	-1.39907
Pakualaman	236	270	3.188596	300	333	3.075489	208	274	6.159015
Mergangsan	843	1018	5.498476	890	918	0.874891	686	736	1.563184
Umbulharjo	1788	2381	8.800178	1922	2402	6.996167	1595	2095	7.27167
Kotagede	873	1125	7.668898	724	968	7.319634	760	924	4.890413
Total	11268	12466	22.5073	11672	12739	25.55135	9737	10538	13.28176

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tahun 2018, hasil olahan

Data tahun 2017 menunjukkan tren yang turun dibandingkan jumlah migrasi ditahun 2016. Meskipun secara total jumlah migrasi masuk lebih banyak dibandingkan dengan migrasi keluar, masih ada beberapa kecamatan yang memiliki nilai migrasi neto negatif. Migrasi neto terkecil berada pada Kecamatan Gedongtengen yaitu sejumlah -8,93464 ditahun 2015, sejumlah -4,76121 ditahun 2016, dan sejumlah -6,8283 ditahun 2017. Migrasi neto dihitung dari selisih antara jumlah migrasi masuk dan keluar. Nilai negatif pada neto menunjukkan lebih banyak penduduk yang keluar dibandingkan dengan penduduk masuk. Jika dari tahun ke tahun trennya masih tetap negatif maka dikhawatirkan pada masa datang akan mengalami kekurangan penduduk. Nilai migrasi neto yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Umbulharjo dengan nilai 8,800178 ditahun 2015, sebesar 6,996167 ditahun 2016, dan sebesar 7,27167 ditahun 2017. Tingginya nilai migrasi neto di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor penarik yang meliputi ketersediaan infrastruktur dan fasilitas baik kesehatan, ekonomi, maupun sosial pendidikan.

Kota Yogyakarta memiliki fungsi perkotaan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya menyebabkan banyak penduduk

masuk yang berdampak pada jumlah penduduk siang hari menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pada malam hari. Hal ini dipengaruhi oleh mobilitas harian penduduk sekitar Kota Yogyakarta yang melakukan pergerakan menuju area perkotaan. Sehingga pada siang hari terjadi kepadatan yang berdampak pada kemacetan lalu lintas. Tingginya mobilitas harian penduduk di sekitar Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah. Adapun jumlah antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Negara dapat dilihat pada Tabel 4.53. Jumlah yang tersaji di tabel tersebut merupakan jumlah pekerja yang perusahaannya melakukan registrasi, sehingga jumlah yang tertera tidak merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.

Tabel 4. 53 Jumlah Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKN) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2017

Penerima Pencari Kerja	Jenis Antar Kerja								
	AKL			AKAD			AKAN		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Instansi pemerintah	37	19	0	35	0	0	0	0	0
Bumn/bumd	17	0	0	1	0	0	0	0	0
Koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan swasta	1740	1880	668	148	205	309	38	46	59
Badan usaha lainnya	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Perorangan	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total	1822	1900	668	184	205	309	38	46	59

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2018

Antar Kerja Lokal (AKL) adalah banyaknya pekerja luar wilayah Kota Yogyakarta yang bekerja di Kota Yogyakarta. Jumlah pekerja dari perusahaan swasta memiliki andil dalam dampak kepadatan lalu lintas. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 1.900 pekerja luar daerah masuk ke Kota Yogyakarta. Jumlah ini naik jika dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 1.822 pekerja. Tren AKL turun dengan signifikan di tahun 2017 yang hanya berjumlah 668 pekerja. Turunnya jumlah AKL dapat disebabkan oleh berbagai kebijakan atau dapat juga disebabkan belum adanya pelaporan jumlah pekerja dari perusahaan.

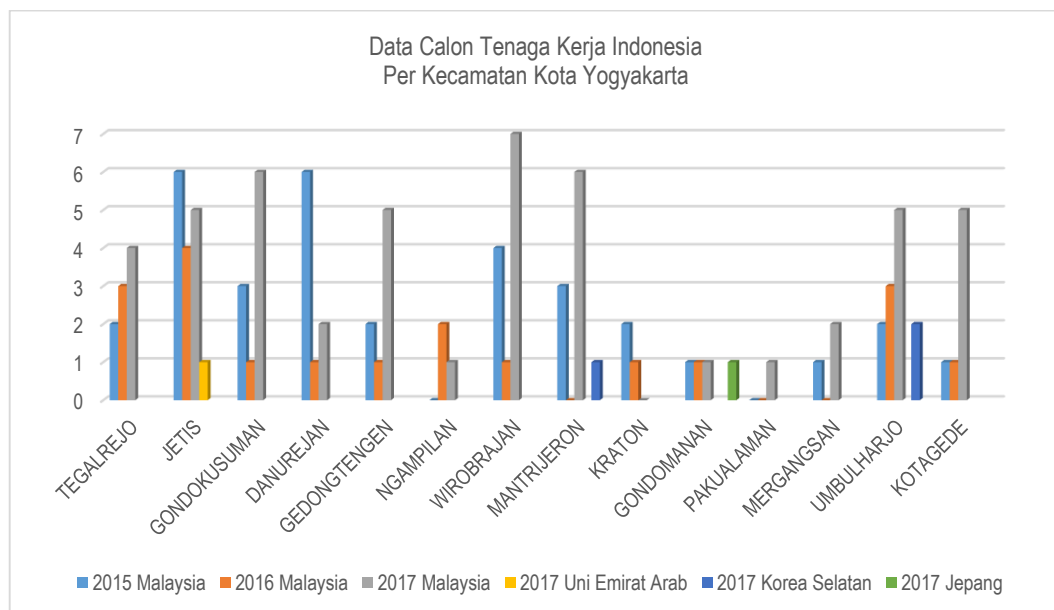
Selain AKL, jenis antar kerja yang lain adalah Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). AKAD adalah banyaknya penduduk Kota Yogyakarta yang bekerja di luar provinsi. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) tahun 2015 berjumlah 184, ditahun 2016 meningkat menjadi 205, dan ditahun 2017 naik menjadi 309. Jumlah terbanyak dari penerima pencari kerja AKAD berada pada Perusahaan Swasta. Jika dibandingkan dengan jumlah AKL, jumlah AKAD hanya berkisar 10% dari jumlah AKL. Rendahnya jumlah AKAD dapat diartikan dengan

sedikitnya penduduk yang bekerja di luar provinsi sehingga mengindikasikan bahwa Kota Yogyakarta belum ditinggalkan oleh penduduknya.

Tabel 4. 54 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Melakukan Transmigrasi Tahun 2014–2016

Indikator	Satuan	2014	2015	2016
Transmigrasi Swakarsa				
Kepala Keluarga	KK	0	0	0
Individu	Jiwa	0	0	0
Transmigrasi Umum				
Kepala Keluarga	KK	5	12	13
Individu	Jiwa	15	39	43
Jumlah Total				
Kepala Keluarga	KK	5	12	13
Individu	Jiwa	15	39	43

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017



Gambar 4. 8 Negara Tujuan TKI Kota Yogyakarta Tahun 2015–2017

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2018

Animo penduduk Kota Yogyakarta untuk melakukan transmigrasi masih rendah, terlihat dari jumlah peserta transmigrasi yang kurang dari 15 kk di setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 4.54, pada tahun 2014-2016 jumlah kepala keluarga yang melakukan transmigrasi mengalami peningkatan setiap

tahun, namun angkanya rendah. Jumlah transmigran di tahun 2014 berjumlah 5 kk dengan individu 15 jiwa naik menjadi 12 kk dengan individu 39 jiwa di tahun 2015. Jumlah ini terus meningkat menjadi 13 kk dengan individu 43 jiwa di tahun 2016. Program transmigrasi menasar pada penduduk perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di kota. Dengan adanya program transmigrasi, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Seluruh jumlah transmigran berasal dari transmigrasi umum. Sedangkan sejak tahun 2014 hingga 2016 belum pernah ada keluarga yang mengajukan transmigrasi swakarsa baik swakarsa terbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya animo penduduk melakukan transmigrasi disebabkan adanya kekhawatiran penduduk untuk hidup pada daerah lain yang memiliki akses minim.

Migrasi masuk dan migrasi keluar juga bisa melibatkan antar negara yang terdiri atas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Berdasarkan Gambar 4.8 Negara yang menjadi tujuan TKI tertinggi adalah Malaysia. Kecamatan dengan penyumbang calon TKI akumulasi terbanyak selama tahun 2015–2017 berada di Kecamatan Jetis sedangkan untuk TKA (Tabel 4.55) yang bekerja di Kota Yogyakarta berasal dari berbagai negara tidak ada yang mendominasi

Tabel 4. 55 Jumlah Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asal Negara

Asal Negara	Tahun		
	2015	2016	2017
China	1	1	1
USA	2	3	3
Perancis	2	3	1
Italia	1	0	0
India	2	2	1
Belanda	1	2	2
Kanada	1	0	0
New Zeland	1	1	1
Belgia	1	1	0
Norwegia	1	1	0
Jerman	0	3	1
Korea Selatan	0	1	1
Australia	0	1	2
Thailand	0	0	2
Jumlah	13	19	15

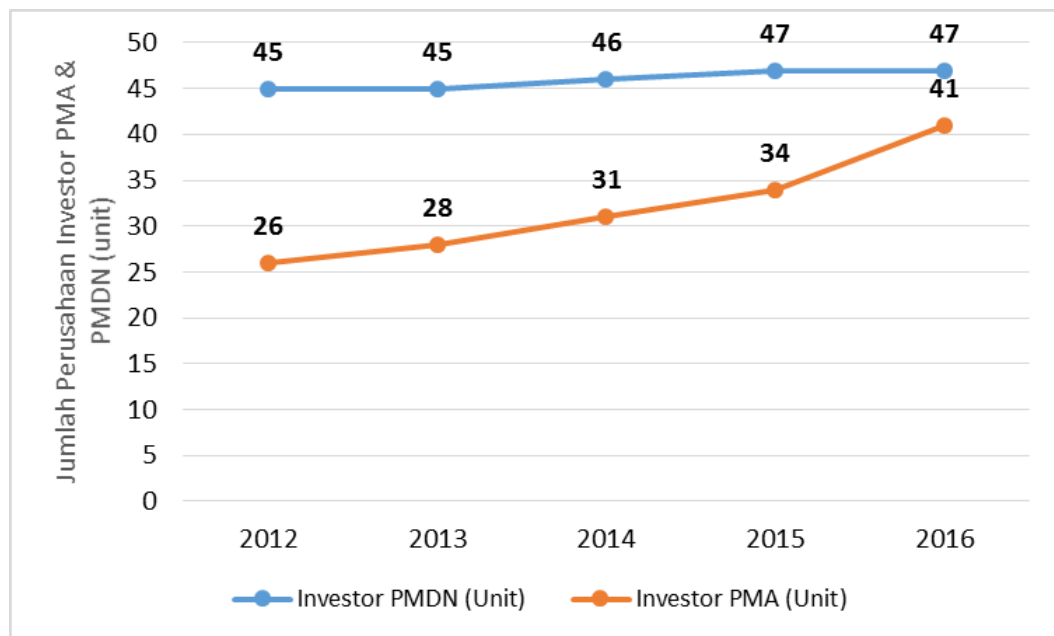
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2018

4.4.3 Kerjasama Daerah

Disisi lain, masuknya penduduk dapat digunakan untuk meningkatkan iklim investasi dan kerjasama daerah. Data dari Bagian Perekonomian, Pengembangan, Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama mencatat terdapat 235 perjanjian kerjasama daerah yang dimulai sejak tahun 2015 hingga 2030. Setiap bagian dari nilai dan lama waktu kerjasama tidak dapat diseragamkan karena disesuaikan dengan kebijakan kerjasama dan tawar-menawar yang berlaku pada saat dilakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta meliputi kerjasama antar daerah dan kerjasama institusi pelayanan. Salah satu kerjasama antar daerah yang melibatkan pelajar dan

mahasiswa adalah berdirinya asrama mahasiswa. Total ada sekitar 73 asrama mahasiswa dari berbagai daerah yang didirikan di DIY oleh pemerintah daerah masing-masing. Hasil penelitian Badan Kesbangpol DIY pada tahun 2018, terjadi Perpecahan bilateral antara penduduk asli dan pendatang atau antar asrama. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama daerah agar tercipta kondisi yang konsusif antar asrama dan antar penduduk asli Kota Yogyakarta.

Peningkatan iklim investasi dan kesejahteraan merupakan dampak positif dari kerjasama daerah. Arah RPJMD tahun 2017-2022 Kota Yogyakarta memfokuskan investasi banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan dan jasa; transportasi; informasi dan komunikasi; kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan yang disesuaikan fungsi perkotaan Kota Yogyakarta. Tren investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Adapun perkembangan tren investasi dapat dilihat dari Gambar 4.9.

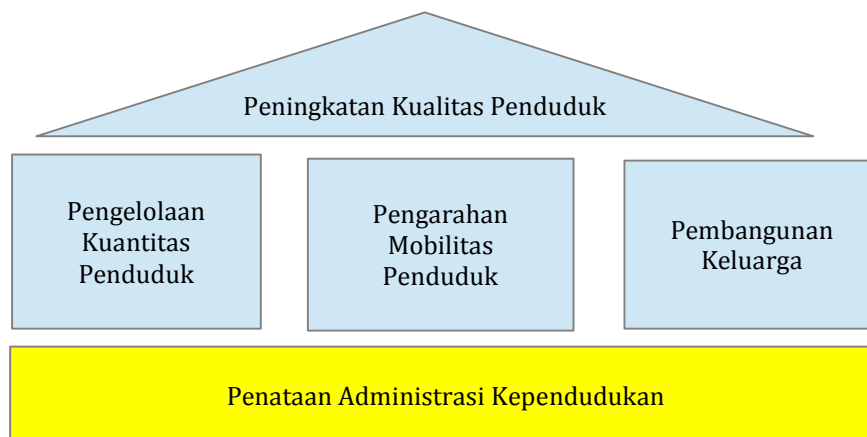


Gambar 4.9 Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: BKPM Provinsi DIY, 2017

4.5 Data dan Informasi Kependudukan

Salah satu bidang dalam 5 bidang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah tentang data dan informasi kependudukan. Secara spesifik data dan informasi kependudukan di GDPK disebut dengan bidang penataan administrasi kependudukan (Lihat Gambar 4.10). Dalam bagan yang menggambarkan 5 bidang GDPK, data dan informasi diletakkan di posisi paling bawah. Artinya bahwa pengembangan sistem informasi data kependudukan merupakan dasar atau pondasi yang penting dalam GDPK ini.



Gambar 4. 10 Posisi Data Informasi Kependudukan dalam Kerangka GDPK

Sumber: Dokumen GDPK Nasional

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka penataan administrasi kependudukan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan dua hal. Pertama Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengelolaan database kependudukan. Kedua Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

4.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan

Penataan dan Pengelolaan database kependudukan tertuang dalam salah satu tujuan administrasi kependudukan³. Dalam tujuan tersebut disebutkan bahwa tertib database kependudukan meliputi terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota; database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung (online) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung (online) dengan instansi pengguna. Di Kota Yogyakarta sendiri, pengelolaan database kependudukan sudah dapat dikatakan baik.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pemutakhiran database kependudukan; meningkatkan kualitas database kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan

³ <http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan>

menggunakan SIAK secara online. Selain itu strategi lain yang diterapkan antara lain dengan percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Perwal Peraturan Walikota (Perwal) maupun Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum bagi pelanggaran administrasi kependudukan. Contoh dokumen tentang penyelenggaraan Adminduk di Kota Yogyakarta antara lain Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perwali Kota Yogyakarta No. 10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dalam rangka menggambarkan kondisi penataan administrasi kependudukan di lingkungan Kota Yogyakarta, beberapa indikator dipilih. Pemilihan indikator didasarkan pada kelengkapan data adminduk yang tersedia di Kota Yogyakarta dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan yang menggambarkan penataan administrasi yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hal tersebut beberapa indikator yang terpilih antara lain kepemilikan penduduk atas dokumen KTP-el, kepemilikan penduduk atas dokumen kartu keluarga, kepemilikan penduduk atas dokumen akta kelahiran, kepemilikan penduduk atas dokumen akta kematian dan kepemilikan penduduk atas dokumen Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu untuk menggambarkan kondisi tertib administrasi kependudukan, akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan di Kota Yogyakarta.

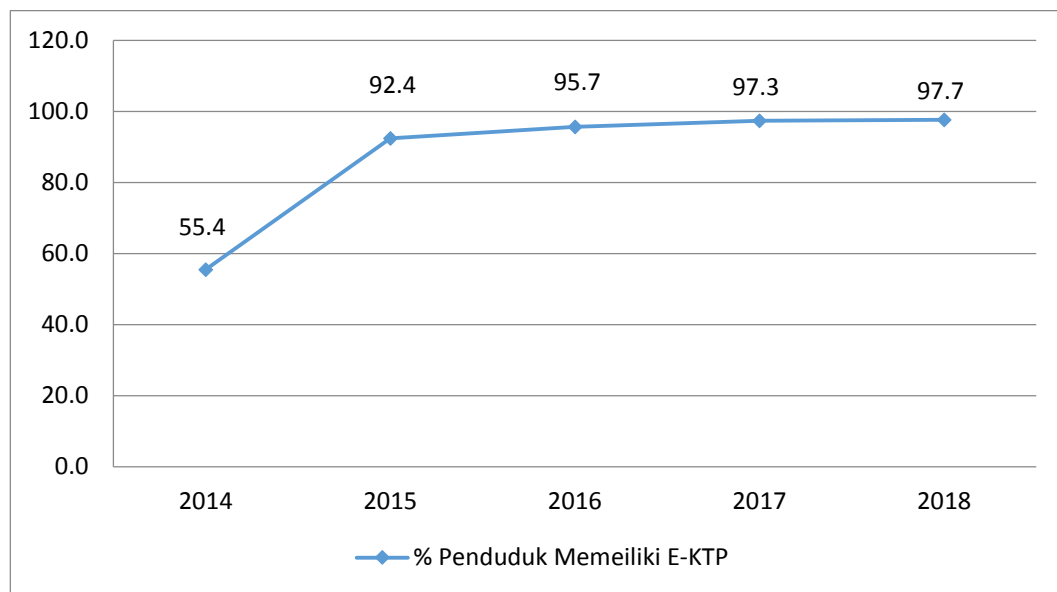
4.5.2.1 Kepemilikan Dokumen KTP-El

Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTP atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program KTP-el ini di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut salah satunya adalah Kota Yogyakarta, bersama dengan kota lain seperti Padang, Makasar, dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011. KTP-el sendiri memiliki beberapafungsi dan kegunaan. Diantara fungsi dan kegunaan KTP-El diantaranya adalah:

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Capaian kepemilikan KTP-El sendiri di Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan hal yang baik. Hal tersebut dilihat dari tren yang ditunjukkan dari persentase kepemilikan KTP-El selama 5 tahun yang terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, persentase kepemilikan KTP-El meningkat dari 55,4 persen pada tahun 2014 menjadi 97,7 persen pada tahun 2018 (Lihat Gambar 4.11). Artinya pada tahun 2018 ini, dari 100 penduduk Kota Yogyakarta yang wajib memiliki KTP-El sebanyak 98 orang sudah memiliki KTP-El. Hal ini sungguh merupakan capaian yang sangat baik.



Gambar 4. 11 Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-El di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

Berdasarkan Gambar 4.11, selama 5 tahun capaian, kenaikan kepemilikan periode 2014 ke 2015 merupakan kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Selama dua tahun ini terjadi kenaikan sebesar 35 persen, yaitu dari capaian semula sebanyak 55,4 persen menjadi 92,4 persen pada tahun berikutnya. Terjadinya kenaikan secara signifikan antara 2014-2015 disebabkan oleh perubahan kebijakan penerbitan dokumen/blanko KTP-El yang semula pada 2014 oleh pusat menjadi oleh pemerintah daerah pada 2015. Pada 2014, penerbitan KTP-El sepenuhnya dikelola oleh pusat sehingga ketika blanko KTP-El habis, daerah tidak dapat menerbitkannya dan harus menunggu blanko dikirim dari pusat. Tetapi semenjak 2015, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menerbitkan blanko KTP-El sendiri sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

Pasca 2015, tren kenaikan persentase penduduk E-KTP terus mengalami kenaikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan kepemilikan

ini di Kota Yogyakarta. Salah satu faktor tersebut adalah sudah tingginya kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta akan pentingnya kepemilikan KTP-El. Masyarakat yang sudah wajib memiliki KTP-El (17 tahun ke atas) akan secara mandiri mengurus kepemilikan KTP-El sendiri-sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lain yang turut menyumbang terus naiknya kepemilikan KTP-El di Kota Yogyakarta adalah terus digalakkannya sosialisasi yang intensif ke masyarakat oleh Dukcapil dan adanya program jemput bola ke masyarakat. Upaya program jemput bola ke masyarakat ini sendiri tercatat telah dilakukan beberapa kali, utamanya sasaran ditujukan kepada wajib KTP-El pada usia pemula yang dilaksanakan di SMA/SMK di Kota Yogyakarta.

Pada level kecamatan, capaian kepemilikan penduduk yang memiliki dokumen KTP-El menunjukkan hal yang baik pula. Dalam hal ini memiliki arti bahwa tidak ada kecamatan yang menunjukkan ketertinggalan yang sangat *jomplang* dibandingkan kecamatan lainnya. Dengan kata lain capaian kepemilikan KTP-El di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta hampir sama antara satu dengan lain. Meskipun jika dilihat angkanya, beberapa kecamatan terus menjadi daerah dengan capaian yang selalu tinggi dan ada beberapa daerah dengan capaian yang selalu rendah di Kota Yogyakarta selama periode 2014-2018.

Tabel 4. 56 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki KTP-El Menurut Kecamatan, 2014-2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Tegalrejo	55,2	92,3	95,9	97,6	97,9
Jetis	54,1	90,6	94,0	96,4	96,8
Gondokusuman	50,3	91,6	95,6	97,0	97,4
Danurejan	54,9	93,9	96,0	97,6	97,7
Gedongtengen	55,8	91,3	94,0	96,1	96,6
Ngampilan	56,1	93,3	96,4	97,8	98,0
Wirobrajan	57,1	93,6	96,5	97,4	97,8
Mantrijeron	55,0	92,1	95,2	96,9	97,3
Kraton	54,6	92,4	95,4	97,3	97,6
Gondomanan	53,4	92,9	96,3	97,7	98,0
Pakualaman	55,2	94,4	96,4	97,6	97,8
Mergangsan	56,9	93,0	96,4	97,9	98,1
Umbulharjo	57,1	91,7	95,5	97,4	97,7
Kotagede	60,0	93,6	96,9	98,1	98,4
Kota Yogyakarta	55,4	92,4	95,7	97,3	97,7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

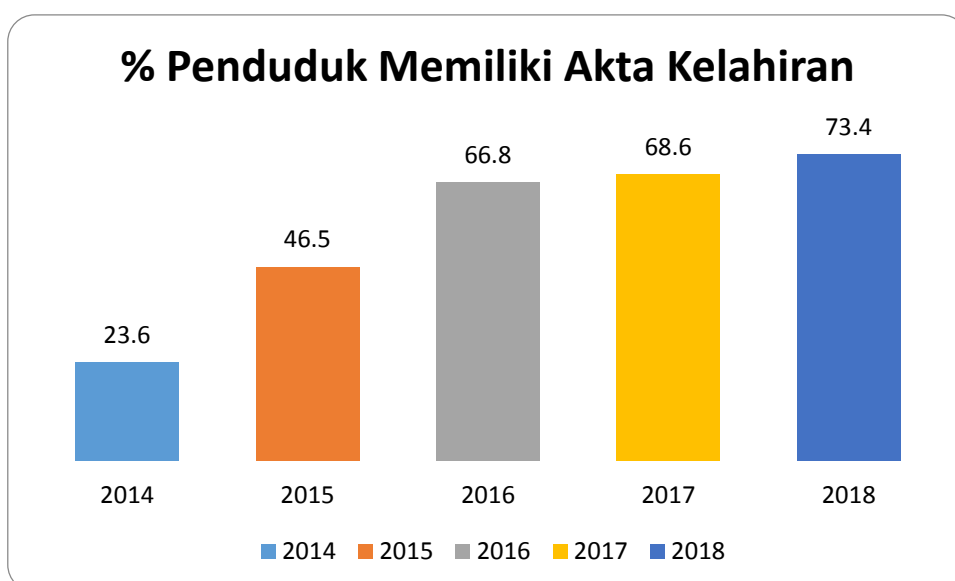
Keterangan: ■ = Capaian tertinggi
■ = Capaian terendah

Berdasarkan Tabel 4.56, beberapa daerah yang selalu memiliki capaian tinggi dibandingkan daerah lain adalah Kecamatan Kotagede, Pakualaman dan Mergangsan. Tiga kecamatan ini selalu memiliki capaian yang tinggi dibandingkan kecamatan lain selama periode 2014-2018. Sedangkan kecamatan dengan capaian yang selalu terkecil dibandingkan kecamatan lain adalah Kecamatan Jetis, Gondokusuman dan Gedongtengen. Ke depan, dalam rangka meningkatkan capaian kepemilikan KTP-El, ketiga kecamatan yang disebutkan terakhir harus diprioritaskan dengan tidak mengabaikan kecamatan lain yang ketercapaiannya sudah baik.

4.5.2.2 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Salah satu target terukur dalam pembangunan SDGs pada tujuan ke 16 adalah pada 2030 menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk registrasi kelahiran. Sebagai salah satu negara yang mengadopsi SDGs maka tujuan tersebut juga harus dicapai oleh Indonesia. Artinya pada tahun 2030, seluruh penduduk Indonesia ditargetkan harus tercatat identitasnya secara legal, terkhusus adalah teregistrasi kelahirannya.

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang memuat data autentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi mengenai akta kelahiran meliputi informasi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Dengan demikian, pencatatan kelahiran adalah bukti sah mengenai status anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak nantinya (Alfana, 2017).



Gambar 4. 12 Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

Capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta sendiri dapat dikatakan memuaskan jika dilihat perkembangannya. Sejak tahun 2014-2018 peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran sangat signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta meningkat 49 persen (Gambar 4.12). Saat ini, pada 2018, capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta sebesar 73,4 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibandingkan seluruh penduduk di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Gambar 4.12, kenaikan capaian paling tinggi terlihat terjadi pada tahun 2014-2015. Saat itu kenaikan yang terjadi bahkan sampai hampir 2 kali lipat. Meskipun dalam dua tahun terakhir ini kenaikannya tidak secepat 2014-2015, tetapi dengan tren positif yang terus terjadi diharapkan capaian 100 persen kepemilikan akta kelahiran dapat tercapai dalam 10 sampai 15 tahun ke depan.

Tabel 4. 57 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kecamatan, 2014-2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Tegalrejo	31,5	51,7	68,7	70,3	73,2
Jetis	20,5	39,9	62,4	65,1	73,2
Gondokusuman	14,9	49,9	66,1	67,9	74,1
Danurejan	13,8	37,3	60,7	63,2	73,7
Gedongtengen	14,4	38,6	60,6	62,6	73,9
Ngampilan	23,0	43,7	65,5	66,8	73,8
Wirobrajan	38,8	56,5	71,0	72,1	73,0
Mantrijeron	24,1	52,0	68,4	70,0	73,3
Kraton	20,0	40,8	65,5	67,4	75,2
Gondomanan	22,5	40,8	63,2	65,5	75,4
Pakualaman	23,9	47,0	63,6	65,1	74,7
Mergangsan	20,8	40,8	64,3	66,2	73,9
Umbulharjo	28,9	49,9	70,2	72,1	72,2
Kotagede	23,6	45,6	71,7	72,8	72,6
Kota Yogyakarta	23,6	46,5	66,8	68,6	73,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

Keterangan: = Capaian tertinggi

■ = Capaian terendah

Berdasarkan kecamatan, capaian kepemilikan akta kelahiran juga menunjukkan pola yang sama dengan capaian tingkat kota. Secara umum, pola capaian kepemilikan di semua kecamatan mengalami peningkatan sejak 2014-2018. Berdasarkan Tabel 4.57, tercatat hanya Kecamatan Kotagede yang menunjukkan anomali pola umum. Anomali tersebut terjadi pada 2017-2018 dimana capaian kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan. Meskipun penurunan capaian yang terjadi tidak demikian besar (0,2 persen), tetapi hal ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut agar tren penurunan tidak berlanjut di taun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan Tabel 4.57, kecamatan yang menunjukkan capaian kepemilikan akta kelahiran yang baik antara lain Tegalrejo, Mantrijeron, Umbulharjo dan Kotagede. Sedangkan Kecamatan yang memiliki capaian terendah dari 2014-2017 adalah Danurejan. Meskipun dalam empat tahun, Kecamatan Danurejan berada pada capaian yang terendah akan tetapi capaian pada 2018 nilainya sudah mengalami peningkatan dan sudah dikategorikan pada capaian yang baik.

Dalam rangka peningkatan kepemilikan akta kelahiran, perlu dieliminir segala sesuatu yang menjadikannya hambatan. Alfana (2017) menyebutkan bahwa secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak memiliki akta kelahiran. Beberapa faktor tersebut antara lain 1.) akta kelahiran belum terbit; 2.) tidak mempunyai biaya untuk mengurus; 3.) tempat pengurusan akta jauh, 4.) tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatat/tidak tahu cara mengurus; 4.) tidak merasa perlu/malas mengurus 5.) alasan lainnya. Dari alasan-alasan tersebut, penyebab paling banyak tidak memiliki akta kelahiran di Indonesia adalah tidak mempunyai biaya untuk mengurus. Sedangkan di DIY, faktor utama seseorang tidak memiliki akta kelahiran adalah tidak merasa perlu/malas mengurus dan tidak memiliki biaya untuk mengurus. Di Kota Yogyakarta sendiri, identifikasi permasalahan seperti ini juga perlu dilaksanakan agar kebijakan yang nantinya dilakukan dapat fokus dan tepat sasaran.

4.5.2.3 Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga

Indikator yang dapat diukur dari pencapaian kepemilikan dokumen kartu keluarga adalah persentase kepemilikan kartu keluarga. Indikator ini merupakan hasil bagi antara keluarga yang memiliki dokumen kartu keluarga dengan jumlah seluruh keluarga Kota Yogyakarta yang lapor ke Dukcapil. Berdasarkan capaian kepemilikan kartu keluarga, selama 2014-2018 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan.

Berdasarkan Tabel 4.52, persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga di Kota Yogyakarta sebesar 100 persen. Artinya bahwa dari seluruh keluarga yang melaporkan dan terdata ke Dukcapil Kota Yogyakarta,

seluruhnya sudah tertib dokumen kartu keluarga. Bahkan kondisi ini telah terjadi sejak 2014 sampai dengan saat ini.

Kondisi serupa juga terjadi jika kita menurunkannya sampai level kecamatan. Pada level kecamatan, seluruh keluarga di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta hampir seluruhnya telah memiliki kartu keluarga. Hal ini dapat dilihat dari capaian per kecamatan yang banyak menunjukkan nilai 100 persen. Tercatat hanya beberapa kecamatan dan tahun tertentu saja yang mengalami capaian di bawah 100 persen. Contohnya adalah di Jetis dan Danurejan pada 2016 dan Gedongtengen pada 2017. Kondisi yang baik ini tentu perlu terus dipertahankan. Apalagi fungsi dokumen sangat penting dan memiliki hubungan yang erat dengan persyaratan administratif di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan sektor lainnya.

Tabel 4. 58 Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta, 2014-2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Tegalrejo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jetis	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0
Gondokusuman	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Danurejan	100,0	100,0	99,4	100,0	100,0
Gedongtengen	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0
Ngampilan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Wirobrajan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mantrijeron	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kraton	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gandomanan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pakualaman	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Mergangsan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Umbulharjo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kotagede	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kota Yogyakarta	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

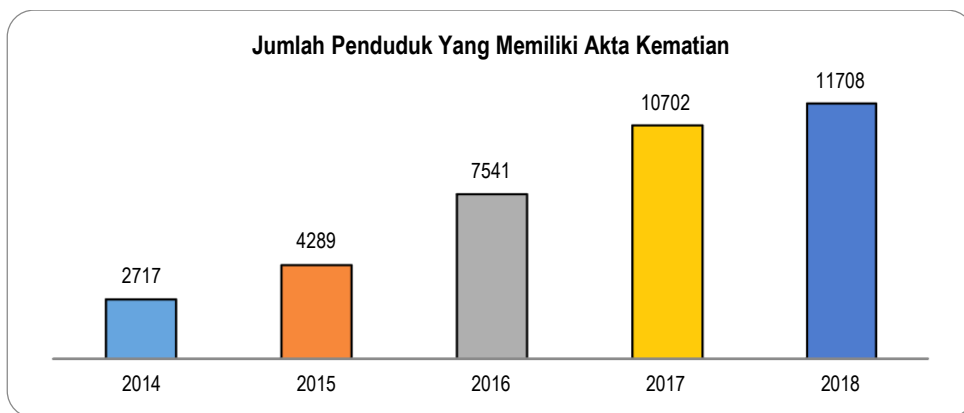
4.5.2.4 Kepemilikan Dokumen Akta Kematian

Kepemilikan dokumen akta kematian juga menjadi salah satu indikator dalam melihat deskripsi kondisi terini aspek data dan informasi kependudukan. Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Penduduk yang meninggal harus dilaporkan untuk dihapus.

Akta kematian bermanfaat bagi kita untuk mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiunan janda/duda, mengurus klaim asuransi, dan juga persyaratan untuk melaksanakan perkawinan kembali. Selain itu tujuan pembuatan akta kematian juga untuk mencegah data data almarhum di salah gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, bagi pemerintah tujuannya untuk memastikan keakuratan data penduduk potensial pemilih dalam rangka pemilihan umum atau pilkada. Hal ini untuk mengantisipasi jangan sampai penduduk yang sudah meninggal tetap mendapatkan hak suara.

Berdasarkan data Dari Dukcapil Kota Yogyakarta, jumlah kepemilikan akta kematian meningkat sangat tajam. Indikasi dari fenomena ini adalah semakin baiknya pelaporan tentang akata kematian di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Gambar 4.13 jumlah akta kematian yang diterbitkan baru berjumlah 2.717 saja. Sedangkan pada 2018, jumlahnya naik drastis menjadi 11.708. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian keluarga dan kerabat yang semakin tinggi turut memegang peran penting dari naiknya kepemilikan akta kematian ini. Selain itu kebutuhan akan surat kematian dalam rangka pengurusan warisan, klaim asuransi, dan kebutuhan lain juga mendorong tingginya pelaoran akta kematian di Kota Yogyakarta.



Gambar 4. 13 Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kematian di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

Capaian kepemilikan akta kematian di tingkat kecamatan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 4.59, capaian kepemilikan akta kematian di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan sejak 2014 sampai saat ini. Beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan kepemilikan akta kematian secara signifikan antara lain Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman. Secara detail, capaian kepemilikan akta kematian per kecamatan dapat dilihat pada tabel tersebut.

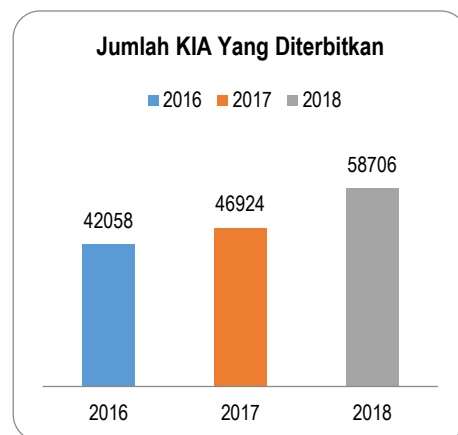
Tabel 4. 59 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki Akta Kematian Menurut Kecamatan, 2014-2018

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018
Tegalrejo	222	367	634	898	978
Jetis	164	257	474	685	763
Gondokusuman	304	471	790	1106	1214
Danurejan	142	234	422	593	640
Gedongtengen	160	247	410	580	632
Ngampilan	197	261	424	595	652
Wirobrajan	168	270	499	721	788
Mantrijeron	176	332	609	896	983
Kraton	147	229	454	624	686
Gondomanan	118	185	308	429	471
Pakualaman	99	143	221	328	354
Mergangsan	225	372	649	904	980
Umbulharjo	452	673	1150	1637	1788
Kotagede	143	248	497	706	779
Kota Yogyakarta	2717	4289	7541	10702	11708

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

4.5.2.5 Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 42 disebutkan bahwa masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah. Selain itu disebutkan bahwa pemegang KIA apabila meninggal dunia mendapatkan santunan kematian.



Gambar 4. 14 Jumlah KIA yang Diterbitkan di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

Kota Yogyakarta terpilih sebagai daerah percontohan nasional penerbitan KIA⁴. Berdasarkan capaiannya, kepemilikan dokumen KIA di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dalam tiga tahun terakhir, sudah terdapat 16.000 lebih penambahan KIA yang dimiliki oleh anak di Kota Yogyakarta. Peningkatan ini terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan Dukcapil Kota Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain program jemput bola siswa SD-SMP⁵. Pada 2018 sendiri, sampai Agustus telah ada 58.706 KIA yang diterbitkan (Lihat Gambar 4.14).

Pada level kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan kepemilikan KIA dalam 2016-2018. Bahkan pada 2017-2018, peningkatannya secara umum mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari capaian 2016-2017 di seluruh kecamatan. Peningkatan yang terjadi di seluruh kecamatan ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, secara lebih luas, yakni pada level DIY setiap anak yang telah berumur 7 (tujuh) tahun harus memiliki KIA. Hal tersebut diatur di Perda DIY Tahun 2015 dalam pasal 30. Kota Yogyakarta sebagai salah satu bagian administratif dari DIY memiliki konsekuensi untuk melaksanakan amanah tersebut. Hasilnya pasca 2015, peningkatan kepemilikan KIA di Kota Yogyakarta terus terjadi dan hal tersebut berimbas juga pada peningkatan kepemilikan di level kecamatan.

Kedua, program jemput bola Dukcapil Kota Yogyakarta juga hampr menyasar ke seluruh kecamatan-kecamatan. Ketiga, pelayanan pembuatan KIA dapat dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Pendekatan layanan ini berimbas pada kemudahan mengakses pembuatan KIA dan berujung pada naiknya

Tabel 4. 60 Jumlah Kepemilikan KIA di Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan, 2016-2018

Kecamatan	2016	2017	2018
Tegalrejo	2714	3069	4168
Jetis	2261	2513	3093
Gondokusuman	4695	5451	7074
Danurejan	2728	3041	3802
Gedongtengen	2215	2438	2895
Ngampilan	2587	2954	3347
Wirobrajan	1343	1482	2191
Mantrijeron	3801	4026	4748
Kraton	2053	2262	2809
Gondomanan	1098	1177	1921
Pakualaman	1060	1244	1551
Mergangsan	4348	4837	5681
Umbulharjo	6087	6688	8655
Kotagede	5068	5742	6771
Kota Yogyakarta	42058	46924	58706

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah 2018

⁴ <http://jogja.sorot.co/berita-48286-jadi-percontohan-nasional-penerbitan-kia-di-kota-yogya-baru-capai-40-persen.html>

⁵ jogja.tribunnews.com/2017/10/08/disdukcapil-kota-yogyakarta-tingkatkan-jemput-bola-pembuatan-kia-tahun-depan

kepemilikan KIA di masing-masing kecamatan. Warga yang anaknya ingin memperoleh KIA dapat dilayani langsung di seluruh kecamatan karena di setiap kecamatan sudah dilengkapi dengan mesin pencetak KIA⁶.

Berdasarkan Tabel 4.60, beberapa kecamatan mengalami peningkatan kepemilikan KIA yang sangat tinggi. Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, Tegalrejo dan Kotagede merupakan kecamatan-kecamatan yang mengalami penambahan KIA yang sangat tinggi. Karena penambahan ini pula, kecamatan tersebut menjadi kecamatan dengan kepemilikan KIA tertinggi dibanding kecamatan lain di Kota Yogyakarta. Dari tabel tersebut, berdasarkan jumlahnya, kita dapat melihat beberapa kecamatan yang membutuhkan perhatian utamanya dalam peningkatan kepemilikan KIA. Beberapa Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Gondomanan, Pakualaman dan Wirobrajan.

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/08/disdukcapil-kota-yogyakarta-tingkatkan-jemput-bola-pembuatan-kia-tahun-depan?page=2>

BAB V

KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

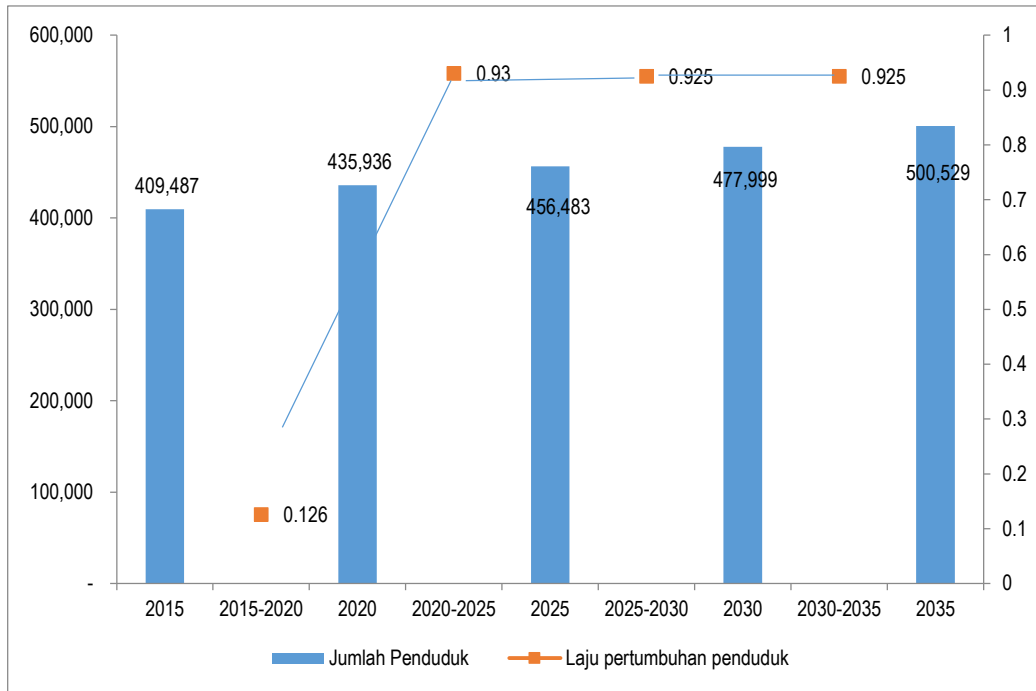
5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan di Kota Yogyakarta yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Selain meningkatkan kualitas penduduk utamanya perempuan sebagai parameter tidak langsung pengendalian jumlah penduduk, maka proses demografi sebagai variable langsung perlu dijaga konsistensinya. Tiga parameter tersebut adalah fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk.

5.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

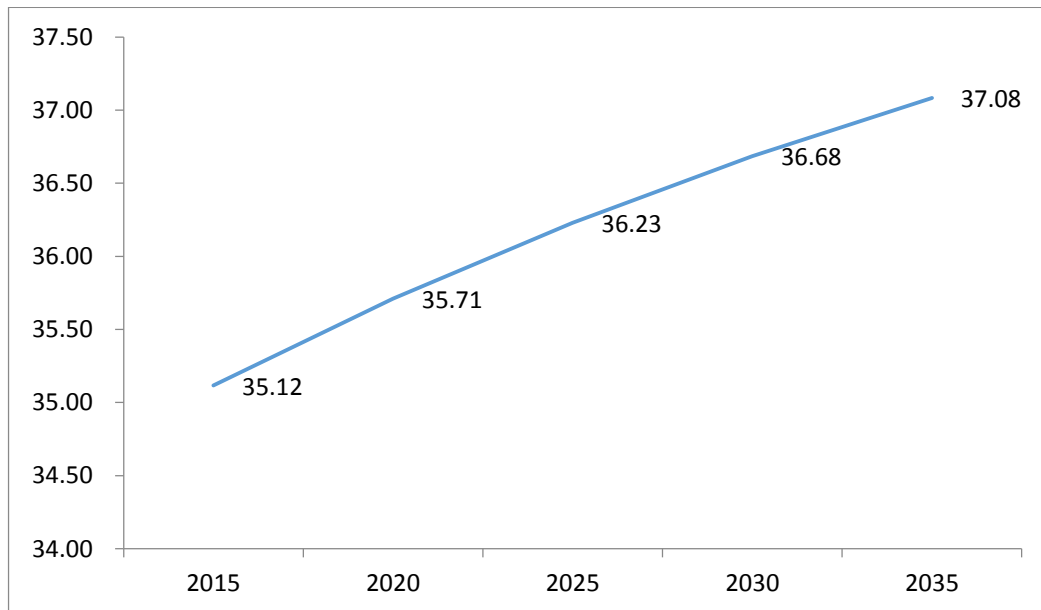
Berikut ini adalah proyeksi penduduk Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan penduduk yang bersifat konstan, meskipun kecenderungan data laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Dalam hal ini tantangan Kota Yogyakarta adalah mempertahankan laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak terus mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi ini bisa disimpulkan kondisi kependudukan Kota Yogyakarta di masa mendatang banyak dipengaruhi oleh migrasi masuk. Jumlah migran masuk, khususnya usia produktif dapat meningkat di masa mendatang khususnya untuk tujuan ekonomi atau mencari pekerjaan. Penduduk stasioner nampaknya belum dapat tercapai hingga tahun 2035.

Angka beban ketergantungan yang relatif rendah harus dioptimalkan secara ekonomi atau dari sisi peningkatan pengetahuan. Berangkat dari Yogyakarta berbagai inovasi dan rekayasa teknologi akan muncul sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan mudak terwujud. Permasalahan muncul manakala angka beban ketergantungan yang rendah ini tidak bisa dioptimalkan fungsi dan peluangnya. Kota Yogyakarta sebagai Kota Jasa harus mampu mencari peluang-peluang bisnis bagi semua masyarakat Yogyakarta jangan justru menciptakan ketimpangan atau jurang pemisah antara yang kaya dan miskin.



Gambar 5.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2015-2035

Sumber: Disdukcapil, 2014 diolah



Gambar 5.2 Tren Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta 2015-2035

Sumber: BPS, dan Disdukcapil, Diolah, 2017

5.3 Fertilitas

Penduduk Tumbuh Seimbang dengan syarat angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan sudah tercapai. Tantangan pemerintah Kota Yogyakarta justru terletak pada bagaimana upaya mempertahankan TFR rendah agar tidak terus merangkak turun. Tabel 5.1 merupakan proyeksi perhitungan TFR berdasarkan *Level of Mortalitas* Kota Yogyakarta. Perkiraan angka TFR dihitung berdasarkan formula dengan scenario angka kelahiran kasar diketahui. Terlihat bahwa TFR telah mencapai angka kelahiran kurang dari 2,1 dan diharapkan terus dipertahankan untuk tidak lebih dari 2,1. Dengan skenario paling optimis, TFR sana dengan 1,50 akan tercapai pada tahun 2035. Sementara tingkat kelahiran kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR) diharapkan terus menurun dari 15,7 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015 menjadi 8,8 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2035.

**Tabel 5. 1 Proyeksi TFR dan CBR
2015-2035**

Tahun	TFR	CBR
2015	1,60	15,7
2020	1,58	14,5
2025	1,55	11,8
2030	1,53	9,5
2035	1,50	8,8

Keterangan:

Data Dasar TFR 2010=1,63 (Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS), skenario sedang dengan asumsi TFR 2035 = 1,50

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara teoritis, yaitu.

a. Usia kawin pertama

Usia kawin pertama berpengaruh terhadap tingkat kelahiran. Semakin muda usia kawin pertama, khususnya perempuan, maka potensi melahirkan jumlah anak besar semakin tinggi seiring dengan semakin panjangnya masa reproduksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa usia kawin pertama berisiko meningkatkan dua kali angka kelahiran, sehingga kedepan usia kawin pertama diharapkan terus mengalami peningkatan. Apabila tahun 2012 rata-rata median umur kawin pertama pada perempuan usia 20-49 adalah 22 tahun, maka diharapkan angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2035 menjadi 25,6 tahun.

b. Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi

Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate/CPR*) merupakan presentase perempuan usia produktif yang menggunakan atau yang pasangannya menggunakan suatu metode kontrasepsi pada waktu tertentu. Dalam sejumlah penelitian, prevalensi pemakaian kontrasepsi sering disebut sebagai salah satu faktor penting penyumbang fertilitas. Ada hubungan negatif antara CPR dengan fertilitas, yaitu semakin tinggi angka prevalensi semakin rendah tingkat fertilitas. Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi di Kota Yogyakarta diharapkan terus meningkat dari 57,46 persen di tahun 2015 menjadi 58,08 persen di tahun 2035

Tabel 5. 2 Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi

Tahun	Persen
2015	57,46
2020	57,61
2025	57,77
2030	57,92
2035	58,08

Sumber: Data Sekunder, 2017

c. Kesejahteraan keluarga

Tingkat kesejahteraan keluarga berpengaruh terhadap angka kelahiran. Apabila tingkat kesejahteraan keluarga semakin baik, maka kemampuan keluarga untuk mengakses layanan keluarga berencana juga semakin baik. Dalam kondisi ini, keluarga tidak sejahtera ataupun keluarga sejahtera I harus menjadi perhatian pemerintah. Kelompok tersebut harus menjadi prioritas sasaran program keluarga berencana, sehingga diharapkan persentase keluarga tidak sejahtera dan sejahtera I yang mengikuti program keluarga berencana terus meningkat dari 73,80 persen di 2015 menjadi 84,85 persen di tahun 2035. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikuti program KB, diperkirakan mampu menurunkan angka kelahiran hingga 0,275.

Tabel 5. 3 Keluarga Pra KS dan KS I yang mengikuti Program KB

Tahun	Persen
2015	73,80
2020	76,42
2025	79,13
2030	81,94
2035	84,85

Sumber: Hasil Analisis, 2017

d. Akses PUS terhadap pelayanan KB

Selama ini PUS mengakses layanan KB di layanan pemerintah dan juga swasta. Pasangan Usia Subur tidak kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi karena layanan kesehatan tersedia memadai. Semua PUS di Kota Yogyakarta diharapkan dapat mengakses layanan KB.

Sejalan dengan itu, jumlah PUS yang kebutuhan KB nya tidak terpenuhi atau terkagetori sebagai *unmet need* perlu menjadi perhatian karena diduga hal itu berkaitan dengan tren semakin meningkatnya pola hidup 'back to nature'. Ada kecenderungan PUS untuk menghindari alat kontrasepsi modern dan menggunakan alat kontrasepsi tradisional atau bahkan tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan keyakinan mampu mencegah terjadinya konsepsi. Selain itu juga diduga berkaitan dengan kecenderungan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan dan partisipasi di pasar kerja, sehingga kedepan PUS kelompok ini diharapkan juga tetap dapat mengakses layanan KB sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan, sosial, ekonomi dan budayanya.

e. pendidikan perempuan

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya tentang kondisi pendidikan perempuan bahwa perempuan memegang peran kuat dalam keputusan ber KB. Sementara pengampilan keputusan seringkali didasari oleh pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu hal. Pertimbangan nilai positif dan kerugian yang didapat dalam memutuskan sesuatu adalah produk dari pengetahuan seseorang sebagai hasil dari proses pendidikan. Oleh karenanya, perempuan terdidik diduga memiliki kemampuan yang baik dalam memutuskan sesuatu, termasuk untuk memutuskan ber KB atau tidak, dibandingkan dengan perempuan tidak terdidik. Dengan kondisi seperti ini, proporsi perempuan terdidik diharapkan terus meningkat. Tingkat pendidikan tersebut dapat diidentifikasi dari proporsi perempuan yang menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Jumlah perempuan terdidik di Kota Yogyakarta diharapkan terus meningkat proporsinya hingga mencapai 23,53 persen di tahun 2035.

Tabel 5. 4 Perempuan Lulusan Perguruan Tinggi

Tahun	Persen
2015	13,95
2020	15,90
2025	18,12
2030	20,65
2035	23,53

Sumber: Hasil Analisis, 2017

5.4 Mortalitas

Ada beberapa ukuran kematian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematian di suatu wilayah, yaitu angka kematian kasar, angka kematian bayi, tingkat kematian balita dan angka kematian ibu. Angka kematian kasar menggambarkan banyaknya kematian per jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Angka kematian bayi menggambarkan banyaknya kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun per jumlah kelahiran hidup, sedangkan angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia kurang dari lima tahun dibagi jumlah anak berusia kurang dari lima tahun.

Apabila Kota Yogyakarta menginginkan agar jumlah penduduknya tidak terlalu besar di masa mendatang, tentu tingkat kelahiran harus dikendalikan seiring dengan kontrol terhadap ukuran-ukuran mortalitas tersebut.

Tingkat kematian kasar (*Crude Death Rate/CDR*) diperkirakan terus meningkat dari 6,3 di tahun 2015 menjadi 8,9 di tahun 2035. Sementara tingkat kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) diperkirakan terus mengalami penurunan dari 16,1 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2015 menjadi 11,1 per kelahiran hidup di tahun 2035. Dengan tingkat kematian bayi tersebut, Yogyakarta dapat digolongkan sebagai daerah dengan tingkat kematian bayi yang rendah.

Penurunan tingkat kematian bayi itu akan diiringi dengan semakin menurunnya kematian ibu dan balita. Penurunan tersebut berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta yang diduga semakin meningkat, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Sementara itu, angka harapan hidup diharapkan terus meningkat dari 74,6 tahun pada 2015 menjadi 77,3 tahun pada 2035.

Untuk bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan kesehatan harus terus ditingkatkan. Kesadaran perilaku hidup sehat, meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan. Kualitas kesehatan juga dipengaruhi baiknya kualitas pendidikan. Karena sosialisasi kesehatan dimulai dari pendidikan dasar bahkan sejak masih berada di pendidikan keluarga.

Tabel 5. 5 Perkiraan CDR, IMR dan Usia Harapan Hidup

Tahun	CDR	IMR	E ₀
2015	6,3	16,1	74,6
2020	6,7	14,8	75,3
2025	7,1	13,4	76,0
2030	7,8	12,1	76,7
2035	8,9	11,1	77,3

Sumber: Data Sekunder, 2017

5.5 Mobilitas

Mobilitas penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi kondisi penduduk di suatu wilayah. Di sejumlah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota lainnya, migrasi masuk merupakan penyumbang tingginya jumlah penduduk. Sementara di beberapa daerah seperti Gunung Kidul, migrasi juga menjadi penyebab utama menurunnya jumlah penduduk karena banyaknya penduduk yang bermigrasi keluar. Di Kota Yogyakarta, nampaknya migrasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika jumlah penduduk. Tahun 2011 tercatat penduduk Kota Yogyakarta bertambah 689 karena pengaruh migrasi masuk. Namun pada 2012 dan 2013, selisih antara penduduk masuk dan keluar menunjukkan angka minus. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang bermigrasi keluar lebih banyak dibandingkan migran masuk. Secara sederhana, hal itu berimplikasi pada berkurangnya penduduk Kota Yogyakarta. Meski secara absolut jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun itu tetap bertambah.

Tabel 5.6 Penduduk Datang dan Pindah di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Datang	9.920	5.835	5.833	9.293	11.781
Pindah	9.231	8.932	9.398	2.469	10.634
Selisih	689	-3.097	-3.565	6.824	1.147

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk seimbang antara jumlah penduduk dan daya tampung. Kota Yogyakarta menjalankan perannya sebagai pusat perkotaan menjadikan banyak pendatang yang beraktivitas di Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari perbedaan pada siang hari, banyaknya kendaraan akan menimbulkan kemacetan dan di malam hari kota akan menjadi sepi. Akan tetapi disisi lain, angka TFR di Kota Yogyakarta sudah rendah yaitu 1,94 (DIY). Jika penekanan dilakukan pada tingkat kelahiran, maka beberapa tahun yang akan datang kota akan kekurangan jumlah penduduk asli dan hanya diisi oleh pendatang. Kondisi seperti inilah yang harus diantisipasi oleh Kota Yogyakarta agar terjadi penduduk tumbuh seimbang, salah satu cara adalah dengan melakukan pengarahan mobilitas.

5.6 Peningkatan Kualitas Penduduk

5.6.1 Bidang Kesehatan

Kondisi yang diinginkan dalam bidang kesehatan adalah adanya 1) penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan angka harapan hidup; 2) peningkatan status gizi yang ditunjukkan dengan proporsi gizi masyarakat yang berada di level baik (tidak lebih, kurang bahkan buruk); dan 3) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, akses air bersih dan sanitasi layak.

Untuk mencapai kondisi kualitas penduduk yang diinginkan di atas, bidang kesehatan masih memerlukan upaya peningkatan pada beberapa hal, diantaranya:

a. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Angka kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta masih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tren AKI dari tahun 2015 hingga 2017 berada di atas 102. Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta hingga tahun 2017 masih di atas target yang ditentukan (7,5), yaitu sebesar 9,1. Oleh sebab itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berupaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan informasi kespro dan Pemberian Tablet Tambah darah pada Remaja melalui PKPR
- 2) Meningkatkan pelayanan konseling calon pengantin
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Antenatal Care (ANC)
- 4) Meningkatkan Pemanfaatan Buku KIA dengan Perwal No 34 Tahun 2014
- 5) Meningkatkan Kualitas Rujukan Melalui Manual Rujukan Maternal Neonatal
- 6) Meningkatkan kualitas pertolongan persalinan dan KB Pasca Salin
- 7) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nifas
- 8) Meningkatkan Kualitas Pelayanan neonatal esensial

b. Peningkatan Status Gizi

Kondisi yang diinginkan dari peningkatan status gizi adalah seratus persen penduduk Kota Yogyakarta memiliki status gizi yang baik, atau dengan kata lain tidak ada masyarakat yang memiliki status gizi kurang ataupun buruk. Status gizi yang baik menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih dan menyediakan gizi bagi dirinya

dan keluarga. Untuk mendukung terciptanya seratus persen gizi baik di Kota Yogyakarta, upaya yang perlu dilaksanakan adalah:

- 1) Terciptanya akses khusus bagi anak balita gizi buruk untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak secara gratis di Puskesmas Kota Yogyakarta
 - 2) Adanya kemudahan birokrasi untuk mendapatkan pelayanan konsultasi dokter spesialis anak bagi penderita gizi buruk sehingga tidak lagi dijumpai prosedur pelayanan yang panjang, berjenjang dan berbiaya tidak sedikit.
 - 3) Adanya pusat rehabilitasi bagi balita gizi buruk yang komprehensif.
- c. Efektifitas dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta menurut SPM (standar pelayanan minimum) SNI 03-1733-2004 sudah terpenuhi, bahkan melebihi kebutuhan. Dengan kata lain perlu adanya evaluasi terhadap jumlah fasilitas kesehatan yang sudah ada (eksisting), apakah perlu dikurangi atau tetap dipertahankan dengan meningkatkan akses dan keterjangkauan fasilitas kesehatan. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ijin baru atau perpanjangan ijin dari fasilitas kesehatan berdasarkan *track record* (kefektifan) dari fasilitas kesehatan. Hal lain yang dapat digunakan untuk bahan evaluasi efektifitas dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta selain pembatasan jumlah adalah sebaran fasilitas kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta dapat merata dan mudah untuk diakses penduduk.

- d. Pelayanan kesehatan yang optimal

Berdasarkan jumlahnya (kuantitasnya), fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta sudah memenuhi kebutuhan standar fasilitas pelayanan minimum di Indonesia. Oleh karena itu kondisi yang diharapkan dari pelayanan kesehatan ini adalah optimalisasi pelayanan kesehatan dan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang optimal di Kota Yogyakarta juga diarahkan pada bentuk-bentuk pencegahan penyakit seiring dengan meningkatkan pengobatan/penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat.

- e. Meningkatkan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, Akses Penduduk terhadap Air Bersih dan Sanitasi Layak

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA maupun DBD di Kota Yogyakarta menunjukkan angka di > 100 %, dengan demikian pemerintah Kota Yogyakarta hanya perlu menjaga penanganan penderita penyakit tersebut agar tetap di atas 100%. Secara umum, kondisi yang diinginkan dari peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak adalah:

- 1) Berkurangnya kasus penyebaran penyakit menular dan tidak menular. Berkurangnya kasus penyebaran penyakit ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pola hidup sehat penduduk Kota Yogyakarta sekaligus menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan jangkauan fasilitas kesehatan.
- 2) Tercapainya seratus persen penduduk Kota Yogyakarta yang mengakses air bersih dan sanitasi layak. Diharapkan dengan terpenuhinya air bersih dan sanitasi layak ini, penyebaran penyakit menurun dan penduduk dapat bertempat tinggal di lingkungan yang layak huni dan bebas kekumuhan.
- 3) Tercapainya seratus persen rumah tangga di Kota Yogyakarta yang ber - PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat).

5.6.2 Bidang Pendidikan

Kondisi yang diinginkan dalam bidang pendidikan adalah 1) peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta; 2) peningkatan dalam hal pendidikan formal, non formal dan informal yang ditunjukkan dengan menurunnya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta; dan 3) peningkatan pendidikan gender yang ditunjukkan dengan peningkatan pembangunan gender di Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk mencapai kondisi kualitas penduduk di bidang pendidikan yang baik seperti yang diinginkan di atas, maka dapat ditempuh melalui:

- Mengurangi angka putus sekolah di Kota Yogyakarta
- Mengurangi gap antara EYS dan MYS
- Konsistensi kebijakan pendidikan yang didorong untuk kejuruan (siapa kerja) atau menuju ke jenjang pendidikan di atasnya (Perguruan Tinggi)

5.6.2 Bidang Ekonomi

Kondisi yang diinginkan dalam bidang ekonomi adalah 1) peningkatan nilai PDRB yang konstan di semua sektor terutama di sektor-sektor basis Kota Yogyakarta. Diharapkan pula sektor-sektor basis tersebut dapat memacu

adanya *multiple effect* atau dampak penganda bagi perkembangan sektor lain; 2) peningkatan PDRB per kapita yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menurunkan angka ketimpangan; 3) peningkatan rasio penduduk yang bekerja yang menunjukkan serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Terserapnya tenaga kerja tersebut diharapkan disejalan dengan kenaikan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja tersebut adalah salah satu indikasi menurunnya angka pengangguran di kota Yogyakarta.

5.7 Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga sebagai pihak pertama dan utama dalam upaya menjaga kualitas kependudukan khususnya dalam pembangunan keluarga memerlukan pengawalan dalam menjalankan peran strategisnya. Membangun keluarga yang berkualitas dapat menciptakan suasana kependudukan yang kondusif dan ideal. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi kependudukan yang kondusif dan ideal terbukti dapat menunjang kualitas masyarakat yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari utamanya di Kota Yogyakarta sehingga menimbulkan rasa aman dan tentram. Didalam PP tersebut juga terdapat kebijakan nasional pembangunan keluarga antara lain:

- a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil, Bahagiam Sejahtera)
- b. Memberdayakan fungsi keluarga
- c. Memandirikan keluarga
- d. Memberdayakan kearifan lokal
- e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup
- f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- g. Memberdayakan peran serta masyarakat

Sedangkan tujuan dari pembangunan keluarga yang terdapat dalam Peraturan Presiden No 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan

keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, hal-hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan sah
3. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara
4. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga, berketahanan sosial dan kesejahteraan sosial

Kondisi tersebut dapat dicapai melalui sebuah rekayasa sosial yang terdiri dari penataan struktur keluarga, penguatan relasi sosial keluarga, pengembangan transformasi sosial keluarga, perluasan jaringan sosial keluarga.

Pembangunan kualitas keluarga berdasarkan pada ketakwaan kepada Ketuhanan yang Maha Esa dan perkawinan yang sah ditinjau dari aspek angka pernikahan Kota Yogyakarta, kondisi yang terjadi saat ini relatif aman. Selama 3 tahun sejak tahun 2015 hingga 2017, angka pernikahan Kota Yogyakarta relatif fluktuatif di angka yang tidak terlalu jauh namun mengalami naik turun setiap tahunnya. Sedangkan dilihat dari aspek perceraian, angka perceraian di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang stabil. Hal ini merupakan modal yang baik dalam mewujudkan pembangunan kualitas keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan yang sah berarti telah diakui secara hukum oleh negara. Perkawinan yang bertakwa kepada Ketuhanan yang Maha Esa diharapkan menghasilkan keluarga yang berlandaskan agama dan norma kesucilaan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Hal ini berhubungan langsung dengan poin kedua yakni membangun keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak ideal dalam keharmonisan yang berkeadilan dan kesetaraan gender. Keluarga yang selama perkawinannya telah sah dan bertakwa kepada Ketuhanan yang Maha Esa dapat menciptakan harmonisasi yang ideal dalam aktivitas berkeluarga termasuk mendidik anak. Pendidikan untuk anak mencakup pendidikan karakter, kesehatan, kemandirian, maupun hal-hal edukatif lainnya seperti keadilan dan kesetaraan gender. Angka pernikahan sah ini belum bisa menjadi acuan untuk data pernikahan yang sah karena terdapat beberapa kasus yang tidak menikah di Kota Yogyakarta tetapi menikah menumpang di kota/kabupaten lainnya

Wawasan nasional tidak dapat secara instan dimiliki oleh seseorang. Delapan fungsi keluarga yang telah disahkan secara nasional perlu diterapkan dalam setiap keluarga. Fungsi keluarga tersebut antara lain fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi sosial budaya, fungsi perlindungan, fungsi kesehatan dan reproduksi, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi sosialiasi dan pendidikan. Keluarga memiliki peran yang penting dalam membangun bangsa

dan negara. Dengan menerapkan fungsi keluarga tersebut maka diharapkan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas. Penerapan fungsi keluarga sebagai contoh adalah kegiatan makan bersama, beribadah bersama, musyawarah mufakat dan sebagainya.

Poin selanjutnya yaitu membangun dan merencanakan sumber daya keluarga yang berkualitas dan berketahanan sosial. Perencanaan sumber daya keluarga dan membangun keluarga yang berketahanan serta kesejahteraan keluarga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembinaan keluarga balita dan anak
- b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/mahasiswa
- c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia
- d. Pemberdayaan ekonomi keluarga

Program-program pembinaan keluarga tersebut telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Kedepan jumlah kelompok untuk setiap pembinaan perlu ditingkatkan untuk setiap kecamatan. Pembinaan keluarga balita dan anak sangat penting bagi orang tua dalam mengamati tumbuh kembang anak serta kemungkinan permasalahan yang terjadi pada balita. Pembinaan kelompok remaja dan pembinaan pusat informasi dan konseling remaja sangat penting agar orang tua dapat mendidik anaknya dengan benar, dapat mengurangi kenakalan remaja serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembinaan lansia dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia dan meningkatkan kualitas hidup lansia sehingga mengurangi permasalahan lansia. Sedangkan pemberdayaan ekonomi keluarga diharapkan mampu meningkatkan peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Dengan menjalankan pembinaan-pembinaan ini diharapkan mampu menciptakan keluarga yang berketahanan dan sejahtera. Pembelajaran-pembelajaran dalam keluarga yang mencakup edukasi kepada anak secara berjenjang melalui perencanaan sumber daya keluarga dapat menciptakan wawasan nasional yang baik sehingga selanjutnya dapat menciptakan kontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

5.8 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang antara jumlah penduduk dan daya tampung. Pengarahan persebaran penduduk sebaiknya menyoar ke wilayah penyangga Kota Yogyakarta menjalankan perannya sebagai pusat perkotaan diharapkan dapat menjadi katalisator pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan agar penduduk dapat tersebar secara merata. Selain itu, besarnya aliran migrasi masuk dapat dijadikan

potensi kerjasama antar daerah terutama daerah disekitar Kota Yogyakarta untuk meningkatkan iklim investasi daerah. Disisi lain, banyaknya migrasi masuk setiap tahunnya, diharapkan akan terjadi integrasi penduduk antara penduduk pendatang dan setempat. Sehingga potensi konflik bilateral yang bisa muncul akibat perbedaan budaya dua kelompok dapat ditekan.

Aliran migrasi masuk ke Kota Yogyakarta baik secara permanen maupun non permanen diharapkan tidak membuat penduduk asli merasa terancam. Jika aliran migrasi masuk terus terjadi, maka dapat menyebabkan pemaksaan pindah penduduk atau transmigrasi besar-besaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan penduduk agar tercipta jumlah penduduk seimbang.

Perencanaan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sinergi ketersediaan data, peraturan/kebijakan dan implementasi dibutuhkan untuk mengatur jumlah penduduk masuk dan keluar, selain itu dapat digunakan untuk menunjang kesempatan kerja yang memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas sesuai kemampuan yang dimiliki.

5.9 Data dan Informasi Kependudukan

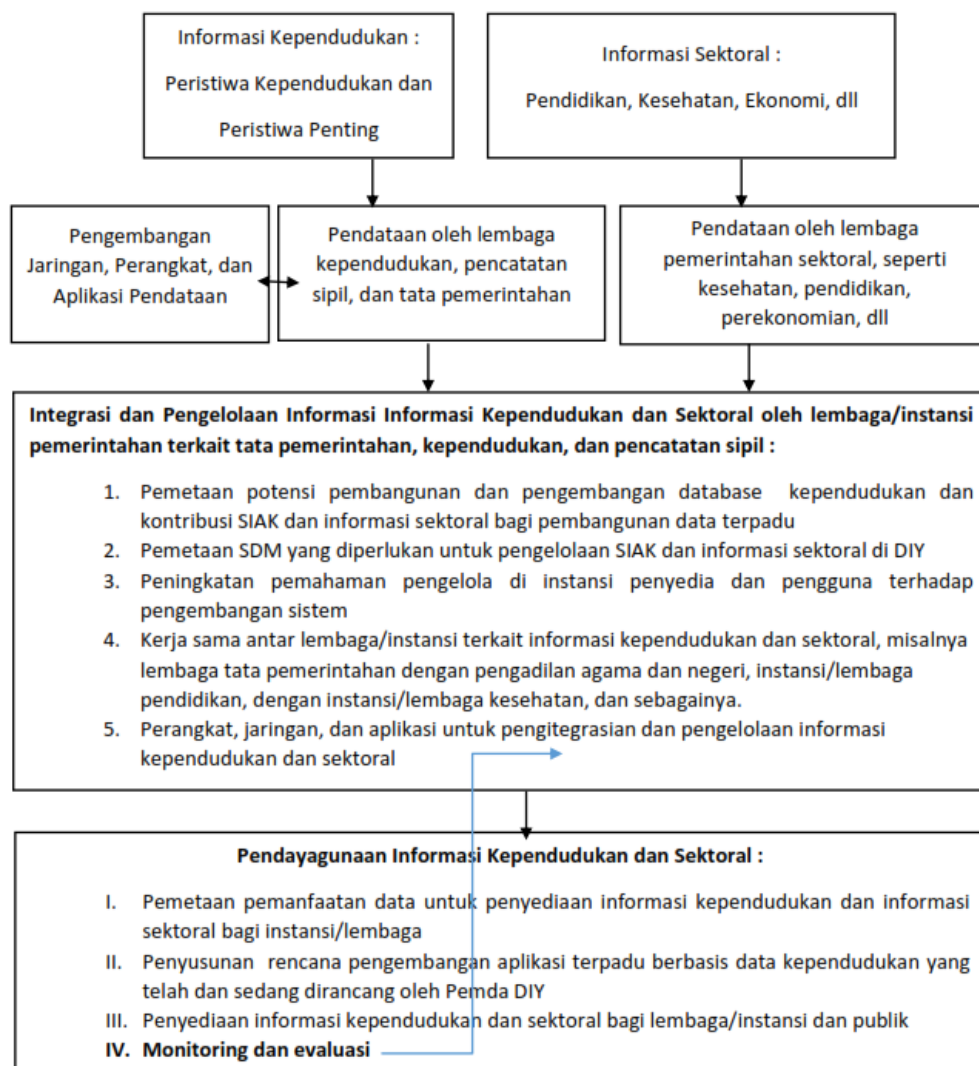
Kondisi kependudukan yang diinginkan dalam rangka penataan administrasi kependudukan dapat dirinci menjadi dua bagian. Pertama, untuk penataan dan pengelolaan database kependudukan kondisi yang diinginkan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut,

1. tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan,
2. tersusunnya sistem *database* kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.
3. Sinergitas data antar stakeholder sehingga mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Inti dari kondisi yang diinginkan dalam penataan dan pengelolaan database kependudukan adalah tersusunnya sistem database kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sinergi dengan berbagai stakeholder sebahai bahan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Kondisi yang diinginkan dalam penataan dan pengelolaan database kependudukan di Kota Yogyakarta selaras dengan kondisi yang diinginkan di DIY. Gambar 5.4 adalah kondisi yang diinginkan di DIY. Meminjam alur

diagram pada gambar tersebut, upaya penataan database kependudukan di Kota Yogyakarta diarahkan ke hal serupa. Deskripsinya bahwa database kependudukan dalam adminduk harus terintegrasi dengan data lain di banyak sektor. Operasionalnya misalnya data tunggal yang berbentuk NIK harus menjadi basis data bagi pelayanan publik. Nomor Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, SIM, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau Ijazah Perguruan Tinggi. Ke depan, NIK adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan. Dengan pemberlakuan NIK itu, diharapkan tolok ukur dalam pelayanan publik adalah NIK, karena posisi NIK itu sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan nasional.



Gambar 5.3 Kondisi yang diinginkan dalam penataan dan pengelolaan database kependudukan DIY

Sumber: Dokumen GDPK Provinsi DIY

Kedua kondisi yang diinginkan dalam penataan administrasi kependudukan adalah penataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Berdasarkan kondisi terkini penerbitan dokumen kependudukan, beberapa dokumen seperti kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan KTP-El sudah menunjukkan hasil yang baik. Pada kepemilikan kartu keluarga kondisinya sudah 100 persen keluarga memiliki dokumen tersebut. Sedangkan untuk kepemilikan KTP-El, kenaikan capaian kepemilikan terus terjadi selama 2014-2018. Sedangkan untuk capaian dokumen kependudukan lain seperti kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, dan KIA kondisi 100 persen belum dapat dicapai.

Kondisi yang diinginkan dari penataan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah tercapainya penerbitan 100 persen dokumen kependudukan pada seluruh penduduk di Kota Yogyakarta. Rinciannya adalah penduduk Yogyakarta diharapkan 100 persen memiliki KIA bagi anak dan KTP-El bagi penduduk di atas umur 17 tahun. Selain itu kondisi yang diinginkan adalah seluruh bayi sebelum 30 hari sudah memiliki akta kelahiran dan bagi penduduk yang meninggal maksimal 60 hari telah memiliki akta kematian. Penetapan batas hari maksimal bagi kepemilikan akta kelahiran dan kematian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

6.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan uraian tentang kondisi penduduk saat ini dan harapannya dimasa yang akan datang terlihat ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan baik yang sifatnya tidak langsung maupun langsung. Dasar munculnya tantangan kebijakan kependudukan juga berasal dari Grand Desain Perencanaan Kependudukan yang dibuat level Propinsi dan hasil proyeksi penduduk yang dilaunching Bappenas pada bulan Agustus 2018. Tantangan tersebut adalah:

1. Mempertahankan angka TFR rendah. Berdasarkan hasil proyeksi baru Bappenas, Provinsi Yogyakarta ditargetkan memiliki TFR 1,8 sedangkan berdasarkan GDPK Provinsi Yogyakarta tahun 2018 TFR yang ditargetkan 2,1. Mempertahankan angka NRR 0.74 atau minimal sama dengan target proyeksi Bappenas Baru yaitu 0,88. Tantangan tersebut cukup berat mengingat beyond fertilitas di Kota Yogyakarta cenderung negative terhadap fertilitas yaitu jumlah perempuan tidak menikah, angka partisipasi kerja perempuan, dan tingkat pendidikan perempuan.
2. Mempertahankan rata-rata usia perkawinan pertama yang sudah ada dan segera menyelesaikan penyakit sosial yang mengganggu seperti pernikahan usia dini atau kehamilan yang tidak diinginkan. Tantangan ini cukup berat mengingat lingkungan sosial dan teknologi mendukung para remaja untuk mendekati perilaku social yang kurang baik. Kondisi ini dilakukan persamaan dengan peningkatan kualitas pendidikan manusia utamanya perempuan dan memperkuat fungsi keluarga.
3. Mempertahankan angka prevalensi kontrasepsi yang sudah diatas 70 persen. Upaya yang dilakukan lebih memantapkan pada pengguna kontrasepsi pada jenis alat kontrasepsi yang mantap. Sosialisasi Keluarga Berencana kepada generasi muda atau remaja sehingga mampu melakukan perencanaan keluarga. Sasaran Keluarga Berencana tidak hanya Pasangan Usia Subur namun bergeser pada remaja. Selain itu, bagi PUS lebih diarahkan kepada penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang memiliki tingkat kegagalan rendah. Ketimpangan ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta perlu diwaspadai

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan alat kontrasepsi. Kondisi ini semakin sulit karena jumlah karakteristik unmet need adalah perempuan berpendidikan tinggi, bekerja dan berasal dari kelas ekonomi baik.

4. KIE keluarga berencana dan norma keluarga kecil kepada pasangan usia subur migran. Keberadaan migran dengan berbagai latarbelakang social, ekonomi, dan budaya perlu mendapatkan perhatian sehingga migran memiliki norma dan budaya kependudukan yang hamper sama dengan penduduk Kota Yogyakarta.

6.2 Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas hidup di bidang kesehatan masih mengalami beberapa permasalahan dan tantangan, diantaranya:

- a. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak

Tingginya angka kematian ibu dan anak masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kota Yogyakarta. Kenaikan AKI disebabkan tidak disiplinya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan. Hal yang sama juga terjadi pada angka kematian bayi.

- b. Status Gizi Masyarakat

Berdasarkan data hasil survey kementerian kesehatan dan politeknik kementerian kesehatan terhadap kejadian stunting atau kejadian balita pendek di D.I. Yogyakarta pada tahun 2014-2017, angka kejadian stunting di Kota Yogyakarta masih lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten yang lain di DIY. Meskipun demikian terdapat lonjakan kejadian stunting di Kota Yogyakarta yang signifikan pada tahun 2017 sebesar 23%. Padahal Kota Yogyakarta pada tahun 2014 mempunyai angka 15,61% pada kejadian *stunting* atau balita pendek. Namun, pada tahun 2015 menjadi 17,54%. Menurut hasil survey yang telah dilakukan tersebut Kota Yogyakarta pada tahun 2017 perlu adanya perhatian khusus, mengingat pada tahun tersebut mengalami peningkatan jumlah *stunting* atau balita pendek yang cukup tinggi.

Tabel 6. 1 Data Stunting di DIY

No	Kab/kota	2014	2015	2016	2017	Keterangan
1	Kulonprogo	26,9	17.65	21.47	23.6	Increased
2	Bantul	19,4	23.05	18.45	22.9	Increased
3	Gunung Kidul	25,4	21.24	28.66	25.9	Decreased
4	Sleman	23,1	23.46	25.44	10.6	Decreased
5	Kota Yogyakarta	15,61	17.54	15.36	23	Increased
	DIY	22,1	20.56	21.84	19.8	Decreased

Sumber: GDPK DIY, 2018

b. Efektifitas dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Apabila ditinjau dari segi kuantitas, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta sudah sangat memadai. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 6. 2 Rasio Jumlah Penduduk dengan Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta tahun 2016

Fasilitas Kesehatan	Rasio di Kota Yogyakarta	Rasio Ideal
Rumah Sakit	1 unit: 20.564 jiwa	1 unit: 240.000 jiwa
Puskesmas	1 unit: 3.640 jiwa	1 unit: 120.000 jiwa
Klinik	1 unit: 4.782 jiwa	1 unit: 10.000–30.000 jiwa

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Tabel 6.2 menunjukkan rasio fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, rasio yang ada di Kota Yogyakarta masih berada di atas rasio ideal atau melebihi kebutuhan ideal. Ini menunjukkan bahwa jumlah faskes lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang harus dilayani. Dari segi jumlah fasilitas, keterjangkauan pelayanan di Kota Yogyakarta sudah sangat baik. Satu rumah sakit, idealnya melayani 240.000 jiwa. Di Kota Yogyakarta, satu rumah sakit melayani 20.564 jiwa. Jumlah tersebut sudah melebihi dari rasio ideal rumah sakit. Sementara untuk puskesmas, satu puskesmas idealnya melayani 120.000 jiwa. Di Kota Yogyakarta, satu puskesmas

melayani 3640 jiwa. Artinya, puskesmas hanya melayani seperempat dari jumlah pelayanan maksimal yang dipersyaratkan. Untuk klinik (balai pengobatan), idealnya melayani 10.000 hingga 30.000 jiwa dan di Kota Yogyakarta satu klinik hanya melayani 4.782 jiwa karena jumlah klinik yang sudah banyak. Jumlah klinik di Kota Yogyakarta sudah jauh dari rasio ideal yang dipersyaratkan.

Lebih banyaknya jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah seharusnya menjadi fenomena yang harus diperhatikan di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi tantangan bagi efektifitas pelayanan, yang berpengaruh pada penganggaran dan penggunaan lahan (mengingat lahan di Kota Yogyakarta sangat terbatas).

Disisi lain, melimpahnya fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta belum menjamin akses kesehatan yang lebih mudah ke masyarakat. Akses masyarakat untuk memperoleh kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kedekatan layanan namun juga keterjangkauan. Akan menjadi permasalahan apabila fasilitas kesehatan yang melimpah tersebut tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dari segi finansial.

Selain itu, seiring dengan sangat banyaknya jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta seharusnya cakupannya mampu mengintervensi kenaikan angka kematian bayi ibu dan anak; *stunting*; serta mampu mengatasi penyebaran penyakit.

c. Pelayanan kesehatan belum optimal

Sebagai daerah dengan jumlah fasilitas kesehatan yang melebihi jumlah seharusnya, seharusnya penyebaran penyakit di Kota Yogyakarta dapat teratasi dengan baik. Akan tetapi Kota Yogyakarta masih menghadapi penyakit yang berasal dari infeksi maupun penyakit yang diakibatkan oleh perilaku hidup.

Di Tahun 2017, Tuberkulosis (TB) Paru masih ditemukan di Kota Yogyakarta. Angka kesembuhan TB Paru mencapai 75,63, angka ini masih dibawah target angka kesembuhan (90). Selain itu, keberhasilan pengobatan TB Paru juga belum memenuhi target, angka keberhasilan pengobatannya baru mencapai 83,51; dimana targetnya adalah 90.

Penyakit akibat perilaku seperti HIV/AIDS; Diare dan DBD masih banyak ditemui di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi tantangan bagi pembangunan kesehatan karena tidak hanya berkaitan langsung dengan penyakit *genital*, namun juga melibatkan perilaku dan lingkungan.

d. Akses Penduduk terhadap Air Bersih

Berdasarkan data dari PDAM Tirta, pada tahun 2016 jumlah rumah tangga yang menggunakan air PDAM adalah sebesar 29.954 rumah tangga. Jumlah ini hanya sekitar 32,22 persen dari keseluruhan jumlah

rumah yang ada di Kota Yogyakarta. Rumah tangga yang menggunakan PDAM hampir dapat dipastikan memperoleh akses air yang bersih dan berkualitas. Sementara sisanya (67,78 persen) menggunakan sumber lainnya seperti air tanah dan sumur. Sumber lain inilah yang harus diperhatikan, mengingat kualitasnya belum teruji dan terkontrol. Seiring dengan pesatnya pembangunan di Kota Yogyakarta, dikhawatirkan pencemaran air tanah dan sumur terjadi.

Akses penduduk terhadap air bersih ini berkaitan erat dengan penyebaran penyakit menular seperti Diare. Jumlah kasus Diare di Kota Yogyakarta paling besar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bidang pendidikan masih mengalami beberapa permasalahan dan tantangan, diantaranya:

- a. Meningkatnya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta

Meskipun presentase angka putus sekolah di Kota Yogyakarta lebih rendah dibanding dengan kabupaten lain di DIY, namun trendnya cenderung meningkat. Kecenderungan meningkatnya angka putus sekolah tersebut dikhawatirkan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor *kemiskinan* (ekonomi), namun juga ikut dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk tidak melanjutkan sekolah dan menganggap pendidikan tidak penting.

- b. Belum adanya kebijakan yang komprehensif untuk pendidikan kejuruan

Dua hal yang diupayakan oleh pemerintah dalam hal pendidikan adalah peningkatan rata-rata lama sekolah serta pengembangan pendidikan kejuruan melalui SMK. Pendidikan kejuruan melalui SMK diorientasikan untuk siap bekerja selepas pendidikan menengah. Artinya, lulusan SMK tersebut akan mengenyam pendidikan selama 12 tahun saja. Angka tersebut lebih rendah dari rata-rata lama sekolah yang ditargetkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang ada seyogyanya saling berstimulasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Bidang ekonomi masih mengalami beberapa permasalahan dan tantangan, diantaranya:

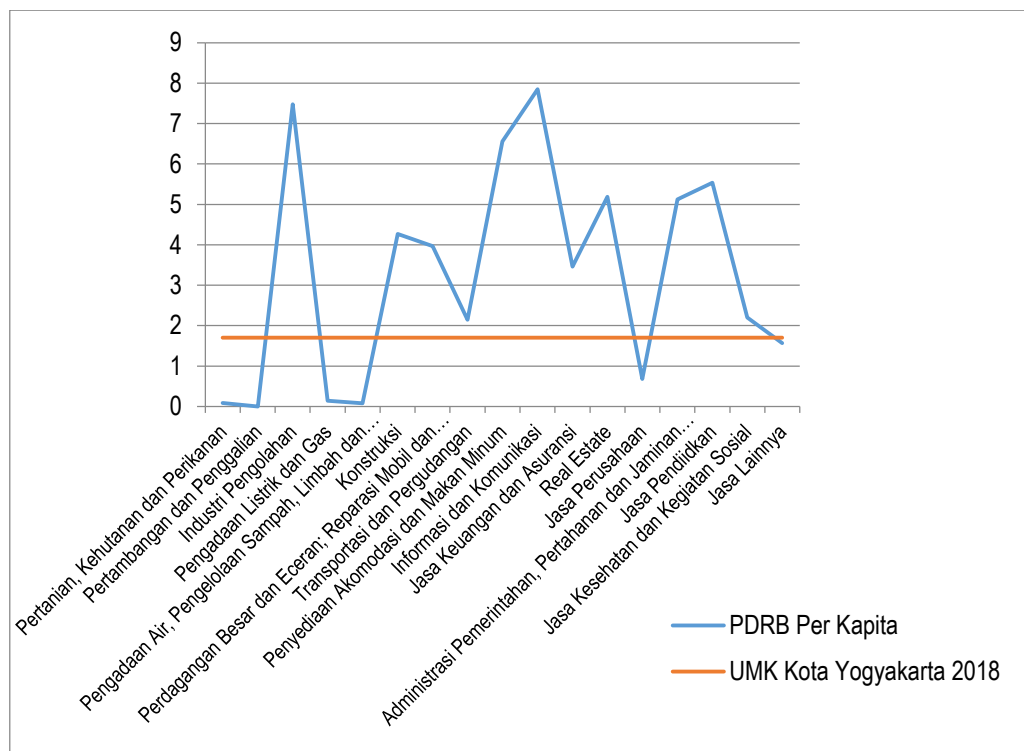
- a. Meningkatnya indeks gini yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20 persen teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40 persen terbawah.
- b. Masuknya tenaga kerja dari luar wilayah

Keberadaan Kota Yogyakarta yang merupakan pusat kegiatan nasional dan jantung aktivitas perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta

menyebabkan banyaknya pekerja yang datang dari luar wilayah. Hal ini menjadi tantangan agar masyarakat Kota Yogyakarta mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan para pendatang.

- c. Beberapa Rata-Rata PDRB Perkapita Sektor masih dibawah UMR Kota Yogyakarta

Gambar 6.1 menunjukkan PDRB Per Kapita menurut lapangan usaha di tahun 2016 dan perbandingannya dengan UMK Kota Yogyakarta. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui jika terdapat beberapa sektor yang PDRB Perkapitanya lebih rendah dari UMK Kota Yogyakarta yang mencapai ± Rp. 1700.000,-.



Gambar 6. 1 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha di Tahun 2016 dan Perbandingannya dengan UMR Kota Yogyakarta

Sumber: Hasil olah data 2018

Sektor yang nilainya dibawah UMR adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; penagdaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa perusahaan dan jasa lainnya. Hal ini menunjukkan jika PDRB Per Kapita sektor tersebut perlu ditingkatkan untuk pemerataan pendapatan antarsektor.

6.3 Pembangunan Keluarga

Pembinaan terhadap anggota keluarga terkait dengan peran mereka dalam membangun keluarga menjadi hal yang sangat penting. Pembinaan ini bisa dilakukan melalui pendidikan disekolah atau bagi orang dewasa/sudah bekerja sosialisasi dari pemerintah baik pemerintah pusat/daerah ke masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pembinaan anggota keluarga ini dimaksudkan untuk membangun keluarga sehingga keluarga menjadi organisasi yang kuat dan berkualitas.

Tingkat perceraian di Kota Yogyakarta, pada tahun 2017 mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, angka perceraian mencapai 184 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 71. Dengan demikian, kejadian perceraian ini mengindikasikan bahwa konseling/bimbingan terkait keluarga terhadap pasangan yang akan menikah menjadi sangat penting untuk diberikan agar mereka memahami bagaimana membangun keluarga dan menjaga keluarga agar tetap harmonis. Perceraian akan memberikan dampak bagi putri putri mereka. Perceraian akan mempengaruhi psikologi anak dan anak berpotensi menjadi depresi.

Edukasi terkait dengan seksual bagi remaja juga perlu diberikan di tingkat sekolah. Mereka harus diberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya hubungan seksual yang sehat melalui pernikahan yang sah. Hal ini juga sebagai bentuk untuk menghindari terjadinya sex bebas khususnya dikalangan remaja. Perkawinan yang sah untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Delapan fungsi keluarga belum dapat dijalankan secara optimal. nilai-nilai dalam fungsi keluarga perlu diterapkan pada masing-masing anggota keluarga. Mereka harus memahami fungsi tersebut. Sosialisasi terkait dengan fungsi keluarga ini menjadi sangat penting dan perlu terus disosialisasikan kepada setiap keluarga. Pembinaan bagi keluarga mulai dari balita dan anak, remaja, lansia perlu terus dilakukan.

Jumlah lansia yang cukup besar di Kota Yogyakarta menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan lansia menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera dan berketahanan. Lansia harus memiliki jaminan sosial agar keluarga mereka tidak menjadi keluarga yang rentan. Indikator lansia yang ideal adalah lansia yang cerdas, sehat dan produktif. Keberadaan lansia bisa menjadi beban pembangunan apabila tidak dikelola dengan baik. mereka cenderung memiliki kualitas hidup yang buruk dan tidak produktif. Oleh karena itu, peran dari Kelompok Bina Lansia (BKL) sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, meningkatkan kesehatan mereka dan menjadikan mereka menjadi lebih produktif.

Jumlah kelompok bina keluarga balita, kelompok bina remaja, kelompok bina lansia, jumlah pembinaan pusat informasi dan konseling remaja dan mahasiswa di Kota Yogyakarta perlu ditambah setiap tahunnya hingga rasionya sesuai dengan jumlah penduduk untuk masing-masing struktur tersebut. Pembinaan ini menjadi sangat penting. Terkait dengan Bina Keluarga Balita (BKB), masih banyak ditemukan kasus terkait dengan tumbuh kembang anak dan stunting yang perlu segera diatasi. Orang tua harus memahasi proses tumbuh kembang anak, dan perhatian terhadap gizi saat melahirkan maupun setelah anak lahir. Oleh karena itu kelompok BKB ini menjadi sangat penting untuk dibentuk. Partisipasi anggota kelompok juga perlu ditingkatkan untuk setiap pertemuan yang diadakan.

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) diharapkan mampu mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Remaja menjadi sangat rentan terhadap kenalan, karena usia mereka adalah usia dalam pencarian jati diri. Usia mereka sangat menentukan masa depan mereka apakah akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat atau sebaliknya. Remaja perlu dibimbing dan dibina, orang tua perlu diberikan pembinaan terkait dengan mendidik anak remaja yang benar. Masih ditemukan kenalan remaja di Kota Yogyakarta seperti narkoba, seks bebas, tawuran antar remaja dan bahkan kasus klitih. Bimbingan dari orang tua serta peran pusat informasi konseling remaja disetiap sekolah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting untuk memantau perkembangan remaja dan mengarahkan mereka untuk menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat. Berikut diasjikan beberapa kasus kenakalan remaja dalam Tabel 6.3

Tabel 6.3 Beberapa Kasus Kenakalan Remaja

Kasus kenakalan remaja	Sumber	Waktu
Kasus Klitih di Gondokusuman yang menewaskan seorang remaja. Pelaku adalah adalah remaja berusia 16 tahun dan 19 tahun warga Kota Yogyakarta	http://jogja.tribunnews.com/2018/06/09/pelaku-klitih-di-kawasan-terban-berhasil-ditangkap	9 Juni 2018
Pembacokan di Wirobrajan yang dilakukan oleh pelajar Kota Yogyakarta	http://jogja.tribunnews.com/2018/06/12/polisi-tetapkan-tiga-tersangka-kasus-pembacokan-di-wirobrajan-begini-kronologinya?page=2	12 Juni 2018

Sumber: Hasil Olahan, 2018

Bagi keluarga sejahtera, pembinaan ibu-ibu untuk menjadi lebih produktif menjadi sangat penting dan dianggap mampu menambah pendapatan keluarga. Bayak UPPKS di Kota Yogyakarta yang telah dibentuk. Mereka harus terus dibina dan didampingi. Setelah kelompok terbentuk, usaha-usaha yang mereka lakukan perlu dipantau proses produksinya hingga pemasarannya. Terkadang mereka kesulitan dalam hal pemasaran maka pelatihan untuk

peningkatan nilai tambah suatu produk dan pemasaran perlu diberikan kepada mereka agar mereka bisa menjadi lebih kreatif dan dapat terus bertahan menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat.

6.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Permasalahan dan tantangan umum yang ada di Kota Yogyakarta adalah bagaimana mengatur jumlah migrasi masuk, mengingat luas wilayah keseluruhan Kota Yogyakarta yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY. Terlebih lagi fungsi pusat perkotaan yang melekat pada Kota Yogyakarta menyebabkan daya tarik arus masuk penduduk. Jika migrasi masuk tidak dapat diantisipasi maka permintaan akan kebutuhan lahan akan semakin tinggi. Semakin tingginya tingkat kebutuhan lahan, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan akan terlampaui sehingga akan timbul permasalahan-permasalahan baru seperti polusi udara, banjir, kemacetan, dll. Besarnya permasalahan arus masuk penduduk akan semakin parah jika penduduk yang masuk adalah penduduk dengan keahlian rendah yang menghuni bantaran sungai. Dampaknya, kawasan permukiman kumuh (*slums*) dan hunian liar (*squatter settlement*) semakin luas dan akan menjadi beban Kota Yogyakarta.

Selain migrasi masuk permanen, migrasi non permanen (penglaju) menjadi tantangan tersendiri untuk Kota Yogyakarta. Kepadatan penduduk siang menyebabkan kemacetan lalu lintas pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Baiknya fasilitas pendidikan negeri maupun swasta menjadi daya tarik pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Yogyakarta. Efek positif dari banyaknya pendatang dari berbagai daerah dapat memperbesar investasi dan kerjasama antar daerah. Akan tetapi, jika jumlah pelajar dan mahasiswa baru yang masuk cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pelajar dan mahasiswa yang keluar kembali ke daerah asal setiap tahunnya menyebabkan Kota Yogyakarta akan menjadi semakin padat. Sehingga dibutuhkan strategi kebijakan untuk mengatur arus migrasi masuk dan keluar agar terjadi penduduk seimbang yang sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah.

6.5 Data dan Informasi Kependudukan

Permasalahan dan tantangan tentang data dan informasi kependudukan terkait integrasi data kependudukan dan data sektoral yang belum optimal. Selain itu permasalahan belum terpenuhinya capaian 100 persen dari kepemilikan dokumen kependudukan menjadi tantangan ke depan yang harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan pemenuhan kepemilikan dokumen merupakan hak dasar bagi penduduk dan hal ini juga menjadi agenda

pembangunan ke depan dalam SDGs. Secara rinci permasalahan dan tantangan pilar data dan informasi kependudukan di Kota Yogyakarta digambarkan dalam matriks berikut.

Tabel 6.4 Matriks Permasalahan dan Tantangan Pilar Data dan Informasi Kependudukan di Kota Yogyakarta

Aspek	Permasalahan	Tantangan
Penataan Dan Pengelolaan Database Kependudukan	Integrasi data kependudukan dan sektoral (pendidikan, ekonomi, sosial, dll) yang belum optimal	1. Pengembangan jaringan, perangkat dan aplikasi merger data kependudukan dan data sektoral lainnya
		2. Singkronisasi data antara data dari dinas kependudukan dengan dinas sektoral lainnya (dinas pendidikan, dinas kesehatan, dll)
		3. Kualitas SDM meliputi pengetahuan maupun keterampilannya dalam menangani SAK dan SIAK
Penataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Capaian dokumen kependudukan belum 100 persen	1. Ketersediaan blangko dokumen kependudukan pada pendataan secara manual dan dukungan jaringan internet pada pendataan secara online
		2. Sosialisasi yang tidak tersampaikan ke penduduk selalu sasaran dalam program tersebut
		3. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan dokumen kependudukan yang rendah

Sumber: Data Olahan, 2018

BAB VII

POKOK POKOK KEPENDUDUKAN

7.1 Kuantitas Penduduk

Tujuan dari pengendalian jumlah penduduk adalah kesesuaian antara jumlah penduduk dengan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada atau dengan kata lain daya dukung lingkungan. Penduduk Tanpa Pertumbuhan menjadi tujuan utama pengendalian jumlah penduduk. Strategi pembangunan kependudukan dapat dilihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.1 Strategi Pembangunan Kependudukan

Tujuan	Strategi
Penduduk Tumbuh Seimbang	<ol style="list-style-type: none">1. KIE PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi jika tidak menginginkan anak.2. PUS yang telah menggunakan kontrasepsi diarahkan untuk menggunakan kontrasepsi Mantap3. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui bantuan-bantuan kewirausahaan dan peningkatan ekonomi produktif4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan5. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja5. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dengan mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat

Sumber: Data Primer

7.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk berkaitan erat dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk diperlukan intervensi di tiga aspek pembangunan manusia tersebut, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kualitas penduduk meliputi tiga aspek penting yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk mendukung Pembangunan Sumberdaya Manusia. Diantara tiga aspek tersebut pembangunan ekonomi menjadi kunci peningkatan kualitas penduduk. Bidang ekonomi yang masih perlu didalami adalah ketimpangan dan jumlah penduduk miskin dan aspek ketenagakerjaan baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran.

Strategi GDPK Kota Yogyakarta dalam aspek ekonomi yaitu:

- a. Peningkatan pendapatan per kapita,
- b. Pengurangan ketimpangan,
- c. Pengurangan angka kemiskinan,
- d. Penurunan pengangguran.

Strategi GDPK Kota Yogyakarta dalam aspek kesehatan yaitu:

- a. Meningkatkan strategi kualitatif peningkatan Usia Harapan Hidup Sehat (UUHS) yaitu dengan cara:
 - meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
 - peningkatan status gizi
 - peningkatan kualitas lingkungan
 - mengendalikan penyakit menular dan tidak menular
 - peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak
 - peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. menurunkan maternal mortality ratio

Strategi GDPK Kota Yogyakarta dalam aspek pendidikan yaitu:

- a. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah
- b. Pengurangan Angka Putus Sekolah
- c. Peningkatan akses pendidikan lewat perluasan pemberian beasiswa PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, dan perguruan tinggi, serta pendidikan khusus
- d. Peningkatan pendidikan bagi perempuan

7.3 Pembangunan Keluarga

Tujuan dari pembangunan keluarga yang terdapat dalam Peraturan Presiden No 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, hal-hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan sah
3. Pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara
4. Pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga, berketahanan sosial dan kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan rekayasa sosial yang terdiri dari:

1. penataan struktur keluarga;
2. penguatan relasi sosial keluarga;
3. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
4. perluasan jaringan sosial keluarga.

Penataan struktur keluarga dilakukan melalui pembinaan untuk setiap struktur dalam keluarga. Penguatan relasi sosial dimaksudkan untuk menjaga dan membangun hubungan dengan anggota keluarga yang lainnya. pengembangan transformasi sosial keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi lebih baik berketahanan dan sejahtera. Perluasan jaringan sosial keluarga dimaksudkan untuk membangun dan menjadga hubungan dengan kerabat/relasi/rekanan lainnya.

7.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan Mobilitas Penduduk menjadi pilar strategis untuk mewujudkan distribusi penduduk yang merata dengan memperhatikan daya tampung wilayah. Kota Yogyakarta sebagai pusat perkotaan menjadi daya tarik penduduk luar daerah. Akibatnya jumlah penduduk masuk yang banyak pada berbagai kalangan menyebabkan minimnya ketersediaan ruang.

Adapun tujuan–tujuan pengarahannya mobilitas yaitu,

1. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Menciptakan pertumbuhan dan kuantitas penduduk seimbang
3. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
4. Meingkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

Dibutuhkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan pengarahannya mobilitas yaitu (1) Melakukan penataan kawasan sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah; (2) Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan; (3) Kebijakan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan non permanen; (4) Pengebangan wilayah penyangga; (5) melibatkan penduduk dalam pembangunan; (6) integrasi penduduk pendatang dan penduduk setempat, kerjasama antar daerah, dan peningkatan investasi.

7.5 Data dan Informasi Kependudukan

Posisi pembangunan manajemen informasi kependudukan yaitu sebagai fungsi dari pembangunan informasi kependudukan. Informasi kependudukan merupakan penggabungan dari dua hal yaitu administrasi kependudukan (data perseorangan penduduk dan peristiwa penting) serta data sektoral (kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial). Adapun pembangunan manajemen informasi kependudukan mencakup tiga matra utama, yaitu:

- a. Pendataan dan penyusunan informasi kependudukan berbasis teknologi yang terintegrasi
- b. Integrasi data dan informasi kependudukan dari lembaga-lembaga sektoral lain berbasis teknologi
- c. Pendayagunaan atau pemanfaatan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi

BAB VIII ROADMAP

8.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Target pengendalian penduduk telah tertuang dalam GDPK Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2017. Target tersebut tetap dipertahankan karena sejalan dengan GDPK Provinsi 2018 dan hasil Proyeksi Parameter Kependudukan yang dikeluarkan oleh Bappenas tahun 2018. Target tersebut adalah:

Tabel 8.1 *Roadmap* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Yogyakarta, Tahun 2015-2035*)

Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
Jumlah	409.487	435.936	456.483	477.999	500.529
TFR	1,60	1,58	1,55	1,53	1,50
NRR	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71
CBR	15,7	14,5	11,8	9,5	8,8
CPR	57,46	57,61	57,77	57,92	58,08
CDR	6,3	6,7	7,1	7,8	8,9
IMR	16,1	14,8	13,4	12,1	11,1
E0	74,6	75,3	76,0	76,7	77,3

Sumber: Data Sekunder, 2017

Target tersebut tercapai dengan usulan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 8.2 Usulan Kegiatan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tujuan	Kelompok Sasaran	Nama Program	Jenis Kegiatan	Indikator Capaian	Tahun				Pelaksana	
					2018-2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035		
Mengapai Penduduk Tumbuh Seimbang	PUS WUS Remaja	Pendewasaan Usia Perkawinan	1. Sosialisasi dan edukasi KB melalui Bina Keluarga, sekolah, PKK, Kampung KB, dan kemitraan	Rata-rata usia perkawinan meningkat	23	23	23	23	Dalduk	
				Penurunan unmet need	6	6	6	6	Dalduk	
				Pernikahan Usia Dini tidak ada	0	0	0	0	Dalduk	
			Penguatan akseptor	2. Peningkatan aksesibilitas layanan KB	Jumlah akseptor KB tetap atau meningkat	75	75	75	75	Dalduk
				3. Program Kontrasepsi Mantap	Akseptor Alkon MKJP meningkat	65	70	70	75	Dalduk
				4. UPPKS akseptor	Jumlah perempuan bekerja					Dinas Sosial
			Angka kemiskinan					Bappeda		
Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program pembangunan	Para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta	Capacity building Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1. Workshop integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan	Meningkatkan pengetahuan para pengambil kebijakan tentang pembangunan berwawasan kependudukan	XXX				Bappeda	
			2. Bintek penyusunan program pembangunan berwawasan kependudukan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan	Dokumen program yang tersinkronisasi	XXX				Bappeda	
		Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan kependudukan	3. Monitoring dan evaluasi Grand Design Pembangunan Kependudukan	Review dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan		XXX	XXX			Bappeda
Mengembangkan keterlibatan swasta dan masyarakat dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan kependudukan	Swasta dan masyarakat	Kemitraan untuk Pembangunan Kependudukan	1. Upgrading dan Refreshing isu-isu strategis kependudukan masa kini bagi keluarga kurang sejahtera	Meningkatnya pemahaman tentang isu-isu strategis kependudukan terkini bagi keluarga kurang sejahtera	XXX	XXX	XXX	XXX	Disdalduk & KB	
			2. Kemitraan untuk Pembangunan Kependudukan	Keterlibatan mitra dalam program KKBPK	XXX	XXX	XXX	XXX	Disdalduk & KB	
			3. Tahun promosi hasil-pembinaan, program KKBPK dan mitra eg. UPPKS,	Terselenggaranya pekan promosi	XXX	XXX	XXX	XXX	Dinaskop UKMNaker dan Trans	
Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Masyarakat	Pencegahan dan pengendalian penyakit	1. Imunisasi dasar (wajib) bayi dan balita	Cakupan bayi dan balita yang mendapatkan imunisasi dasar (wajib)	XXX	XXX	XXX	XXX	Dinas Kesehatan	
			2. Pemeriksaan HIV/AIDS	Setiap orang yang berisiko HIV/AIDS mendapat pemeriksaan HIV/AIDS	XXX	XXX	XXX	XXX	Dinas Kesehatan	
			3. Penyediaan data kematian (AKI, AKBA)	Tersedianya data kematian ibu, bayi dan balita secara lengkap dan akurat	XXX	XXX	XXX	XXX	Dinas Kesehatan	
Termanfaatkannya momentum bonus demografi secara maksimal	Remaja, angkatan kerja muda	Penyediaan data dan profil penanggur dan setengah penanggur	1. Penyediaan profil penanggur dan setengah penanggur	Tersedianya dokumen/proful penanggur dan setengah penanggur yang akurat dan lengkap	XXX	XXX	XXX	XXX	DinaskopUKMNaker dan Trans dan BPS	

Sumber: Hasil Olahan, 2018

8.2 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan Kualitas Penduduk di Kota Yogyakarta dapat dicapai dengan peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (peningkatan pendapatan per kapita dan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan angka ketimpangan).

8.2.1 Bidang Ekonomi

8.2.1.1 Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Yogyakarta

Tabel 8.3 Road Map Peningkatan Pendapatan Per Kapita di Kota Yogyakarta

Road Map	2018-2022 (Juta Rupiah)	2023-2027 (Juta Rupiah)	2028-2032 (Juta Rupiah)	2033-2035 (Juta Rupiah)
Peningkatan Pendapatan per kapita	60,269-67,994	69,924-77,644	79,573-87,293	89,223-93,083

Sumber: Hasil analisis, 2018

Melalui peningkatan pendapatan perkapita di Kota Yogyakarta maka diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, angka ketimpangan, angka harapan lama sekolah dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

8.2.1.2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Angka Ketimpangan

Tabel 8.4 Road Map Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Angka Ketimpangan di Kota Yogyakarta

Road Map	2017	Skenario	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
Menurunkan angka kemiskinan	7,565	Pertama	7,208	6,208	5,208	4,208
		Kedua	7,208	5,423	3,638	3,638
Menurunkan angka ketimpangan (gini ratio)	0,43		0,3-0,4 (moderat)	0,2-0,3 (moderat)	0,25-0,3 (rendah)	0,25-0,3 (rendah)

Sumber: Hasil analisis, 2018

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan dua skenario:

- Skenario pertama dengan mengikuti target Provinsi DIY
- skenario kedua dengan menggunakan proyeksi penurunan angka kemiskinan rata-rata Kota Yogyakarta per tahun

8.2.2 Bidang Pendidikan

8.2.2.1 Bidang Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu hal yang penting dalam peningkatan kualitas penduduk di Kota Yogyakarta. Meskipun Kota Yogyakarta sudah dikenal sebagai Kota Pendidikan, maka perlu menjaga kualitas pendidikan dan terus meningkatkan akses pendidikan. Perhatian Kota Yogyakarta terhadap pendidikan formal dan non formal, pendidikan perempuan, dan pendidikan tematik sesuai kompetensi menjadi fokus peningkatan pendidikan di Kota Yogyakarta. Dalam road map GDPK Kota Yogyakarta terkait peningkatan kualitas penduduk dalam pendidikan, setiap periode tahun tertentu disimbolkan dengan “xxxx” yang memiliki arti bahwa target yang ingin dicapai lebih ke arah optimalisasi peningkatan SDM, sistem, maupun peningkatan capaian sesuai dengan tema asing-masing.

Tabel 8.5 Road Map Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta

Road Map	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan melalui perluasan pemberian beasiswa	Xxxx	Xxxx	Xxxx	Xxxx
Pemerataan pendidikan formal dan non formal	Xxxx	Xxxx	Xxxx	Xxxx
Peningkatan pendidikan bagi perempuan dan anak putus sekolah	Xxxx	Xxxx	Xxxx	Xxxx
Kompetensi: <ul style="list-style-type: none"> Jasa dan Pariwisata Perdagangan (trading) 	Xxxx	Xxxx	Xxxx	Xxxx

Sumber: Hasil analisis, 2018

8.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah (8.2.3.1 A) dan Indeks Pembangunan Manusia (8.2.3.1 B)

Tabel 8.6 Road Map Peningkatan Angka Harapan Hidup dan IPM Kota Yogyakarta

Area	2018-2022		2023-2027		2028-2032		2033-2035	
	IPM	AHLS (tahun)	IPM	AHLS (tahun)	IPM	AHLS (tahun)	IPM	AHLS (tahun)
DIY	79,32	15,55	79,75	15,68	80,18	15,81	80,61	15,94
Kota Yogyakarta	87,89	17,39	90,36	17,84	92,90	18,39	94,46	18,84

Sumber: Hasil analisis, 2018

Roadmap IPM Kota Yogyakarta berdasarkan IPM 2017 yang sebesar 85,49 dengan kenaikan $\pm 2,5$ per periode (berdasarkan trend kenaikan IPM DIY 2012-2017). Periode pertama, IPM diproyeksikan pada angka 87,89. Periode kedua (2023 sampai dengan 2027) berada pada angka 90,36. Periode ketiga (2028 sampai dengan 2032) berada pada angka 92,90. Periode keempat (2033 sampai dengan 2035) pada angka 94,46.

AHLS di Kota Yogyakarta berdasarkan AHLS 2016 yang sebesar 16,81 dengan kenaikan $\pm 0,5$ poin per periode. Periode pertama, AHLS diproyeksikan pada angka 17,39. Periode kedua (2023 sampai dengan 2027) berada pada angka 17,84. Periode ketiga (2028 sampai dengan 2032) berada pada angka 18,39. Periode keempat (2033 sampai dengan 2035) pada angka 18,84. AHLS mempengaruhi IPM. AHLS merupakan peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sehingga Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator bahwa penduduk sejak umur 7 tahun mempunyai kesempatan yang tinggi mendapatkan pendidikan selama 15,94 tahun di DIY pada proyeksi tahun 2035.

8.2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama bersekolah (RRLS) di Kota berdasarkan kebutuhan pendidikan, sementara kenaikan tiap tahun didasarkan pada trend Rata-rata lama sekolah dari tahun 2012-2016. Periode pertama, RRLS diproyeksikan pada angka 11,73. Periode kedua (2023 sampai dengan 2027) berada pada angka 11,99. Periode ketiga (2028 sampai dengan 2032) berada pada angka 12,25. Periode keempat (2033 sampai dengan 2035) pada angka 12,42. RRLS mempengaruhi AHLS.

Tabel 8.7 Road Map Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta

Rata-Rata Lama Sekolah	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
DIY	12,16	13,82	14,53	15
Kota Yogyakarta	11,73	11,99	12,25	12,42

Sumber: Hasil analisis, 2018

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.



Gambar 8.1 Diagram Alur AHLS, IPM, dan RRLS

Sumber: Hasil analisis, 2018

8.2.2 Kesehatan

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas penduduk di Kota Yogyakarta melalui peningkatan derajat kesehatan penduduk. Peningkatan derajat kesehatan penduduk di Kota Yogyakarta ditempuh melalui peningkatan manajemen, regulasi kesehatan, data-informasi kesehatan yang akurat, dan pembiayaan kesehatan yang didukung oleh pemerintah. Dalam road map GDPK Kota Yogyakarta terkait peningkatan kualitas penduduk dalam kesehatan, setiap periode tahun tertentu disimbolkan dengan “xxxx” berarti target yang ingin dicapai lebih ke arah optimalisasi peningkatan SDM, sistem, maupun peningkatan capaian sesuai dengan tema masing-masing.

Tabel 8.8 Road Map Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta

Road Map	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
Meningkatkan derajat kesehatan penduduk melalui: a. upaya kesehatan, a. aplikasi manajemen, regulasi kesehatan, dan data-informasi kesehatan c. pembiayaan kesehatan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Meningkatkan keluarga sehat melalui peningkatan program Gizi KIA, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perilaku sehat, dan lingkungan sehat	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Meningkatkan pelayanan SPM, sarana prasarana kesehatan dan farmasi, serta litbang kesehatan	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Meningkatkan partisipasi penduduk dalam program jaminan kesehatan nasional	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Meningkatkan upaya penurunan resiko finansial akibat pelayanan kesehatan	xxxx	xxxx	xxxx	Xxxx

Sumber: Hasil analisis, 2018

Upaya yang masih erat kaitannya dengan meningkatkan derajat kesehatan penduduk adalah meningkatkan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, perilaku hidup sehat, serta lingkungan yang sehat. Pemberian gizi pada ibu dan anak diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan, sehingga pencegahan dan menekan kematian ibu dan anak di Kota Yogyakarta dapat direalisasikan. Pengendalian penyakit, perilaku sehat dan lingkungan yang sehat penting ditanamkan pada penduduk di Kota Yogyakarta baik melalui sosialisasi kesehatan maupun stimulan-stimulan bagi masyarakat.

Pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta jika berdasarkan SPM yang berlaku sudah terpenuhi dan justru jumlah fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta mengalami surplus, sehingga dalam roadmap ini justru ditekankan untuk perbaikan pelayanan agar lebih efektif dan memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Program jaminan kesehatan nasional maupun regional di Kota Yogyakarta menjadi salah satu terobosan yang sudah dilakukan guna menekan resiko finansial kesehatan yang akan dikeluarkan masyarakat. Keseluruhan upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut dilakukan dengan optimalisasi yang secara periodik terdapat realisasi hasil yang lebih baik.

8.2.2.1 Usia Harapan Hidup Sehat (UHHS)

Tabel 8.9 Road Map Peningkatan Usia Harapan Hidup Sehat

Road Map	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
Penentuan UHHS untuk kategori umur di bawah 65 tahun dan di atas 65 tahun berdasarkan metode: a. Lima penyakit mematikan tertinggi yang ditetapkan pemerintah daerah atau b. berdasarkan survey persepsi/asumsi responden	Xxxx	Xxxx	Xxxx	100%
Pendataan dan Pelaporan UHHS (HLE)	Xxxx	Xxxx	Xxxx	100%
Peningkatan angka HLE	Xxxx	Xxxx	Xxxx	xxxx
Peningkatan HLE secara kualitatif dengan 9 cara (juga dipraktekkan kepada semua kelompok penduduk): i. Peningkatan layanan kesehatan & Penjaminan kesehatan sosial ii. Peningkatan status gizi iii. Peningkatan status kualitas lingkungan iv. Akses air bersih dan sanitasi yang layak v. Perilaku hidup bersih dan sehat (menjaga asupan makanan bergizi, berolahraga, dan tidur cukup) vi. Penurunan penyakit menular dan tidak menular (penurunan morbiditas) vii. Penanganan dampak bencana yang baik viii. Penurunan angka kecelakaan dan angka kriminalitas ix. Pemberian pencegahan dan pengobatan penyakit berat	65	65	66	67

Sumber: Hasil analisis, 2018

8.2.2.2 Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak

Tabel 8. 10 Road Map Penurunan Kematian Ibu dan Anak

Road Map	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
Menurunkan angka kematian ibu dan anak				
a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran)	102	100	98	94
b. Angka kematian anak (per 1.000 kelahiran)	7,5	7,2	7	7
Peningkatan intervensi medis (bidan dan dokter) pada ibu hamil, melahirkan, dan nifas	Xxxx	Xxxx	95%	100%
Peningkatan pelayanan dan pendidikan untuk akses ibu hamil, melahirkan, dan nifas	95%	Xxxx	Xxxx	100%

Sumber: Hasil analisis, 2018

Berdasarkan target MGDs hingga tahun 2015, Indonesia memiliki target nasional sebesar 102 angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran). Sedangkan di Provinsi DIY menargetkan angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran) lebih besar dari nasional, yaitu sebesar 110 pada tahun 2015. Pada tahun 2017 angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran) di Kota Yogyakarta baru mencapai 110. Dengan kata lain target penurunan angka kematian ibu di Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan atau terus ditekan. Target angka kematian anak (per 1.000 kelahiran) pada tahun 2015 sesuai dengan target MDGs sebesar 7,52, padahal di tahun yang sama Kota Yogyakarta baru mencapai 8,2. Oleh karena itu perlu konsistensi upaya untuk menekan angka kematian anak (per 1.000 kelahiran) di Kota Yogyakarta, paling tidak di tahun 2018-2022 dapat ditekan pada angka 7,5.

Intervensi medis di Kota Yogyakarta dalam roadmap GDPK ini ditargetkan pada tahun 2033-2035 sudah 100%, artinya penanganan ibu hamil, melahirkan, nifas dan perawatannya sudah dilakukan oleh tenaga medis. Dukungan jumlah tenaga medis khususnya Dokter dan Bidan di Kota Yogyakarta yang memadai juga sudah menjadi modal awal yang baik untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu peningkatan pendidikan dan pengetahuan yang baik bagi ibu juga menjadi salah satu faktor untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.

8.3 Roadmap Pembangunan Keluarga

Tabel 8. 11 Roadmap Pembangunan Keluarga 2018-2035

Road Map	2018-2022	2023-2027	2028-2032	2033-2035
Membangun Keluarga yang berkualitas				
• Membangun keluarga berdasarkan perkawinan yang sah	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
• Menurunkan angka perceraian	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
• Kegiatan Bina Keluarga	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Membangun keluarga yang berketahanan				
• Peningkatan Legalitas Keluarga		xxxx		
• Program Keluarga Berencana	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
• Program peningkatan kecukupan pangan dan gizi	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
• Program peningkatan ekonomi keluarga	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Sumber: Hasil Olahan, 2018

Keluarga yang sah dibangun melalui pernikahan yang sah. Pernikahan harus terdata dan tercatat dalam dokumen negara. Oleh karena hal tersebut dorongan untuk menikah secara sah harus terus disosialisasi. Terkait dengan angka perceraian, menurunkan angka perceraian perlu diikuti dengan adanya pembinaan keluarga agar angka perceraian dapat terus turun. Pembekalan kepada calon pengantin perlu dilakukan secara intensif, agar pernikahan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik sampai akhir hayat. Kegiatan bina keluarga dilakukan pada seluruh struktur keluarga mulai dari balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Kegiatan bina keluarga dianggap mampu meningkatkan kualitas keluarga. Kesejahteraan lansia harus diperhatikan agar tidak menjadi beban pembangunan.

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998 dalam KemenPPPA, 2016).

Definisi lainnya ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri

maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara (KemenPPPA, 2016). Ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Oleh karena hal tersebut untuk mewujudkan ketahanan keluarga beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain 1) peningkatan legalitas keluarga melalui legalitas/pencatatan dokumen kepada negara baik itu kepemilikan buku nikah maupun akta kelahiran bagi putra dan putri, 2) program keluarga berencana, 3) program peningkatan kecukupan pangan dan gizi serta 4) program peningkatan ekonomi keluarga.

8.4 Road Map Pengarahan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan di antara keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi dan atau komponen yang lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Hasil perhitungan menunjukkan daya tampung lahan perumahan di Kota Yogyakarta yang menampung 410.921 jumlah penduduk sudah terlampaui -2,89 km² (Tabel 8.12).

Berdasarkan Peraturan Kementrian Perumahan Rakyat No.11/PERMEN/M/2008 Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, menjelaskan luas ideal kebutuhan ruang per-keluarga adalah 54m²-60m². Luas tersebut terdiri dari 36m² untuk rumah, 2 meter untuk jalan pada setiap sisi, dan sisanya digunakan untuk jaringan infrastruktur permukiman dan RTH. Merujuk pada kebutuhan rumah sederhana layak huni, setiap orang membutuhkan ruang seluas 9m². Jika asumsi yang digunakan adalah satu keluarga terdiri dari 4 anggota keluarga maka luas ideal rumah adalah 36m².

Tabel 8.12 Skema Perhitungan Kebutuhan Lahan Horizontal Kota Yogyakarta Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017	Jumlah KK 2017	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Lahan Perumahan (Existing) (Km ²)	Rencana Peruntukan Perumahan (Km ²)	Sisa Lahan Untuk Perumahan
Tegalrejo	36853	9213	2.91	1.88	1.92	0.05
Jetis	27235	6809	1.70	1.03	0.77	-0.25
Gondokusuman	42042	10511	3.99	2.22	1.63	-0.59
Danurejan	21121	5280	1.10	0.49	0.43	-0.05
Gedongtengen	20210	5053	0.96	0.63	0.44	-0.19
Ngampilan	18561	4640	0.82	0.61	0.49	-0.13
Wirobrajan	27746	6937	1.76	1.36	1.02	-0.33
Mantrijeron	35207	8802	2.61	2.00	1.80	-0.20
Kraton	21939	5485	1.40	1.04	0.00	-1.04
Gondomanan	15010	3753	1.12	0.46	0.48	0.02
Pakualaman	10716	2679	0.63	0.33	0.32	-0.01
Mergangsan	31986	7997	2.31	1.56	1.66	0.10
Umbulharjo	68760	17190	8.12	5.19	5.36	0.17
Kotagede	33535	8384	3.07	2.23	1.80	-0.43
	410921	102730	32.50	21.02	18.13	-2.89

Sumber Data:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017
2. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2017
3. Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan, beberapa kecamatan yang sudah memiliki kapasitas berlebih dalam penyediaan perumahan adalah Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Kotagede. Kecamatan yang memiliki perhitungan minus menunjukkan sudah tidak ada stock lahan lagi yang digunakan dalam penyediaan lahan perumahan. Akan tetapi, tidak semua kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki daya tampung terlampaui, terdapat beberapa kecamatan yang masih memiliki daya tampung terhadap lahan permukiman, diantaranya Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Gondomanan, dan Kecamatan Umbulharjo. Masih tersedianya lahan peruntukan perumahan di beberapa kecamatan disebabkan oleh besarnya luas wilayah dan luas peruntukan perumahan. Secara keseluruhan, sisa lahan peruntukan perumahan di Kota Yogyakarta tersisa 0,29 km².

Perhitungan kebutuhan lahan pada Tabel 8.13 menunjukkan kebutuhan lahan secara horizontal sudah menunjukkan Daya Tampung Lahan (DTL) yang terlampaui. DTL terlampaui dapat diantisipasi dengan skema lahan vertical.

Tabel 8. 13 Skema Perhitungan Jumlah Kebutuhan Unit Rumah Susun Di Kota Yogyakarta

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017	Jumlah KK 2017	Jumlah Unit Hunian yang dibutuhkan 2017	Jumlah Kebutuhan Unit Rusun (Twin blok) 192 unit
Tegalrejo	36853	9213	2333	12
Jetis	27235	6809	1463	8
Gondokusuman	42042	10511	2925	15
Danurejan	21121	5280	1164	6
Gedongtengen	20210	5053	1114	6
Ngampilan	18561	4640	1032	5
Wirobrajan	27746	6937	1586	8
Mantrijeron	35207	8802	2046	11
Kraton	21939	5485	1075	6
Gondomanan	15010	3753	829	4
Pakualaman	10716	2679	569	3
Mergangsan	31986	7997	1883	10
Umbulharjo	68760	17190	5520	29
Kotagede	33535	8384	2236	12
Total	410921	102730	25775	134

Sumber Data:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2018
- 2) Basis Data PKP DIY Tahun 2017

Total *Backlog* kebutuhan jumlah unit hunian yang dibutuhkan Tahun 2017 di Kota Yogyakarta adalah 25.775 unit. Alternatif pemenuhan kebutuhan lahan permukiman di perkotaan dapat dilakukan dengan pembangunan rumah susun (rusun). Pembangunan rumah susun *twin blok* dapat menampung kebutuhan 192 unit. Jika dipaksakan luas lahan tersisa peruntukan perumahan di Kota Yogyakarta yang hanya 0,29 km², harus menampung jumlah backlog yang dibutuhkan sejumlah 134 rumah susun maka Kota Yogyakarta menjadi *overload capacity* dalam pembangunan hunian.

Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau nonpermanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antarkabupaten/kota antarprovinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintah daerah.

Tabel 8. 14 Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2018–2035

Pokok Kebijakan	2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
1. Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan pusat industri rumah tangga berbasis kerajinan dalam upaya mendukung kedudukan Kota Yogyakarta sebagai pusat Kebudayaan, Pariwisata, dan Pendidikan	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxx (Tahun 1-4)	xxxx (Tahun 1-4)
2. Peningkatan kerja sama antardaerah dalam mengatur migrasi internal yang harmonis, bersinergi dengan kabupaten lain, dan berwawasan lingkungan	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)
3. Penyusunan Sistem Informasi Penduduk rentan administrasi, yakni yang berasal dari luar Kota Yogyakarta secara transparan dan terpadu	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxx (Tahun 1-4)	xxx (Tahun 1-3)	xx (Tahun 1-2)
6. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan penduduk lokal dengan pendatang	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)
7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta pada kecamatan-kecamatan yang terletak di perbatasan	xxx (Tahun 1-3)	xxx (Tahun 1-3)	xx (Tahun 1-2)	xx (Tahun 1-2)
8. Pengarahan dan fasilitasi mobilitas penduduk melalui program Transmigrasi dalam berbagai bentuk	xxxx (Tahun 1-4)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)
9. Pengembangan migrasi internasional melalui G to G program demi meningkatkan kualitas SDM yang berstandar internasional	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxxx (Tahun 1-5)	xxxx (Tahun 1-4)
10. Pendataan tenaga kerja luar daerah sebagai basis perencanaan angkatan kerja antar daerah	x (Tahun 5)	xx (Tahun 1 & 5)	xx (Tahun 1 & 5)	xx (Tahun 1 & 5)

Sumber: Dokumen GDPK Provinsi DIY

Pasal 16j menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk, maka perlu upaya pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem *database* dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahan mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahan mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahan mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan. Sebagai arahan kebijakan, Tabel 8.14 menampilkan Pokok-Pokok *Roadmap* Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kota Yogyakarta 2018-2035.

8.5 Data dan Informasi Kependudukan

Data dan informasi kependudukan memiliki fungsi sebagai dasar/pondasi dalam kerangka *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Dalam rangka itulah, kebijakan umum bidang data dan informasi kependudukan diarahkan kepada aspek pengembangan *data base* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Tabel 8.15 Roadmap Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2035

Road Map		2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
8.5.1	Penataan Database Kependudukan				
8.5.1.A.	Pemetaan pembangunan database kependudukan dan SIAK bagi pembangunan data terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan potensi pembangunan dan kebutuhan data • Analisis kebutuhan data untuk setiap bidang (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dsb) • Desain kebutuhan integrasi data setiap instansi ke dalam database SIAK 	XX Xx XX xX	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx	xxxxx xxxxx
8.5.1.B	Kerja sama antar lembaga/instansi terkait informasi kependudukan dan sektoral <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan MoU antara dinas kependudukan dan dinas sektoral lainnya • Singkronisasi data antara data dari dinas kependudukan dengan dinas sektoral lainnya (dinas pendidikan, dinas kesehatan,dll) 	XX	xxxxx	xxxxx	xxxxx
8.5.2	Pengembangan SDM, jaringan, perangkat dan aplikasi merger data kependudukan dan data sektoral lainnya				
8.5.2.A	Perangkat dan jaringan untuk pengintegrasian dan pengelolaan informasi kependudukan dan sektoral <ul style="list-style-type: none"> • Analisis kebutuhan datacenter terhadap kebutuhan database kependudukan • Pengadaan atau penambahan database server dan web server • Pengadaan backup server untuk data recovery • Penambahan kapasitas saluran internet di datacenter 	XX	XXXxx	xxxxx	xxxxx
8.5.2.B	Pengembangan aplikasi integrasi dan pengelolaan informasi kependudukan dan sektoral	XX	XXXxx	xxxxx	xxxxx
8.5.1.C	Pemetaan SDM yang diperlukan untuk pengelolaan SIAK dan informasi sektoral	XX	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
8.5.1.D	Peningkatan pemahaman pengelola di instansi penyedia dan pengguna terhadap pengembangan sistem <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SDM pengelola sistem informasi untuk pemetaan pembangunan • Pelatihan SDM pengelola sistem informasi untuk pemetaan layanan informasi di setiap instansi • Pengembangan kapasitas petugas registrasi kelurahan dan kecamatan 	XX	XXXxx	xxxxx	xxxxx

Road Map		2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
8.5.3	Pendayagunaan				
8.5.3.A	Penyusunan rencana pengembangan aplikasi terpadu berbasis data kependudukan <ul style="list-style-type: none"> • Analisis prioritas kebutuhan aplikasi terpadu dan penjadwalan implementasi • Fasilitasi pengembangan prototipe aplikasi untuk bidang sektoral (misal: pendidikan dan kesehatan) • Sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan • Pengembangan prototipe sistem informasi pemanfaatan data kependudukan dan sektoral berbasis mobile 	XX	XXxxx	xxxxx	xxxxx
8.5.3.B	Penyediaan informasi kependudukan dan sektoral bagi lembaga/instansi dan publik	XX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.5.3.C	Monitoring dan evaluasi untuk pengembangan pendataan, integrasi-pengelolaan, dan pendayagunaan informasi kependudukan dan sektoral	xX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.5.4	Pengelolaan Data dan Informasi (Kependudukan dan Sektoral)				
8.5.4.A	Data Sektoral (eksosbud, dll)	XX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.5.4.B	Data Penduduk (Akta kelahiran, KIA, Akta Nikah, KTP-El, Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan data kependudukan lainnya)	XX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sumber: Dokumen GDPK Provinsi DIY

Roadmap GDPK untuk data dan informasi kependudukan terbagi menjadi dua. Pertama adalah roadmap penataan dan pengelolaan database kependudukan serta kedua adalah roadmap penataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Roadmap penataan dan pengelolaan database kependudukan di Kota Yogyakarta 2018-2035 digambarkan dalam matriks Tabel 8.15.

Roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan kedua adalah tentang penataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Permasalahan pada aspek penataan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah capaian kepemilikan dokumen penduduk yang belum seluruhnya 100 persen. Persentase ini didapatkan dari hasil bagi dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen dengan jumlah penduduk yang seharusnya mendapatkan layanan dokumen kependudukan ini. Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam bagian ini meliputi KTP-El, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam rangka pencapaian dokumen kependudukan bagi semua penduduk di Kota Yogyakarta, roadmap penataan dan penerbitan dokumen kependudukan dapat dilihat secara rinci pada Tabel 8.15. Roadmap ini merupakan turunan dari roadmap dokumen GDPK provinsi.

Tabel 8. 16 Roadmap Penataan dan Pengelolaan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2035

Roadmap Persentase Kepemilikan KTP-El

Roadmap	Tahun			
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
Roadmap Persentase Kepemilikan KTP El Kota Yogyakarta	98,15%	98,65%	99,15%	99,65%

Roadmap Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga

Roadmap	Tahun			
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
Roadmap Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Kota Yogyakarta	99%	99,50%	100,00%	100,00%

Roadmap Persentase Akta Kelahiran

Roadmap	Tahun			
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
Roadmap Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Yogyakarta	96,50%	98%	99,50%	100%

Roadmap Persentase Akta Kematian

Roadmap	Tahun			
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
Roadmap Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kota Yogyakarta	100,0% (89%*)	100,0% (92%*)	100,0% (95%*)	100,0% (98%*)

*= skenario ke-2 di Dokumen GDPK DIY

Roadmap Persentase Kartu Identitas Anak

Roadmap	Tahun			
	2018-2019	2020-2024	2025-2029	2030-2035
Roadmap Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kota Yogyakarta	75,00%	100,0% (98%*)	100,0% (99%*)	100%

*= skenario ke-2 di Dokumen GDPK DIY

Sumber: Dokumen GDPK Provinsi DIY